

Pemetaan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Negara Mitra



PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI-KEMENTERIAN PERTANIAN RI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN (FEM) IPB
2015



PEMETAAN AGENDA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN NEGARA MITRA

**PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI-KEMENTERIAN PERTANIAN RI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN (FEM) IPB
2015**

**PEMETAAN AGENDA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN
PERTANIAN NEGARA MITRA**

Oleh: Hari Priyono

Cetakan Pertama 2015
116 halaman, 15,5 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh
Pusat Kerja Sama Luar Negeri-Kementerian Pertanian RI
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan, 12550

Bekerja sama dengan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB
Bogor

Hak Cipta 2015 pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.



Tim Penyusun

Penasehat	: Sekretaris Jenderal
Pengarah	: Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri
Penanggung Jawab/Ketua Tim	: Dr. Ade Candradijaya, STP, M.Si, M.Si
Sekretaris	: Hariwan Puja Wilapa, SS, M.AP
Anggota	: Prof. Muhammad Firdaus, Ph.D. Ir. Juariah, MM. Widyanto Soetajan, SE. Reynold Pandapotan Sitompul, SP. Windy Law Edwin Pasadame, S.Sos, M.Si. Wahyu Aji, SS. Wahyu Hukama, SE. Raden Fitri Anggraeni, SS. Heldi Yunan Ardian, SP, M.AP, M.Agr. Riyani, SP. Aprilliani Setyaningsih, SS. Indra Prabowo, SE.



Kata Pengantar

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian Indonesia pada posisi strategis dalam agenda kerjasama internasional, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Dalam konteks pembangunan pertanian, globalisasi dapat dipandang sebagai peluang dan sekaligus ancaman. Globalisasi membuat batas antar negara/wilayah menjadi semakin tidak terlihat (*borderless*), dimana arus informasi dan teknologi, perdagangan barang dan jasa, investasi, serta mobilitas manusia menjadi semakin bebas dan terbuka. Pada era tersebut, fokus pembangunan pertanian tidak lagi hanya pada peningkatan produksi dan produktivitas, tetapi lebih pada peningkatan daya saing komoditas pertanian yang dihasilkan sehingga mampu bersaing dengan serbuan produk asing di pasar domestik serta mampu berkompetisi untuk menembus pasar di negara lain.

Dalam era globalisasi, interdependensi kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan sektoral pertanian, antara Indonesia dengan berbagai negara mitra, baik kelompok negara yang lebih maju (*more developed countries*), sesama negara berkembang (*developing countries*), maupun kelompok negara kurang berkembang (*less developed countries*) menjadi semakin kuat. Kemajuan pembangunan pertanian di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kemajuan pembangunan pertanian di negara

lain, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perumusan strategi dan kebijakan kerjasama internasional sektor pertanian di Indonesia perlu memperhatikan peta kebijakan serta agenda pembangunan pertanian di negara-negara mitra strategis.

Buku *Pemetaan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Negara Mitra* ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang agenda pembangunan pertanian jangka pendek dan menengah serta kebijakan-kebijakan pendukung beberapa mitra yang paling strategis dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, yang dikelompokkan dalam kategori negara maju, negara berkembang, dan negara yang kurang berkembang melalui peta kebijakan fiskal, moneter, dan pertanian pada masing-masing negara tersebut.

Jakarta, Desember 2015



Hari Priyono



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 <i>State of The Art</i> Agenda Pembangunan Pertanian Negara Mitra	1
Bab 2 Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Maju dan Berkembang	17
2.1. Kebijakan Fiskal Negara Maju	17
2.1.1. Australia	17
2.1.2. Belanda.....	20
2.1.3. Amerika Serikat (AS)	21
2.1.4. New Zealand.....	25
2.1.5. Jepang.....	27
2.1.6. India.....	31
2.2. Kebijakan Moneter Negara Maju	32
2.2.1. Jepang.....	32
2.2.2. Thailand.....	33
2.2.3. Cina.....	35
2.2.4. Vietnam.....	38
2.2.5. India.....	38
2.3. Kebijakan Fiskal Negara Berkembang.....	39
2.3.1. Mesir.....	39
2.3.2. Kenya.....	40

2.3.3.	Nigeria	41
2.3.4.	Ethiopia	41
2.3.5.	Kamboja	42
2.3.6.	Nepal.....	42
2.3.7.	Papua New Guinea	43
2.3.8.	Laos.....	43
2.4.	Kebijakan Moneter Negara Berkembang	44
2.4.1.	Mesir	44
2.4.2.	Papua New Guinea	44
2.4.3.	Nigeria.....	44
2.4.4.	Solomon	45
2.4.5.	Kamboja	45
2.4.6.	Ethiopia	45

Bab 3	Kebijakan Pertanian Terkait Ketahanan dan Kemandirian Pangan	49
3.1.	Kebijakan Orientasi Input Negara Maju	49
3.1.1.	Australia	49
3.1.2.	Belanda.....	51
3.1.3.	Amerika Serikat (AS)	52
3.1.4.	New Zealand.....	53
3.1.5.	Jepang	54
3.1.6.	Thailand.....	56
3.1.7.	Cina.....	58
3.1.8.	Vietnam	60
3.1.9.	India.....	61
3.2.	Kebijakan Orientasi Input Negara Berkembang	62
3.2.1.	Kenya	62
3.2.2.	Mesir	63
3.2.3.	Ethiopia	63
3.2.4.	Kamboja	64
3.2.5.	Papua New Guinea	65
3.3.	Kebijakan Orientasi Output Negara Maju	66
3.3.1.	Australia	66
3.3.2.	Amerika Serikat (AS)	67
3.3.3.	New Zealand.....	69
3.3.3.	Jepang.....	70

3.3.4.	Thailand.....	70
3.3.5.	Cina.....	71
3.3.6.	Vietnam.....	72
3.4.	Kebijakan Orientasi Output Negara Berkembang.....	73
3.4.1.	Kamboja.....	73
3.5.	Kebijakan terkait Akses Pasar dan Perdagangan serta Kebijakan lainnya di Negara Maju.....	75
3.5.1.	Australia.....	75
3.5.2.	Belanda.....	80
3.5.3.	Amerika Serikat (AS).....	82
3.5.4.	New Zealand.....	85
3.5.5.	Jepang.....	86
3.5.6.	Thailand.....	87
3.5.7.	Cina.....	87
3.5.8.	Vietnam.....	88
3.5.9.	Mesir.....	88
3.5.10.	India.....	89
3.6.	Kebijakan Orientasi Output Negara Berkembang.....	89
3.6.1.	Vanuatu.....	89
3.6.2.	Kenya.....	90
3.6.3.	Nigeria.....	90
3.6.4.	Solomon Island.....	91
3.6.3.	Sierra Leone.....	91
3.6.4.	Nepal.....	92
3.6.5.	Papua New Guinea (PNG).....	92
3.6.7.	Laos.....	93
3.7.	Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, Pertanian, dan Akses Pasar terhadap Indikator Pertanian Negara Maju dan Berkembang.....	93
Bab 4	Sinkronitas Arah Pembangunan Pertanian melalui Kerjasama Pertanian Indonesia dan global.....	97
4.1.	Sinkronisasi Kerjasama Pertanian Indonesia dengan Negara Mitra.....	97
4.2.	Rekomendasi Kebijakan.....	100
	Daftar Pustaka.....	103

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perkembangan Beberapa Variabel Makroekonomi Kawasan Asia Pasifik 2014-2016	2
Tabel 2.	Klasifikasi Negara Maju dan Berkembang Pertaniannya...	5
Tabel 3.	Bantuan Pemerintah Negara Australia Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate/ PSE (Persen)</i>	19
Tabel 4.	Bantuan Pemerintah Australia Terhadap Petani yang Dihitung dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate</i>	20
Tabel 5.	Subsidi yang Diberikan oleh Pemerintah Belanda	21
Tabel 6.	Bantuan Pemerintah Negara Amerika Serikat Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate/ PSE (Persen)</i>	23
Tabel 7.	Bantuan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate</i>	24
Tabel 8.	Bantuan Pemerintah Negara New Zealand Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate/ PSE (Persen)</i>	26
Tabel 9.	Bantuan Pemerintah New Zealand Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate</i>	27
Tabel 10.	Bantuan Pemerintah Negara Jepang Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate/ PSE (Persen)</i>	29
Tabel 11.	Bantuan Pemerintah Jepang Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate</i>	30
Tabel 12.	Tingkat Suku Bunga di Thailand (Persen)	34
Tabel 13.	Bantuan Pemerintah Negara Cina Terhadap Petani yang Dihitung dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate/ PSE (Persen)</i>	35
Tabel 14.	Bantuan Pemerintah Cina Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk <i>Producer Support Estimate</i>	36

Tabel 15.	Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Maju dan Berkembang	46
Tabel 16.	Rekap Kebijakan Pertanian Berorientasi Input	66
Tabel 17.	Rekap Kebijakan Pertanian Berorientasi Output	75
Tabel 18.	Inisiatif Terkait Penanganan Kekeringan di Australia.....	77
Tabel 19.	Inisiatif Terkait Pengembangan Akses Komoditas Pertanian ke Pasar Premium.....	79

Daftar Gambar

Gambar 1.	Strategi Penguatan Nawacita Terkait Peningkatan Agroindustri.....	7
Gambar 2.	Strategi Penguatan Nawacita Terkait Kedaulatan Pangan.....	7
Gambar 3.	Agenda Pembangunan Pertanian Negara Berkembang.....	13
Gambar 4.	Kredit Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari Pemerintah Australia	18
Gambar 5.	Skema Kredit yang Diterapkan Oleh Pemerintah Jepang..	33
Gambar 6.	Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap Produktivitas	94
Gambar 7.	Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap <i>Share</i> GDP Pertanian.....	95
Gambar 8.	Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian.....	96
Gambar 9.	Sinkronitas Kebijakan Pertanian Global	100

BAB 1

State of The Art Agenda Pembangunan Pertanian Negara Mitra

Perkembangan ekonomi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik mengalami perlambatan. Risiko perlambatan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu harga komoditas yang menurun, kondisi keuangan eksternal yang semakin ketat, *structural bottlenecks* dalam ekonomi, *rebalancing* yang terjadi di Cina, dan adanya tekanan ekonomi yang terkait dengan faktor geopolitis. Pada Tabel 1 dapat diketahui proyeksi kondisi makroekonomi negara-negara di kawasan Asia.

Perkembangan ekonomi dipengaruhi juga oleh risiko terkait stabilitas nilai tukar dan dampak El Nino. Risikostabilitas nilai tukar terkait dengan sentimen global mengenai ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate*, kebijakan lanjutan devaluasi Yuan oleh otoritas Tiongkok, dan pelemahan Ringgit Malaysia. Dampak fenomena El Nino juga perlu menjadi perhatian karena mempengaruhi prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Risiko-risiko tersebut tidak hanya mempengaruhi perekonomian secara umum tapi juga berpengaruh terhadap sektor pertanian. Ketidakstabilan nilai tukar dapat memberikan guncangan pada ekspor-impor komoditi pertanian dan dapat meningkatkan harga komoditi pangan. Fenomena El Nino juga mempengaruhi produksi dari komoditi pertanian termasuk komoditi pangan seperti padi, jagung, bawang merah,

dan lain-lain. Sehingga setiap negara memberikan respon melalui berbagai macam kebijakan mengurangi risiko yang terjadi termasuk risiko terhadap sektor pertanian.

Padahal, hingga saat ini sektor pertanian masih mempunyai peran yang strategis bagi banyak negara di dunia. Selain sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan, sumber devisa negara dan sumber bahan baku industri. Bahkan sektor pertanian sangat berkaitan erat dengan isu ketahanan pangan global, tingginya kebutuhan terhadap produk pertanian hampir berbanding terbalik dengan peningkatan produksi atau hasil pertanian di suatu negara. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun sektor pertanian terus dilakukan, salah satunya dengan peningkatan kerjasama internasional di bidang pertanian.

Tabel 1. Perkembangan Beberapa Variabel Makroekonomi Kawasan Asia Pasifik 2014-2016

Negara	GDP riil			Indeks Harga Konsumen			Pengangguran		
	Proyeksi			Proyeksi			Proyeksi		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asia									
Jepang	-0.1	1.0	1.2	2.7	1.0	0.9	3.6	3.7	3.7
Korea Selatan	3.3	3.3	3.5	1.3	1.5	2.5	3.5	3.6	3.5
Australia	2.7	2.8	3.2	2.5	2.0	2.3	6.1	6.4	6.2
Taiwan	3.7	3.8	4.1	1.2	0.7	1.3	4.0	4.0	4.0
Hongkong	2.3	2.9	2.7	4.4	3.2	3.4	3.2	3.2	3.1
New Zealand	3.2	2.9	2.7	1.2	0.8	2.1	5.4	5.3	5.2
ASEAN-5									
Indonesia	5.0	5.2	5.5	6.4	6.8	5.8	6.1	5.8	5.8
Thailand	0.7	3.7	4.0	1.9	0.8	2.4	0.8	0.8	0.8
Malaysia	6.0	4.8	4.9	3.1	2.7	3.0	2.9	3.0	3.0
Philipina	6.1	6.7	6.3	4.2	2.1	3.2	2.5	2.5	2.5
Vietnam	6.0	6.0	6.4	4.1	2.5	3.2	2.5	2.5	2.5

Sumber: IMF (2015)

Melalui kerjasama internasional di bidang pertanian, maka sebuah negara dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya yang tidak bisa dilakukan melalui produksi domestik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan jika dapat diketahui agenda pembangunan dan arah kebijakan dari masing-masing negara. Dengan mengetahui dan memahami agenda

pembangunan dan arah kebijakan pertanian di negara mitra, Indonesia akan mampu untuk memetakan rencana kerjasama internasional kedepan secara tepat, yang disesuaikan dengan agenda pembangunan dan arah kebijakan pertanian nasional.

Kajian ini difokuskan pada *mapping* agenda pembangunan dan kebijakan pertanian dalam *platform* yang lebih komprehensif karena urgensi untuk melakukan pemetaan kebijakan di level kebijakan makroekonomi, selain terfokus pada kebijakan sektoral, sangatlah penting untuk diidentifikasi dalam kaitannya dengan *policy making process* kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan di level makro yang direpresentasikan dengan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan “gambaran umum” dari kinerja perekonomian negara mitra dalam kerangka kerjasama pembangunan pertanian internasional secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi makro juga diyakini dapat mempengaruhi sektor pertanian dengan cara langsung atau tidak langsung. Kebijakan yang melibatkan suku bunga memiliki efek langsung pada nilai tambah di sektor pertanian. Kebijakan tersebut dapat pula langsung mempengaruhi profitabilitas produksi karena pertanian adalah industri padat modal terutama pada kasus negara *more developed countries*.

Secara tidak langsung, kebijakan ekonomi makro dapat mempengaruhi permintaan relatif untuk dan daya saing ekspor komoditas dan produk pertanian. Disamping itu, kebijakan ekonomi makro juga mengirim sinyal kepada investor di seluruh dunia tentang kinerja masa depan ekonomi suatu negara. Sinyal ini mempengaruhi kesediaan investor untuk menempatkan uang mereka di aset suatu negara, sehingga berdampak pada permintaan mata uang. Di pasar keuangan global saat ini, perubahan dalam permintaan untuk mata uang negara merupakan determinan fluktuasi nilai tukar yang secara implikatif akan memberikan konsekuensi lanjutan di sektor pertanian. Oleh karena itu, interdependensi antara kebijakan (fiskal dan moneter) serta sektoral (pertanian) di beberapa negara mitra kerjasama pembangunan pertanian internasional, baik dalam klasifikasi *more developed countries* maupun *developing countries*, sangatlah penting untuk diidentifikasi dan dipetakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan kajian ini adalah untuk:

1. Memetakan kebijakan fiskal, moneter, dan pertanian di negara maju (*more developed countries*) dan kurang berkembang (*less developed countries*).

2. Mendapatkan gambaran rencana pembangunan pertanian jangka pendek dan menengah serta kebijakan-kebijakan pendukung dalam rangka kerjasama dengan negara maju dan berkembang.

Dalam penelitian ini diklasifikasikan negara menjadi dua grup yaitu negara maju (*more developed*) dan berkembang (*less developed*) sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1. Pembagian menjadi kedua grup tersebut berdasarkan kategori-kategori tertentu. Negara maju diklasifikasikan berdasarkan:

1. Nilai *Human Development Index* (HDI) yakni lebih besar dari 0.8.
2. Tingginya *share* sektor sekunder dan tersier terhadap total GDP. Hal ini menunjukkan transformasi ekonomi yang terjadi di negara tersebut, sehingga dalam penelitian ini negara-negara yang masih berkembang seperti Vietnam, Thailand, Mesir, India, dan Cina.
3. Memiliki komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekspor.

Sedangkan negara berkembang yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih berdasarkan:

1. Share GDP pertanian diatas > 14 persen (dimana rata-rata share GDP pertanian Indonesia pada tahun 2013 adalah 14 persen)
2. Trend GDP pertanian selama periode 2008-2013 adalah positif
3. Negara yang mewakili Kawasan Selatan-Selatan dan Afrika bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Negara-negara yang terpilih tersebut, akan dianalisis kebijakan fiskal, moneter, dan pertaniannya sehingga Indonesia dapat menyusun kebijakan dalam rangka kerjasama dengan negara tersebut. Indonesia sebagai negara terpilih memiliki HDI sebesar 0.684 dan *share* GDP pertanian 14.2 persen.

Keluaran yang diharapkan adalah sebuah gambaran lengkap terkait garis besar arah pembangunan pertanian negara mitra, yang akan mampu memberikan deskripsi fokus tahapan pembangunan pertanian kedepan di masing-masing negara mitra. Untuk dapat menjawab tujuan dari kajian ini maka diperlukan data pendukung, seperti data sekunder yang diperoleh dari melalui UN Comtrade-WITS, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan.

Tabel 2. Klasifikasi Negara Maju dan Berkembang Pertaniannya

No	Negara Maju (More Developed Countries)	Human Development Index (HDI)	Share GDP Pertanian
1	Australia	0.933	3.70
2	Belanda	0.915	2.80
3	Amerika Serikat	0.914	1.60
4	New Zealand	0.910	3.80
5	Jepang	0.890	1.20
6	Thailand	0.722	11.60
7	Cina	0.719	9.20
8	Vietnam	0.638	17.90
9	Mesir	0.682	14.60
10	India	0.586	17.90

No	Negara Berkembang (Developing Countries)	HDI	Share GDP Pertanian
1	Vanuatu	0.616	25.10
2	Kenya	0.535	29.30
3	Nigeria	0.504	20.60
4	Solomon Island	0.491	51.90
5	Ethiopia	0.435	47.70
6	Sierra Leone	0.374	42.50
7	Kamboja	0.584	32.70
8	Nepal	0.540	30.70
9	Papua New Guinea	0.491	26.30
10	Laos	0.569	23.70

Agenda Pembangunan Pertanian Indonesia dan Negara Mitra

Visi dan Misi Pembangunan Indonesia adalah “**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

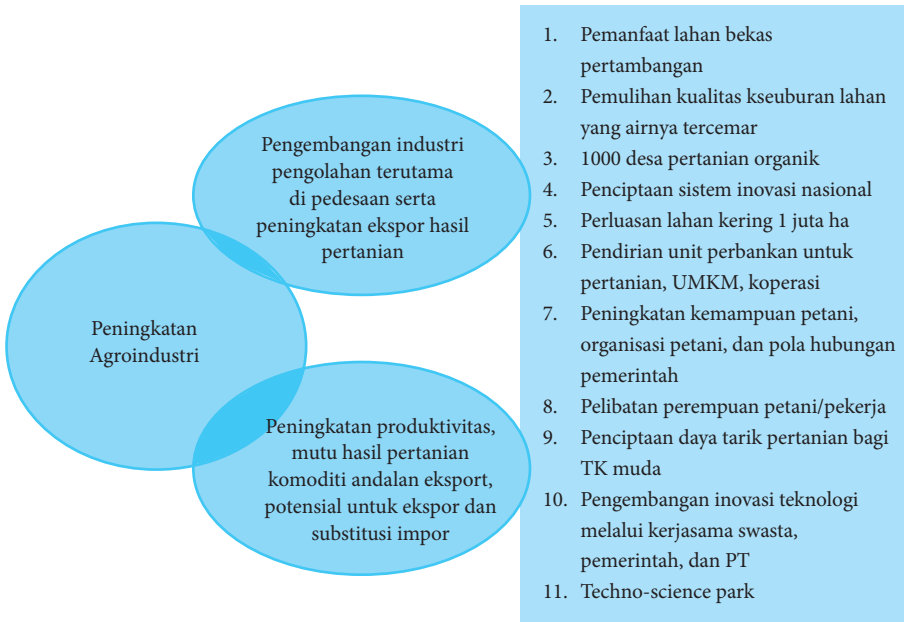
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA (**Sembilan Agenda Prioritas Nasional**), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 merupakan milestone lanjutan dari MDGs yang mendefinisikan satu set baru tujuan global untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan, yang dikenal sebagai pengembangan agenda post 2015 agenda. Kelompok *Working Group* mengusulkan beberapa tujuan untuk *Development Goals* yaitu:

- Usulan tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya



Gambar 1. Strategi Penguatan Nawacita Terkait Peningkatan Agroindustri



Gambar 2. Strategi Penguatan Nawacita Terkait Kedaulatan Pangan

- Usulan tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
- Usulan tujuan 3. Memastikan kesehatan dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua pada segala usia
- Usulan tujuan 4. Memastikan kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Usulan tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Usulan tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua
- Usulan tujuan 7. Memastikan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- Usulan tujuan 8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua
- Usulan tujuan 9. Membangun infrastruktur mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan inovasi asuh
- Usulan tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara
- Usulan tujuan 11. Membuat dan kota pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- Usulan tujuan 12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
- Usulan tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Usulan tujuan 14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan
- Usulan tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan berhenti dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- Usulan tujuan 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
- Usulan tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs usulan tujuan ke 17 yaitu “*Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan*”, kerjasama internasional dalam bidang pertanian perlu diselaraskan dengan arah kerjasama nasional seperti yang telah tercantum dalam RJPMN 2015-2019. Berdasarkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global.
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
3. Memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Indonesia; (b) Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerja sama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA; (e) Peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; (f) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (g) pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan (h) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan, *energy and food security* sebagai *public goods*; (i) penguatan pranata diplomasi ekonomi sebagai pelaksana diplomasi ekonomi.
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminentpersons group* untuk

membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.

6. Meningkatkan kerja sama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan strategi :
 - a. Meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara lain secara bilateral, dengan titik berat pada aspek kerja sama yang dapat mendorong peningkatan akses produk dan jasa ekspor Indonesia ke pasar prospektif, seperti: Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, dengan fokus pada Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia yang sedang tumbuh pesat, penurunan hambatan non-tarif di pasar ekspor utama, terutama untuk produk ekspor manufaktur dan ekspor jasa prioritas, peningkatan arus masuk investasi asing ke Indonesia, pengamanan pasar dalam negeri, untuk kepentingan perlindungan konsumen dan pengamanan industri domestik sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.
 - b. Mendorong kerja sama ekonomi (terutama pada sektor perdagangan dan investasi; termasuk pariwisata) di tingkat regional secara lebih intensif dan selektif, dengan tetap mengedepankan jati diri bangsa, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, serta menjaga kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan yang akan diarahkan pada kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN dan *Asia Pacific*, terutama dalam rangka: (i) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, (ii) ASEAN Post 2015, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), (iii) kerja sama ASEAN dengan negara-negara mitra, kerja sama ekonomi dalam kerangka *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, yang ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain dititikberatkan untuk mendorong: (a) pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, (b) peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera, serta (c) pengembangan jalur maritim untuk mendorong konektivitas

ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di jalur sabuk samudera hindia. Kerja sama sub regional dititikberatkan pada Kerja sama IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle*) dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines *East ASEAN Growth Area*), melalui: (1) pengembangan konteks kerja sama yang saling menguntungkan dengan cara identifikasi produk-produk unggulan dan prioritas di bidang-bidang yang dikerja samakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat; (2) peningkatan koordinasi baik antar instansi terkait di tingkat Pusat maupun antar instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan kerja sama ekonomi Sub-Regional; (3) Penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan Pemerintah Daerah, serta penguatan kapasitas/kemampuan dan daya saing dunia usaha di daerah; serta (4) pengembangan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kalangan dunia usaha di daerah untuk menyusun strategi dan langkah-langkah operasional dalam memperkuat posisi dan daya saing Indonesia dalam kerja sama ekonomi sub-regional yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.

- c. Mendorong peran aktif Indonesia dalam forum multilateral, seperti: WTO (*World Trade Organization*) dan G-20. Dalam forum WTO, peran aktif Indonesia akan dititikberatkan pada: (1) pelaksanaan *Post Bali Declaration*, terutama untuk isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu pembangunan; (2) pemanfaatan forum WTO untuk memperjuangkan permasalahan diskriminasi perdagangan yang dialami oleh produk dan jasa ekspor Indonesia; (iii) pemanfaatan forum WTO untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang; serta (iv) pemanfaatan kerja sama-kerja sama teknis dalam kerangka WTO dalam memperkuat kapasitas ekonomi domestik.
- d. Dalam forum G-20, peran aktif Indonesia akan dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi dan keuangan yang dipandang sebagai fondasi efektif bagi implementasi strategi pertumbuhan tersebut.

- e. Meningkatkan peranan Indonesia dalam organisasi komoditi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, seperti: peningkatan akses pasar, menjaga stabilitas harga di pasar internasional, pertukaran informasi dan data, alih teknologi, serta pengembangan pasca panen.

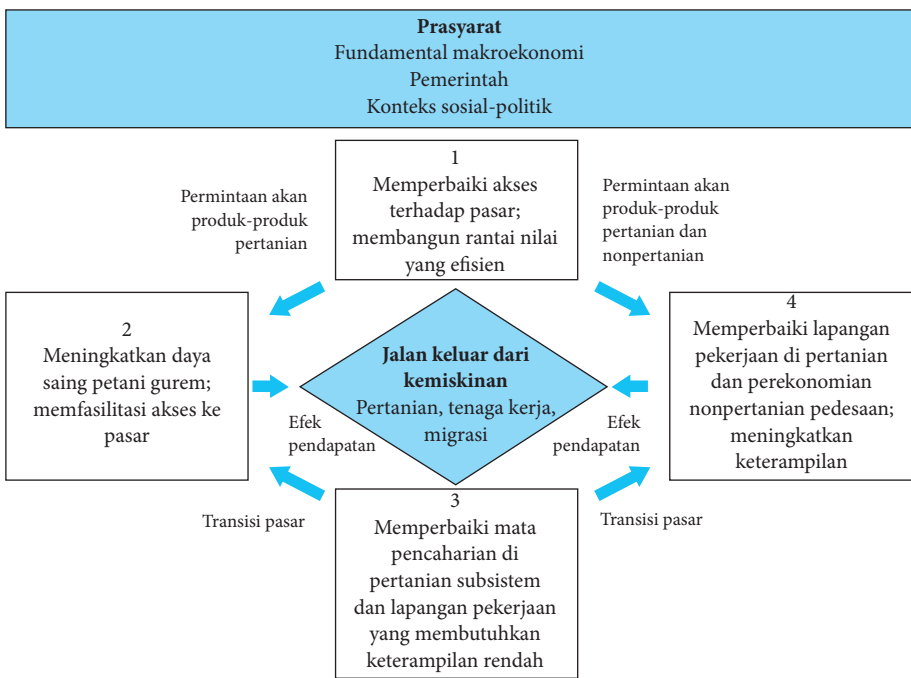
Penyelarasan antara kedua *benchmark* internasional SDGs dan RJPMN dalam hal kerjasama pembangunan pertanian seyogyanya terfokus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi sektor kunci dalam pencapaian sistem pertanian yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan: 1) mayoritas penduduk miskin berada di negara-negara berkembang yang nafkah utamanya bergantung pada sektor pertanian. 2) Adanya keterkaitan yang sangat erat antara kemiskinan dan kerawanan pangan, sedangkan penghasil pangan adalah sektor pertanian. 3) Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga masa depan ketahanan pangan akan diwarnai oleh pertumbuhan pasokan pangan yang tidak stabil dan harga pangan makin volatil.

Revitalisasi pertanian rakyat sangat penting untuk ditekankan kembali terutama dengan upaya khusus untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Industri pertanian rakyat terbukti membuka kesempatan kerja yang sangat luas, dan dapat menjangkau hingga ke pelosok pedesaan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai *Food Security Nutrition Framework* dan *Sustainable Agricultural Intensification* (Hermanto, 2015), meliputi:

1. Mengembangkan sektor pangan yang secara ekonomis efisien dan menguntungkan, secara sosial di terima masyarakat, dan sesuai secara lingkungan
2. Meningkatkan produksi dan perdagangan pangan dan menyempurnakan pengelolaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin
3. Mengupayakan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, serta meningkatkan daya saing dalam memproduksi pangan
4. Memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kinerja lingkungan pertanian
5. Mengembangkan sistem pertanian intensif ekologis

Agenda pembangunan pertanian berbeda untuk negara maju (*more developed countries*) dan negara berkembang (*less developed countries*). Begitu pula dengan agenda pertanian untuk negara yang

perekonomiannya berbasis pertanian, sedang berubah dan perekonomian urban. Dalam negara-negara berbasis pertanian, tujuan keseluruhan adalah mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan keamanan pangan. Dalam negara-negara yang mengalami transformasi tujuannya adalah menekankan kesenjangan penghasilan desa-kota dan kemiskinan pedesaan yang amat tinggi. Di negara-negara urban, tujuan tersebut mengaitkan para petani gurem dengan pasar-pasar bahan pangan domestik baru khususnya supermarket dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan.



Sumber: WDR(2008)

Gambar 3. Agenda Pembangunan Pertanian Negara Berkembang

Secara umum, agenda pembangunan pertanian dari negara-negara tersebut adalah untuk mendirikan pasar-pasar yang efisien dan rantai nilai. Tujuan kedua adalah mempercepat para petani gurem memasuki pasar-pasar pertanian dan membangkitkan daya inovasi serta daya kompetisi petani gurem. Tujuan ketiga adalah memperbaiki mata pencaharian-mata pencaharian dan keamanan pangan dalam pertanian subsisten dan pekerjaan-pekerjaan pedesaan yang rendah keahlian. Tujuan keempat adalah meningkatkan tenaga kerja dan kesempatan-kesempatan investasi

dalam perekonomian pedesaan selain mempertinggi keahliankeahlianagar kaum miskin pedesaanberkesempatan menangkap kesempatan - kesempatanini atau untuk bermigrasidengan berhasil. Secara bersama-sama semua itu mematahkan tiga jalan kemiskinan-pertanian, tenaga kerjapedesaan, dan migrasi.

Untuk negara-negaraberbasis pertanian di Afrika, tujuan utama dari agenda pembangunan pertaniannya adalah mengamankan keberlanjutan pertumbuhan pertanian, menekan kemiskinan, dan mengembangkan keamanan pangan. Tujuan ini tercermin dalam *Comprehensive Africa Agricultural Development Program* (CAADP) yang disusun oleh Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD). Penjelasan lebih rinci untuk agenda pembangunan pertanian di negara maju dan berkembang disajikan dalam uraian berikut ini.

Agenda pembangunan di negara Cina difokuskan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 yang bersamaan dengan rencana pembangunan lima tahunan ke-12 untuk tahun 2011-2015. Untuk itu, Cina mendapat bantuan dari UNDAF (United Nations Development Assistance Framework). Implikasi utama dari adanya program ini yaitu:

1. Pemerintah dan *stakeholders* lain harus mengutamakan kelestarian lingkungan, memberikan perhatian terhadap perubahan iklim dan mengampanyekan *green and low carbon economy*
2. Penduduk miskin turut berpartisipasi serta mendapatkan keuntungan yang lebih adil dari pembangunan ekonomi yang dilakukan di Cina
3. Meningkatkan partisipasi Cina dalam komunitas global agar dapat membawa keuntungan bersama yang lebih luas.

Konsep pembangunan pertanian di Jepang sejak tahun 1980-an sudah mengacu pada tiga hal pokok yaitu pertanian organik, *Green Tourism*, dan konservasi lingkungan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, berkualitas dan sehat bagi konsumsi. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan pertanian tidak hanya untuk penyediaan pangan saja, melainkan sekaligus dapat menjadi objek wisata. Tidak heran bila sebagian besar kawasan pertanian di Jepang sangat menarik dan indah karena memang mereka sangat memperhatikan penampilan di setiap lahan pertanian yang ada. Konsep pembangunan pertanian lainnya adalah pembangunan pertanian yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini sangat erat kaitannya

dengan pertanian organik. Kombinasi kedua konsep ini menyebabkan pertanian di Jepang lebih berkesinambungan (*Sustainable Agriculture*).

Secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi: (1) pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan; (2) pengembangan budaya dan industri pangan; (3) aliansi strategis berbagai industri; (4) pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas; (5) pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian; (6) konsolidasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan (7) pengembangan infrastruktur lahan pertanian (peningkatan skala usaha).

Visi pembangunan pertanian Thailand adalah “petani mendapatkan standar hidup yang lebih baik, masyarakat memiliki ketahanan pangan, dan negara memperoleh penerimaan”. Sementara itu, sasarannya yaitu untuk: (1) peningkatan indeks kemakmuran petani hingga 80 persen pada tahun 2016; (2) peningkatan ekonomi sektor pertanian sebesar tiga persen per tahun; dan (3) pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk peningkatan produksi pertanian. Strategi kunci kebijakan pertanian Thailand meliputi: (1) pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*); (2) pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan; dan (3) pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

Thailand adalah produsen utama gula, beras, ubi kayu, jagung, dan karet sekaligus sebagai negara pengekspor gula, ubi kayu, karet, nenas, dan buah segar. Beras juga menjadi salah satu prioritas utama pembangunan pertanian Thailand di samping komoditas lain seperti gula, jagung, sayuran, dan buah yang sudah menjadi produk global. Kebijakan pembangunan pertanian kunci Thailand salah satunya terkait dengan peningkatan harga beras (*rice pledging policy*).

Agenda pembangunan pertanian di India terangkum dalam *National Mission for Sustainable Agriculture* (NMSA). NMSA bertujuan untuk mengatasi masalah “pertanian berkelanjutan” dalam konteks risiko perubahan iklim dengan merancang sesuai strategi adaptasi dan mitigasi untuk memastikan ketahanan pangan. Adapun program yang dilakukan yaitu penelitian dan pengembangan, teknologi, produk dan praktek, infrastruktur dan pengembangan kapasitas. India memberlakukan UU Nasional Ketahanan Pangan (*National Food Security Act/NFSA*) yakni mencakup lebih dari 800 juta orang dan menyediakan 60 Kg Gabah per orang setiap tahun dengan harga sekitar 10% dari harga eceran.

Laos memiliki wilayah yang subur yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Lembah-lembah sungainya yang subur dapat dimanfaatkan untuk menanam kopi, teh, padi, serta hasil bumi lainnya yang dapat diekspor. Saat ini Laos memerlukan dukungan dan pelajaran dari negara tetangganya yang lebih dulu menorehkan kesuksesan. Maka, pemerintah Laos perlu mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan atau bekerjasama dengan investor negara tetangga untuk mengolah sebagian wilayah hutan menjadi perkebunan komersial dan mengolah hasil pertanian. Hutan misalnya, sebagian wilayahnya yang tidak dialokasikan sebagai cagar alam dapat digunakan untuk menanam tanaman komersial seperti karet dan kelapa sawit. Untuk itu, Laos perlu mencari partner potensial yang bisa dijadikan teladan dan target pasar. Malaysia misalnya, yang saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan minyak kelapa sawit dapat menjadi pasar sekaligus investor.

Sektor pertanian terutama produksi beras mendominasi ekonomi Laos, sektor ini melibatkan tenaga kerja hingga 85 persen dari populasi Laos dan menghasilkan 51 persen GDP. Laos banyak bergantung dari pinjaman luar negeri untuk menggerakkan ekonomi karena kemampuan masyarakat untuk menabung masih rendah. Produk pertanian Laos yang utama adalah beras, selain itu mereka juga menghasilkan ubi, sayur-mayur, jagung, kopi, teh, dan kacang-kacangan. Sektor industri yaitu pertambangan dan pembangkit listrik bertumbuh 12.5 persen per tahun, memberikan kontribusi 26 persen GDP. Sektor jasa tumbuh 8.4 persen per tahun dan memberikan sumbangan sekitar 30 persen GDP

Selain itu, fokus pemerintahan Laos adalah membenahan infrastruktur dan peningkatan sumberdaya manusia. Sebagai negara agraris, pertanian Laos merupakan konsentrasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, yang masih dalam tingkat kemiskinan. Peningkatan Sumber daya manusia dilakukan melalui program sarana pendidikan tingkat tinggi yang baik, agar penduduknya tak memilih mengenyam pendidikan di luar negeri, pelatihan keterampilan siap kerja, dan penyediaan lapangan kerja, agar angka kemiskinan bisa segera teratasi.

Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Maju dan Berkembang

2.1. Kebijakan Fiskal Negara Maju

2.1.1. Australia

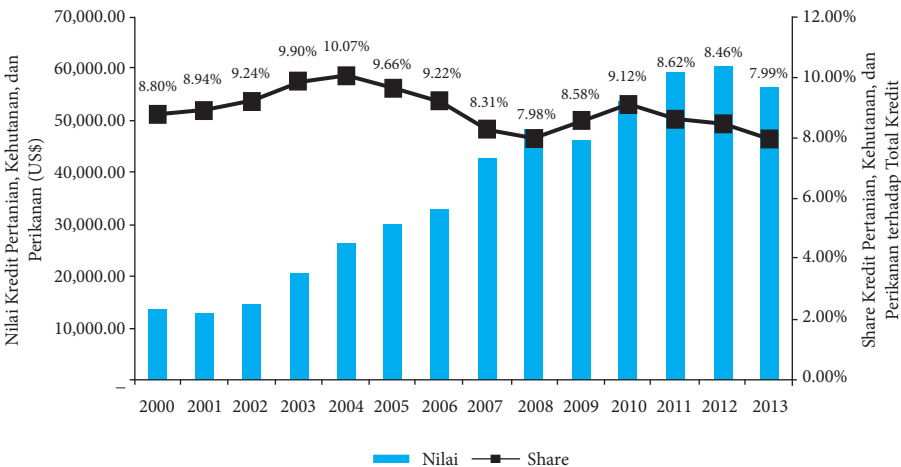
Para petani di Australia bisa memilih untuk kembali pada penerapan pajak pendapatan rata-rata. Pengurangan pajak secepatnya pada fasilitas perairan yang baru dan depresiasi pengeluaran modal pada ruang penyimpanan pakan selama 3 tahun. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan sebanyak \$500 juta untuk pembangunan infrastruktur air negara.

Sebesar 70 persen pendapatan pemerintah Australia ternyata bersumber dari pajak individu dan perusahaan. Jika pengeluaran pemerintah tidak dikurangi ada kemungkinan warga Australia akan mengalami kenaikan pajak. Australia harus meningkatkan belanja infrastruktur dan mengatasi pengangguran kaum muda seiring dengan mulai surutnya *booming* di sektor pertambangan di negara itu.

Australia secara keseluruhan memiliki kekurangan serius dalam permodalan saham infrastruktur dan ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tingkat investasi, terutama di sektor transportasi dan komunikasi. Bank sentral Australia (*Reserve Bank of Australia/RBA*) memberikan rata-rata kredit untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan

8 persen selama periode 2000-2013 dengan trend yang semakin menurun. Selain itu, RBA mempertahankan suku bunga acuan stabil pada rekor rendah 2 persen pada bulan Juni 2015. Tingkat suku bunga ini paling rendah dalam sejarah. Bila tindakan Bank Sentral ini diikuti oleh bank-bank besar Australia dalam suku bunga pinjaman rumah, maka mereka yang berutang sekitar \$ 300 ribu KPR akan membayar \$ 47 lebih sedikit per bulannya mulai sekarang.

Dengan keputusan ini, diperkirakan bahwa Bank Sentral Australia tidak akan lagi menurunkan suku bunga, dan para pakar memperkirakan keputusan berikutnya adalah meningkatkan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2016.



Sumber: WDI, 2015

Gambar 4. Kredit Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari Pemerintah Australia

Australia yang merupakan negara anggota OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) sedang mereformasi berbagai kebijakan pertaniannya. Rata-rata bantuan yang diberikan oleh negara-negara anggota OECD untuk kalangan produsen pertanian turun dari 37 persen nilai kotor penerimaan pertanian pada 1986–1988 (awal Putaran Uruguay) menjadi 30 persen pada 2003–2005. Perkiraan ini, yang biasa disebut sebagai estimasi bantuan produsen (*producers support estimate—PSE*), mengukur nilai moneter tahunan transfer kotor dari konsumen dan pembayar pajak kepada produsen pertanian, diukur pada tingkat petani sebagai bagian dari nilai kotor penerimaan pertanian.

Tabel 3. Bantuan Pemerintah Negara Australia Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk Producer Support Estimate/ PSE (Persen)

Tahun	<i>Proportion of support Support based on commodity output</i>	<i>Payments based on input use</i>	<i>Percentage PSE</i>
2000	12.2	46.39	3.75
2001	7.08	36.57	3.51
2002	4.1	30.71	4.92
2003	0	37.9	3.67
2004	0	46.9	3.4
2005	0	43.94	3.64
2006	0	50.68	4.42
2007	0	50.56	4.84
2008	0.08	44.66	4.43
2009	0	55.83	3.09
2010	0.13	48.7	2.95
2011	0	34.39	3.12
2012	0.03	54.97	1.97
2013	0.01	53.98	2.07
2014	0	46.98	2.27

Bantuan semacam ini muncul darilangkah kebijakan yang mendukungpertanian, tanpa memedulikan hakikat,tujuan, atau dampaknya pada produksi atau pendapatan pertanian. Australia memberikansedikit bantuan saja kepada para petani mereka. Bank-bank sering kalimemberikan pinjaman yang tidak akanmereka berikan untuk peminjam lain demi petani, supaya para petani tetap bergerak di sektor pertanian. Sebagian besar program pembayaranterpisah tidak memiliki batasan waktu.

Rata-ratabantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada para produsen pertaniannya juga cenderung menurun selama periode 2000-2014. Dimana pada tahun 2002, bantuan yang diberikan 4.92 persen dan semakin menurun bahkan pada tahun 2012 hanya 1.97 persen. Pada tahun 2014, bantuan yang diberikan sebesar 2.27 persen dari nilai kotor penerimaan pertanian. Bantuan tersebut lebih banyak diberikan dalam bentuk penggunaan input yang mencapai 46.98 persen pada tahun 2014 dan sisanya dalam bentuk bantuan yang lain. Jika dihitung berdasarkan komoditi maka pemerintah Australia hanya memberikan bantuan untuk komoditi gula dan susu. Bantuan untuk gula hanya sampai tahun 2008 dan bantuan untuk susu berlanjut sampai tahun 2013 dengan nilai yang semakin menurun.

Tabel 4. Bantuan Pemerintah Australia Terhadap Petani yang Dihitung dalam Bentuk *Producer Support Estimate*

Tahun	PSE (Persen)	Gula		Susu	
		Juta US\$	Persen	Juta US\$	Persen
2000	3.75	7.9	2.03	71.2	3.9
2001	3.51	4.64	0.9	40.32	1.98
2002	4.92	1.74	0.31	27.14	1.68
2003	3.67	4.21	0.75	0	0
2004	3.4	22.16	2.98	0	0
2005	3.64	15.13	1.89	0	0
2006	4.42	3.6	0.39	0	0
2007	4.84	3.99	0.55	0	0
2008	4.43	3.37	0.39	0.94	0.03
2009	3.09	0	0	0	0
2010	2.95	0	0	1.1	0.03
2011	3.12	0	0	0	0
2012	1.97	0	0	0.2	0
2013	2.07	0	0	0.06	0
2014	2.27	0	0	0	0

Belanda memiliki kerangka kebijakan fiskal yang *robust* dimana ciri-ciri utamanya adalah:

- 1) Penggunaan indikator riil seperti inflasi dalam mengatur pengeluaran pemerintah yang ditetapkan untuk seluruh bagian
- 2) Penggunaan *automatic stabilisers* dari sisi penerimaan
- 3) Penggunaan asumsi makroekonomi secara independent. Ketika pemerintahan yang baru terbentuk, target anggaran tahunan untuk pengeluaran pemerintah dan pajak sudah diatur untuk seluruh bagian.

2.1.2. Belanda

Bantuan pemerintah Belanda untuk pertanian dengan memberikan subsidi untuk sektor tanaman pangan. Akan tetapi, nilai bantuan ini cenderung menurun periode 2004-2011 dan dialihkan ke subsidi untuk pembangunan. Hal ini dilakukan karena pemerintah Belanda mengurangi defisit anggaran dengan cara penghematan. Penurunan defisit pemerintah adalah hasil dari langkah-langkah penghematan. Sebaliknya, kenaikan pajak direncanakan sambil memastikan kenaikan daya beli rumah tangga.

Tabel 5. Subsidi yang Diberikan oleh Pemerintah Belanda

Tahun	Total subsidies - excluding on investments (SE605)	Total subsidies on crops (SE610)	Total subsidies on livestock (SE615)	Total support for rural development (SE624)	Subsidies on intermediate consumption (SE625)	Additional aid (SE640)
2012	20703	0	147	3031	133	0
2011	21156	515	-313	3240	153	0
2010	19954	506	206	2446	95	0
2009	18961	402	1151	2281	27	0
2008	17492	346	1160	2077	154	173
2007	16636	331	913	1551	0	168
2006	16117	322	7871	1826	14	133
2005	12557	3390	6514	1310	20	94
2004	10099	3906	4379	1440	3	0

Sumber: FADN, 2015

2.1.3. Amerika Serikat (AS)

Kemajuan pertanian Amerika Serikat terutama di bidang tanaman biji-bijian seperti jagung, kedelai, wheat, sorghum, dan padi, tidak terlepas dari kebijakan dan dukungan pemerintah yang konsisten terhadap petani. Kebijakan dan dukungan diberikan dan dinikmati langsung oleh petani dengan tujuan utama adalah untuk menjaga agar usaha pertanian tetap menarik, menguntungkan, dan petani terhindar dari risiko kerugian dalam kondisi apapun. Dengan kebijakan dan dukungan tersebut kegiatan pertanian di AS dapat terus berkembang dan bersaing di pasar internasional.

Salah satu kebijakan AS untuk memajukan pertanian adalah mengadakan *Farm Bill*. *Farm Bill* adalah salah satu produk legislasi AS yang disahkan oleh Kongres AS setiap 5 tahun. Undang-undang ini mengalokasikan anggaran untuk membantu petani dan program-program di sektor pertanian AS, mencakup bantuan tunai langsung ke petani (*direct payment*), pembangunan kawasan pertanian dan pemasaran internasional.

Farm Bill yang disahkan pada tanggal 18 Juni 2008 yang berlaku hingga tahun 2012 dan menggantikan *Farm Bill* sebelumnya yaitu *Farm Bill 2002*. *Farm Bill 2008* atau lebih dikenal dengan *The Food, Conservation, and Energy Act of 2008* mencakup 15 program diantaranya adalah *commodity price and income supports, farm credit, trade, agricultural conservation,*

research, rural development, energy, dan foreign and domestic programs seperti *food stamps* dan program perbaikan nutrisi lainnya.

Alokasi anggaran terbesar kedua setelah program Nutrisi (Title IV) adalah adalah program Komoditas (Title I). Pada *Farm Bill* 2008 program ini mendapatkan alokasi anggaran sebanyak \$42 milyar atau sekitar 15% dari total dana *Farm Bill*. Program komoditi ini secara umum terdiri atas 3 bentuk pembayaran ke petani: (1) pembayaran langsung (*direct payments*) tahunan yang penetapannya tidak berkorelasi dengan tingkat produksi dan harga, (2) *counter cyclical payments* yang dikeluarkan apabila harga jatuh di bawah harga yang sudah ditargetkan sebelumnya, dan (3) *marketing assistance loans* yang menyediakan pendanaan sementara (interim financing) dan, jika harga komoditi jatuh dibawah harga yang disepakati dalam kontrak pinjaman, menjadi tambahan bantuan pendapatan (*additional income support*). Program Komoditas ini menjadi semacam jaring penyelamat (*safety net*) untuk melindungi petani dari kejatuhan harga komoditi pada saat panen dan membantu meningkatkan pendapatan petani.

Subsidi harga dan bantuan pendapatan, dikemas dalam Title I (Program Komoditas), diberikan pemerintah ke petani didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar tidak mampu menyeimbangkan antara besarnya pasokan dan permintaan. Pada saat panen melimpah sementara permintaan tetap, harga komoditi pertanian menjadi sangat rendah dan kondisi ini tidak baik bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan system produksi pertanian. Demikian pula yang terjadi di tingkat petani, petani tidak dapat merespon secara cepat dan proporsional apabila terjadi perubahan harga misalnya dengan mengurangi produksinya jika harga panen jatuh. Jatuhnya harga panen akibat kelebihan produksi akan merugikan petani karena biaya sudah terlanjur dikeluarkan sementara petani pun sudah harus menyiapkan tanaman untuk musim tanam berikutnya dimana tingkat harga pada musim panen berikutnya itupun tidak jelas.

Untuk itu, maka penyediaan subsidi harga dan pendapatan ini diberikan untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani dengan mengalihkan sebagian risiko tersebut diatas dari petani ke pemerintah. Risiko tersebut antara lain ketidakstabilan harga komoditas jangka pendek dan perbaikan kapasitas dalam jangka panjang. Tujuannya adalah menjaga daya saing ekonomi sektor pertanian dengan demikian dapat bersaing secara global dalam menghasilkan pangan dan serat.

Subsidi ini awalnya dimulai pada tahun 1930-an ketika terjadi resesi ekonomi berat (*great depression*) di AS. Tujuan awalnya adalah untuk mengontrol tingkat pasokan komoditas dan pengelolaan stock sehingga tingkat pendapatan petani dapat terjaga pada level yang menguntungkan, namun kemudian telah berubah pendekatannya menjadi semacam bantuan tunai langsung (*direct income support payments*). Sebagai contoh, Target Price (TP) untuk jagung ditetapkan dalam *Farm Bill* 2008 sebesar \$2,63/bushel, *direct payment* untuk jagung sebesar \$0,28/bushel, dan *loan rate* sebesar \$1,95/bushel. Jika harga pasar di atas \$2,35/bushel ($\$2,63 - \$0,28$) maka petani tidak menerima bantuan *counter cyclical* dan *loan deficiency program (LDP)*. Jika harga pasar antara \$1,95 dan \$2,35/bushel, maka petani menerima bantuan *counter cyclical payment* namun tidak untuk LDP. Jika harga pasar jatuh di bawah \$1,95/bushel, maka petani akan menerima kedua jenis bantuan, *countre cyclical payment* sebesar \$0,40/bushel dan LDP yang besarnya adalah selisih antara *loan rate* (\$1,95) dengan harga pasar. Sedangkan pembayaran langsung (*direct payment*) sebesar \$0,28/bushel akan tetap diterima petani sebarangapun harga pasar pada saat itu.

Tabel 6. Bantuan Pemerintah Negara Amerika Serikat Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate/ PSE* (Persen)

Tahun	<i>Proportion of support Support based on commodity output</i>	<i>Payments based on input use</i>	<i>Percentage PSE</i>
2000	51.13	14.26	22.67
2001	52.02	15.90	21.44
2002	39.55	19.44	17.86
2003	34.82	24.65	14.75
2004	41.67	20.62	16.04
2005	36.40	23.15	15.05
2006	21.74	31.29	11.10
2007	38.33	27.87	9.67
2008	6.90	28.75	8.62
2009	14.64	27.84	10.10
2010	23.88	29.09	8.58
2011	14.03	28.49	8.02
2012	21.46	27.34	7.89
2013	11.60	31.59	6.91
2014	23.03	23.09	9.80

Pada tahun 2010/2011 luas lahan yang ditanami jagung di AS sekitar 88,2 juta acres (36 juta ha). Jika tiap petani jagung mengelola lahan sekitar 200 acres (80 ha) maka diperkirakan terdapat sekitar 441.000 petani individu atau keluarga yang terlibat kegiatan produksi jagung. Hasil yang dicapai pada tahun 2010/2011 dari areal jagung yang berhasil dipanen seluas 81,4 juta acres (33 juta ha) dihasilkan sebanyak 12,437,920,000 bushel jagung atau setara dengan 315 juta ton. Dengan demikian subsidi yang diterima petani dari *direct payment* program untuk jagung adalah sebesar \$3,5 Milyar (total produksi jagung dalam bushel x \$0.28) atau sekitar \$125.000 per individu dan menjadi \$250.000 jika suami dan istri petani bekerja *full time* di diproses produksi jagung.

Tabel 7. Bantuan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate*

Komoditas	Satuan	Growth 2000-2013
<i>Producer Support Estimate</i> (PSE)	Persen	-43.35
WHEAT	Juta US\$	17.21
	Persen	-48.98
BARLEY	Juta US\$	-41.28
	Persen	-67.39
MAIZE	Juta US\$	9.00
	Persen	-64.42
SORGHUM	Juta US\$	24.30
	Persen	-30.76
RICE	Juta US\$	-92.64
	Persen	-96.02
SOYBEANS	Juta US\$	-58.84
	Persen	-85.18
REFINED SUGAR	Juta US\$	-81.85
	Persen	-84.69
MILK	Juta US\$	-77.97
	Persen	-88.68
POULTRY MEAT	Juta US\$	-100.00
	Persen	-100.00
SHEEP MEAT	Juta US\$	-19.69
	Persen	-20.09
WOOL	Juta US\$	-99.77
	Persen	-99.50
COTTON	Juta US\$	-64.46
	Persen	-65.37

Dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap petani dalam bentuk yakni *Producer Support Estimate* (PSE) adalah sebesar 9.80 persen pada tahun 2014. Dukungan ini dalam bentuk output komoditas dan penggunaan input. Adapun komoditas yang diberikan bantuan PSE cukup banyak, akan tetapi nilainya cenderung menurun selama periode 2000-2013.

Farm Service Agency (FSA) menyusun peraturan yang lebih ringan kepada para petani di Amerika Serikat yang memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan peminjaman kredit atau bantuan kredit pemerintah. Peraturan peminjaman uang bagi para petani dan peternak yang baru mulai usahanya dimodifikasikan, agar mereka yang memenuhi persyaratan dapat meminjam uang untuk meningkatkan dan mendapatkan manfaat yang lebih baik, sehingga munculah sebuah program yang membantu petani di perdesaan atau daerah pinggiran, dalam peminjaman dengan nama 'farm loan program'. Program bantuan pinjaman untuk para petani kecil, dimaksudkan untuk pinjaman atau modal pada masa tanam, dan juga untuk masa panen pada saat harga hasil tanaman menurun, karena kelebihan produksi. Program ini memberikan kemudahan bagi para petani yang meminjam kepada pemerintah, yaitu tingkat bunga yang sangat rendah, hanya sebesar 0.5 persen dan dalam jangka waktu diatas rata-rata 10 tahun. Peranan pemerintah disini sangat menguntungkan para petani. Selain meminjam kepada pemerintah melalui bank-bank yang ditunjuk, para petani juga dipermudah meminjam uang kepada para agribisnis, hal ini dimaksudkan agar petani tidak meninggalkan pekerjaannya.

Perhatian pemerintah terlihat besar dalam meningkatkan bantuan pertanian melalui pembayaran *countercyclical* atau sering disebut sebagai pengganti pembayaran darurat, disusun untuk membatasi dampak dari rendahnya harga dan penghasilan para petani. Sehingga petani diperbolehkan mengajukan pinjaman sebelum masa tanam berikutnya dan tidak perlu menunggu pelunasan pada pinjaman sebelumnya. Hal ini dilakukan agar petani memiliki modal ketika melakukan pembaharuan lahannya, serta dapat memperluas produksinya.

2.1.4. New Zealand

Pada tahun 1983 New Zealand memberikan subsidi yang tinggi kepada pertanian. Namun kondisi tersebut justru tidak membawa perbaikan untuk sektor pertanian. Hingga akhirnya, pemerintah New Zealand menghapus subsidi untuk petani dan menggantikannya dengan memberikan

pendampingan secara menyeluruh agar petani mampu mengembangkan sektor pertanian lebih baik. Hasilnya setelah menghentikan subsidi petani menjadi lebih inovatif.

Tabel 8. Bantuan Pemerintah Negara New Zealand Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate/ PSE* (Persen)

Tahun	<i>Proportion of support Support based on commodity output</i>	<i>Payments based on input use</i>	<i>Percentage PSE</i>
2000	0	88.44	0.32
2001	30.42	69.31	0.45
2002	29.06	70.94	0.3
2003	69.11	30.88	0.75
2004	61.24	32.96	0.68
2005	59.66	17.72	1.37
2006	68.4	25.53	0.91
2007	78.22	21.39	0.71
2008	68.61	30.61	0.57
2009	61.17	38.1	0.41
2010	78.4	21.29	0.64
2011	85.39	14.2	0.91
2012	82.7	17.17	0.83
2013	81.25	18.39	0.63
2014	86.75	13.13	0.99

Seperti Australia, pemerintah New Zealand juga tidak banyak memberikan bantuan kepada petaninya. Bantuan yang diberikan hanya sebesar 0.99 persen dari penerimaan kotor petani pada tahun 2014. Berbeda dengan Australia, pemerintah New Zealand lebih banyak memberikan bantuan untuk output komoditas dibandingkan dengan penggunaan input. Bantuan yang diberikan tersebut untuk komoditas daging unggas dan telur yang semakin meningkat selama periode 2000-2014. Pada tahun 2014, bantuan untuk daging unggas mencapai 23.28 persen dan telur mencapai 22.64 persen dari total *Producer Support Estimate* (PSE).

New Zealand mempertahankan kerangka terbuka untuk investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). Sumber terbesar FDI adalah Australia, Amerika Serikat dan Britania Raya. Target untuk kebijakan moneter adalah untuk menjaga inflasi antara 1 persen dan 3persen rata-rata dalam jangka menengah, dengan fokus pada menjaga rata-rata inflasi ke depan di titik tengah target 2persen.

Tabel 9. Bantuan Pemerintah New Zealand Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk Producer Support Estimate

Tahun	PSE (Persen)	Daging Unggas		Telur	
		Juta US\$	Persen	Juta US\$	Persen
2000	0.32	0	0	0	0
2001	0.45	0	0	6.81	13.86
2002	0.3	0	0	3.97	7.44
2003	0.75	30.09	16.34	0	0
2004	0.68	12.17	5.32	16.79	21.4
2005	1.37	28.54	12.1	27.69	32.21
2006	0.91	27.26	12.91	14.68	17.87
2007	0.71	43.73	17.73	16.51	15.94
2008	0.57	32.43	13.38	2.71	2.64
2009	0.41	22.58	10.26	0	0
2010	0.64	46.91	17.35	14.5	13.19
2011	0.91	88.89	26.97	19.44	16.06
2012	0.83	92.93	25.34	0	0
2013	0.63	64.26	16.72	25.4	18.54
2014	0.99	94.56	23.28	32.5	22.64

2.1.5. Jepang

Peran pemerintah Jepang dalam bidang pertanian hanya sebagai pembuat kebijakan karena teknis pelaksanaan dilakukan oleh *Japan Agriculture Cooperative* (JA Coop), sejenis dengan koperasi pertanian di Indonesia. JA Coop ini beranggotakan para petani-petani Jepang dengan tujuan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan petani. Sehingga pada saat ini, seluruh wilayah Jepang memiliki JA Coop yang secara umum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan serta menjual produk pertanian
2. Penyediaan sarana produksi
3. Mengatur pengolahan produk pertanian dan penyimpanan produk
4. Sebagai Bank
5. Sebagai badan asuransi, dan
6. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya petani

JA Coop dalam menjalani fungsinya, telah menjalin jaringan kerjasama yang sangat besar dengan pasar-pasar lokal khususnya supermarket, pasar Internasional, dan pemerintah. Selain itu, JA Coop juga memiliki berbagai

fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti *Packaging Center*, *Processing Center*, Pasar Saprodi, Pasar penjualan langsung (direct sale market), supermarket, Gudang, Penggilingan beras, fasilitas pembuat pupuk organik, dll.

Dengan adanya JA Coop, beberapa peran penting dan krusial bagi petani telah diatasi terutama untuk pemasaran. JA Coop memberikan jaminan semua produk petani terjual dengan harga diatas rata-rata dan tentu saja ini memakmurkan petani.

Terdapat alternatif distribusi dan pemasaran produk yang ditawarkan JA Coop untuk para produsen petani, yaitu:

- 1) Produk dibeli langsung oleh JA Coop dengan harga di atas harga pasar (khususnya produk tertentu yang dianggap vital);
- 2) Petani dapat mendistribusikan sendiri namun melalui petunjuk (advise) dari JA Coop (biasanya petani ingin mencari buyer yang lebih tinggi lagi dari JA Coop.);
- 3) Petani dapat menitipkan produk mereka kepada JA Coop. untuk dijual oleh JA Coop. (biasanya perlu waktu agak lama dan hanya untuk produk-produk yang tidak terlalu penting).

Dalam menjalani tugasnya, JA Coope mempunyai peran dalam memberikan pelayanan penting pada para petani diantaranya adalah dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian (termasuk peralatan mesin pertanian), memberikan asuransi produk pertanian, dan pelayanan kesehatan bagi petani.

Dengan pelayanan yang diberikan oleh JA Coop atas penyediaan sarana produksi pertanian, para petani mendapat kepastian atas keperluan usaha tani mereka, karena mereka tidak perlu bersusah payah mencari distributor atau tengkulak. Sementara itu terdapat asuransi produk yang sangat membantu petani dalam menjaga keselamatan produk mereka. Sedangkan fungsi pelayanan kesehatan petani merupakan suatu ide cemerlang yang menunjukkan betapa pemerintah Jepang dan JA Coop sangat menghargai dan menjamin kehidupan para petani mereka.

Pemerintah Jepang memberikan subsidi harga jual untuk produk tertentu petani lokal. Contohnya, pada saat produk petani di beli oleh JA Coop makapemerintah telah mensubsidi ± 50 persen lebih tinggi dari harga pasar. JA Coop menjualnya kembali sama dengan harga pasar. Ini dilakukan ketika harga untuk produk yang sama dari luar harganya lebih murah.

Dengan demikian petani Jepang tetap terlindungi dan produk mereka tetap terbeli oleh masyarakat.

Pemerintah Jepang mengharuskan adanya prioritas pada produk lokal. Selain memberikan subsidi pada produk tertentu yang dianggap vital (seperti gandum, sugar bit, jagung, kentang, dll) pemerintah Jepang dan JA Coop juga mengeluarkan kebijakan agar pasar lokal memprioritaskan produk lokal. Supermarket-supermarket dipastikan untuk menyediakan outlet khusus bagi para petani agar dapat melakukan direct sale produk mereka (namun tentu saja kualitas sudah bukan menjadi halangan). Setiap outlet yang tersedia untuk produk petani lokal harus dilengkapi dengan photo dan data produsernya (Petani). Tujuannya adalah agar konsumen bisa lebih mengenal siapa yang menghasilkan produk tersebut.

Tabel 10. Bantuan Pemerintah Negara Jepang Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate/ PSE* (Persen)

Tahun	Proportion of support Support based on commodity output	Payments based on input use	Percentage PSE
2000	93.62	3.6	59.74
2001	93.22	3.37	56.32
2002	93.29	3.04	57.19
2003	93.51	2.78	57.42
2004	93.86	2.87	55.92
2005	93.05	2.86	53.8
2006	92.94	2.8	51.51
2007	88.96	4.17	46.56
2008	88.85	3.53	48.29
2009	87.46	3.49	48.74
2010	83.56	3.49	54.77
2011	80.95	2.62	51.35
2012	85.71	2.75	55.08
2013	84.23	3.14	52.56
2014	84.18	2.99	49.2

Beberapa pasar memang dirancang khusus untuk para petani agar dapat menjual langsung produk mereka. Sebut saja Niseko Town Direct Sale Station yaitu sebuah pasar langsung di Kota Niseko (Hokkaido) yang khusus menyediakan outlet penjualan langsung untuk 60 petani. Tidak hanya itu para petani juga langsung memajemen semua aktivitas mulai dari penentuan harga (Bar Code), *Labeling*, dan *Packaging*. Para petani

Tabel 11. Bantuan Pemerintah Jepang Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate*

Komoditas	Satuan	Growth 2000-2013	2014
Percentage PSE (%)		-12.02	49.20
WHEAT	Juta US\$	-52.86	367.03
	Persen	-42.06	49.05
BARLEY	Juta US\$	-16.16	138.81
	Persen	-18.20	64.40
RICE	Juta US\$	-12.66	11,800.09
	Persen	-14.71	70.06
SOYBEANS	Juta US\$	66.08	225.57
	Persen	74.40	48.17
REFINED SUGAR	Juta US\$	-14.28	397.82
	Persen	-3.86	55.92
MILK	Juta US\$	-28.55	4,032.05
	Persen	-35.86	59.53
BEEF AND VEAL	Juta US\$	26.26	2,082.17
	Persen	0.33	39.03
PIGMEAT	Juta US\$	81.09	2,548.89
	Persen	29.32	50.04
POULTRY MEAT	Juta US\$	58.33	311.01
	Persen	-1.93	10.29
EGGS	Juta US\$	27.22	660.07
	Persen	3.76	15.35
APPLES	Juta US\$	-35.13	270.48
	Persen	-45.22	21.15
CHINESE CABBAGE	Juta US\$	59.09	707.24
	Persen	11.08	72.90
CUCUMBER	Juta US\$	-87.22	42.71
	Persen	-87.33	3.17
GRAPES	Juta US\$	2.70	630.68
	Persen	-2.01	62.90
MANDARIN	Juta US\$	22.65	672.91
	Persen	28.86	46.16
PEARS	Juta US\$	-56.02	374.88
	Persen	-42.85	49.04
SPINACH	Juta US\$	-94.81	29.75
	Persen	-95.21	3.17
STRAWBERRIES	Juta US\$	-46.09	300.58
	Persen	-43.02	20.05
WELSH ONION	Juta US\$	30.71	926.27
	Persen	2.16	70.85

akan mendapatkan informasi langsung melalui SMS atau internet tentang produk apa saja yang sudah laku atau produk mana yang permintaannya tinggi. Informasi tersebut bisa ditanya kapan saja, tergantung kebutuhan.

Komoditas pertanian dalam negeri yang paling diproteksi adalah beras, daging dan susu, selebihnya Jepang menggantungkan produk pertanian dari impor. Jepang memiliki empat musim yang tidak memungkinkan dilakukan pola budidaya untuk segala jenis tanaman dan peternakan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hasil pertanian lainnya seperti gandum, buah-buahan, dan komoditas perkebunan diperoleh dari impor.

Salah satu bukti perhatian pemerintah tentang masalah subsidi adalah dengan memberikan subsidi sebesar 70 persen kepada para petani padi. Tujuan dari pemberian subsidi yang besar kepada para petani adalah salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Beras bagi masyarakat Jepang adalah kebutuhan yang sangat mendasar, oleh karena itu pemerintah sungguh-sungguh memberikan perhatian pada sektor pertanian, agar kebutuhan pangan bangsanya dapat terus terpenuhi, Jepang juga telah menerapkan kebijakan kebijakan yaitu pemberian subsidi pendapatan bagi rumah tangga petani. Subsidi disesuaikan dengan upah minimum setelah dipotong biaya tanam dan upah penggarapan. Pemerintah juga mempersiapkan dukungan biaya saat harga beras jatuh.

Jika dilihat dari bantuan melalui indikator *Producer Support Estimate/ PSE*, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Jepang cukup besar memberikan bantuan kepada petaninya. Dimana pada tahun 2014, bantuan yang diberikan sebesar 49.2 persen dari total penerimaan kotor petani. Bantuan ini diberikan sebagian besar untuk output komoditas. Jepang memberikan bantuan untuk komoditas pertanian utama yang nilainya semakin menurun selama periode 2000-2013. Kecuali untuk komoditas seperti kedelai, daging sapi, daging babi, telur, kubis, anggur, jeruk mandarin, dan bawang.

2.1.6. India

Kebijakan kontraksi fiskal untuk mencapai target defisit 3 persen dari GDP. Sementara itu, subsidi untuk kredit, pupuk, irigasi, listrik, dan kredit pertanian ditambah dengan investigasi irigasi, dan distribusi makanan. Pemerintah India juga menaikkan upah minimum diatas Upah Minimum UU, rata-rata harian upah tenaga kerja bidang pertanian untuk membajak dan panen meningkat dari 8.7 persen menjadi 9.2 persen.

2.2. Kebijakan Moneter Negara Maju

2.2.1. Jepang

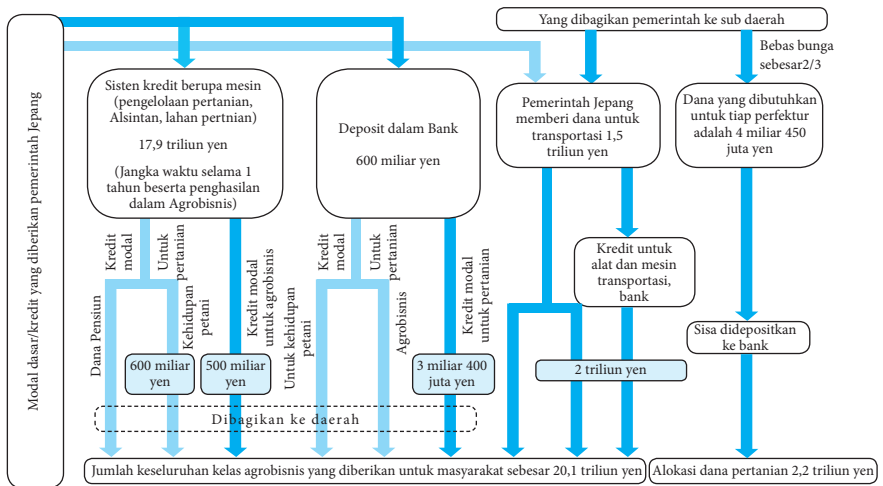
Sistem distribusi produk yang paling populer di Jepang adalah produk dibeli langsung oleh JA Coop. Produk petani yang sudah dibeli oleh JA Coop. juga aman dari segi financial, karena uang hasil penjualan langsung masuk ke rekening petani yang otomatis ada di JA Coop karena JA Coop juga berfungsi sebagai Bank.

Fungsi Bank yang dikelola oleh JA Coop kurang lebih sama dengan Bank komersial lainnya. Hanya saja nasabahnya adalah para petani. Bank JA Coop juga menyediakan pelayanan pinjaman modal untuk pengembangan usaha pertanian dan setiap surplus dari hasil penjualan produk pertanian diarahkan pada investasi dan perluasan usaha pertanian. Dengan demikian fungsi JA Coop. sebagai Bank sangat besar kontribusinya bagi kemajuan pertanian di Jepang.

Lembaga keuangan Jepang (*Japan Financial Cooperation / JFC*) memberikan anggaran kredit kepada rakyat yang kekurangan modal. Skema kredit yang diberikan meliputi:

- Kredit Super L: jumlah pinjaman sangat besar, diberikan kepada petani-petani besar
- Agrobisnis perikanan safety nett, kredit/modal agrobisnis.
- Peningkatan dana pertanian

JA Coop menandatangani dananya ke bank untuk mengatasi kekurangan modal. Kredit diberikan untuk kegiatan modernisasi pertanian. JA Coop juga menandatangani dananya ke bank untuk mengatasi kekurangan modal. Kredit diberikan kepada petani kelas RON dan kredit PUROPA. Pihak swasta dapat menawarkan pinjaman/ kredit pertanian kepada petani berdasarkan kepercayaan (tanpa agunan). Misalnya, Honda Foundation akan menjamin kredit yang dipinjam petani terlepas apakah petani tersebut dapat mengembalikan atau tidak. Secara lebih terperinci, skema kredit yang diterapkan oleh pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Skema Kredit yang Diterapkan Oleh Pemerintah Jepang

2.2.2. Thailand

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Thailand mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaannya. Anggaran defisit pemerintah Thailand pada Tahun 2001 0.8 persen dan menjadi 3.4 persen (Tahun 2002). Kebijakan ekspansi sektor fiskal itu memungkinkan permintaan domestik pada perekonomian Thailand meningkat, karena porsi belanja modal lebih tinggi daripada belanja untuk keperluan lain, dan belanja modal itu lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan prasarana yang menyerap lapangan kerja banyak sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk petani yang produknya mengalami peningkatan permintaan.

Seperti halnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia. Harga BBM meningkatkan inflasi dan suku bunga. Peningkatan harga BBM dapat memicu terjadinya inflasi dan suku bunga, sehingga kebijakan kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatur masalah ini.

Bank of Thailand (BoT) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan moneter di Thailand. Dalam mengatasi pengaruh kebijakan internasional seperti perubahan suku bunga oleh The Fed maka BoT mengharuskan perbankan memberlakukan ketentuan 30

persen dari deposito mata uang luar negeri akan bebas bunga selama satu tahun. Kebijakan ini untuk mencegah investor berspekulasi terhadap baht, para investor yang ingin menarik investasi dalam waktu kurang dari satu tahun diharuskan membayar penalti sebesar 33 persen dari jumlah yang diinvestasikan. Peraturan yang berlaku juga mengharuskan investasi dilindungi dari perubahan mata uang selama 12 bulan dan aliran jangka pendek harus di-*hedge* sepanjang umur investasi tersebut. Kebijakan pemerintah lain adalah investor asing harus mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi maksimal 50 persen (sebelumnya tidak dibatasi) di perusahaan domestik dalam tempo paling lambat dua tahun. Saat ini terdapat 14,000 perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Thailand.

Tabel 12. Tingkat Suku Bunga di Thailand (Persen)

Tahun	Prime rate : Min	Prime rate : Max	Fixed deposits (1 yr.) : Min	Fixed deposits (1 yr.) : Max
2000	7.50	8.25	3.50	3.50
2001	7.00	7.50	2.75	3.00
2002	6.50	7.00	2.00	2.00
2003	5.50	5.75	1.00	1.00
2004	5.50	5.75	1.00	1.00
2005	6.50	6.75	2.50	3.50
2006	7.50	8.00	4.00	5.00
2007	6.85	7.13	2.25	2.38
2008	6.75	7.00	1.75	2.00
2009	5.85	6.25	0.65	1.00
2010	6.12	6.50	1.40	1.70
2011	7.25	7.63	2.70	3.00
2012	7.00	7.38	2.35	2.50
2013	6.75	7.25	2.15	2.35
2014	6.75	7.13	1.70	1.75
2015 p	6.50	6.85	1.50	1.50

Sumber: Bank of Thailand, 2015

Kebijakan ini berdampak negatif terhadap pasar modal, para investor menarik modalnya sehingga Baht melemah. Sehingga pemerintah Thailand membuat kebijakan pengecualian untuk transaksi saham tidak berlaku kebijakan pengendalian modal tersebut.

Faktor penting yang mempengaruhi investasi adalah suku bunga, selama periode 2000-2015, tingkat suku bunga di Thailand relatif

berfluktuasi terutama pada tahun 2009 yang menurun sebesar 13 persen dari periode sebelumnya. Tingkat suku bunga utama (prime rate) yang terendah selama periode tersebut adalah 5.50 persen dan tertinggi 8.25 persen. Sedangkan untuk suku bunga deposito secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan suku bunga *prime rate*. Suku bunga deposito terendah pada level 0.65 persen dan tertinggi 5 persen. Tingkat suku bunga di Thailand cenderung terus mengalami penurunan dan mencapai 6.85 persen (prime rate) dan 1.50 persen (fixed deposit 1 year) pada tahun 2015.

Tabel 13. Bantuan Pemerintah Negara Cina Terhadap Petani yang Dihitung dalam Bentuk Producer Support Estimate/ PSE (Persen)

Tahun	<i>Proportion of support Support based on commodity output</i>	<i>Payments based on input use</i>	<i>Percentage PSE</i>
2000	10.57	77.09	2.68
2001	40.24	49.06	4.24
2002	65.97	25.48	7.89
2003	68.36	20.71	9.49
2004	44.48	35.6	6.64
2005	41.25	40.5	7.75
2006	56.12	27.96	12.46
2007	44.04	34.07	10.06
2008	-69.66	60.25	2.68
2009	55.52	18.72	11.64
2010	73.98	9.51	15.27
2011	61.71	13.73	10.31
2012	76.53	9.04	17.84
2013	79.07	7.95	19.49
2014	81.63	7.11	20.21

2.2.3. Cina

Cina harus menerapkan kebijakan fiskal secara ekspansif untuk mencegah terjadinya penurunan tajam dalam perekonomian. Perekonomian Cina menghadapi tekanan dari pemulihan global yang lemah dan kendala dalam negeri, termasuk kebutuhan untuk memangkas tingkat utang secara bertahap. Pemerintah telah menaikkan defisit anggaran menjadi 1.62 triliun yuan (\$ 258.61 triliun) atau sekitar 2.3 persen dari GDP naik dibandingkan dengan 2.1 persen pada tahun lalu dan terluas sejak 2009, ketika Beijing melepaskan Royal stimulus dalam menanggapi krisis

keuangan global. Defisit anggaran yang terjadi sekitar 2.7 persen dari GDP, setelah memasukkan reformasi perhitungan anggaran pemerintah yang sedang dilaksanakan tahun ini. Reformasi fiskal dilakukan dalam upaya untuk mengatasi akar penyebab tumpukan utang pemerintah daerah yang telah mencapai lebih dari \$ 3 triliun pada tahun 2009.

Dukungan pemerintah Cina terhadap pertanian terlihat dari Producer Support Estimate/PSE yang mencapai 20.21 persen dari total penerimaan kotor petani pada tahun 2014. Bantuan dalam bentuk PSE ini semakin meningkat selama periode 2000-2014 yang sebagian besar diberikan dalam bentuk output komoditas. Bantuan untuk setiap komoditas juga semakin meningkat kecuali untuk komoditas gandum, beras, dan gula.

Tabel 14. Bantuan Pemerintah Cina Terhadap Petani yang Dihitung Dalam Bentuk *Producer Support Estimate*

Komoditas	Satuan	Growth 2000-2013	2014
Percentage PSE (%)		627.24	20.21
WHEAT	Juta US\$	-794.32	17,248.27
	Persen	-289.15	33.97
MAIZE	Juta US\$	751.92	20,569.82
	Persen	13.68	26.69
RICE	Juta US\$	-2754.62	30,134.48
	Persen	-788.82	32.23
SOYBEANS	Juta US\$	1152.65	2,268.35
	Persen	370.23	26.39
RAPESEED	Juta US\$	16047.79	4,677.48
	Persen	3060.76	37.80
REFINED SUGAR	Juta US\$	439.51	3,761.57
	Persen	-10.94	46.61
MILK	Juta US\$	651.99	10,826.08
	Persen	-30.82	40.56
BEEF AND VEAL	Juta US\$	-4902.54	7,213.18
	Persen	-669.20	12.64
PIGMEAT	Juta US\$	-2710.53	15,214.91
	Persen	-669.89	9.00
POULTRY MEAT	Juta US\$	-903.22	311.91
	Persen	-270.21	0.49
SHEEP MEAT	Juta US\$	928.43	4,839.08
	Persen	11.45	13.79
EGGS	Juta US\$	4557.04	(3,687.19)
	Persen	1334.48	(9.53)
COTTON	Juta US\$	-8271.39	6,476.98
	Persen	-2459.90	38.03

Demi menstimulus perekonomian, otoritas moneter Cina kembali melonggarkan kebijakannya melalui pemangkasan suku bunga dan penurunan jumlah cadangan wajib perbankan. Pemangkasan suku bunga acuan Cina itu terhitung sebagai penurunan keempat sejak November tahun 2014. Melalui situs resminya, Bank Rakyat China (PBOC) mengumumkan pemangkasan suku bunga pinjaman dan deposito masing-masing sebesar 25 basis poin menjadi 4.85 persen dan 2 persen.

Pada saat yang bersamaan, PBOC juga mengendurkan rasio kewajiban penyimpanan cadangan devisa (RRR) sebesar 50 basis poin. Pelonggaran ini berlaku untuk perbankan yang melayani kredit sektor perkebunan dan usaha kecil menengah. Pemangkasan suku bunga dan RRR akan membantu stabilisasi pertumbuhan, menyesuaikan struktur dan menurunkan ongkos pembiayaan sosial.

PBOC menegaskan akan menjaga implementasi kebijakan moneter yang berhati-hati, menggunakan berbagai kebijakan untuk memperkuat dan meningkatkan manajemen makroprudensial, serta melakukan optimalisasi kombinasi kebijakan demi kemajuan perekonomian. PBOC juga pernah memangkas suku bunga pada 10 Mei 2015 lalu. Suku bunga pinjaman diturunkan 25 basis poin menjadi 5.1 persen, begitu pula dengan suku bunga deposito yang dilonggarkan dengan dosis sama menjadi 2.25 persen.

Sebulan sebelumnya, tepatnya 19 April 2015, PBOC juga menurunkan rasio kewajiban cadangan untuk semua bank komersial sebesar 100 basis poin. Pemangkasan ini mengikuti penurunan RRR pada Februari 2015 sebesar 50 bps. Pengenduran RRR akan menghasilkan tambahan likuiditas melalui suplai uang ke pasar. Namun, pemangkasan RRR pada sektor tertentu seperti yang dilakukan kali ini, takkan menghasilkan efek serupa.

PBOC beberapa kali menerapkan pemangkasan khusus demi memacu kredit pada sektor-sektor tertentu, tetapi langkah tersebut tak berdampak signifikan pada tataran makro. Pasalnya kendati diberikan insentif pelonggaran, perbankan tetap saja enggan memberi kredit pada sektor itu karena faktor jaminan dan risiko. Terlepas dari upaya tersebut, ongkos pinjaman riil di Cina sebenarnya masih tinggi. Hal itu dipicu oleh melemahnya inflasi dan sikap bank yang enggan menurunkan suku bunganya.

Sementara itu, pertumbuhan Cina diproyeksi terkontraksi ke level 7% (terendah dalam seperempat abad) tahun ini, melemah dari pertumbuhan 2014 yakni 7.4 persen. Perlambatan itu dipicu lesunya pasar properti,

kapasitas pabrik berlebihan, dan utang pemerintah lokal. Stimulus tambahan sekalipun diyakini takkan mampu menggenjot pertumbuhan Cina. Kendati demikian, otoritas moneter setempat diyakini akan memangkas kembali suku bunga untuk menciptakan mesin pertumbuhan. Adapun, dalam dua pekan terakhir pasar saham Cina terdepresiasi 20 persen.

2.2.4. Vietnam

Pemerintah kota dan daerah pedesaan di Vietnam setiap tahunnya mengeluarkan sedikitnya 2 persen dari anggaran daerah untuk mendukung investasi dan pengembangan pedesaan. Kebijakan ini diatur dalam perencanaan pemerintah melalui kementerian sesuai dengan peraturan pemerintah No. 210/2013/ND-CP. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan investasi di bidang pertanian dan wilayah pedesaan.

Pada tahun 2000, pemerintah negara Vietnam hanya memberikan anggaran 5-6 persen dari total pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian. Anggaran ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan anggaran pertanian negara Thailand, India, dan Cina. Intervensi pemerintah Vietnam dalam bidang fiskal terhadap pertanian yaitu dengan memberikan subsidi bagi petani berdasarkan komoditas. Pemerintah menyediakan fasilitas dan sarana input pertanian seperti pupuk, pengairan (irigasi) dan jaminan stabilitas harga seperti harga beras dan kopi.

Kebijakan Moneter

State Bank of Vietnam (SBV) merupakan lembaga perbankan utama yang bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan mengimplementasikan kebijakan moneter. Tujuan utama SBV adalah untuk merangsang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Pemerintah negara Vietnam mengeluarkan Keputusan No. 256/QD-TTg tentang tambahan modal atau pendanaan untuk implementasi kebijakan proteksi dan pengembangan kawasan padi di tahun 2012 dan 2013.

2.2.5. India

Pemerintah India melakukan kebijakan untuk pengetatan fiskal seiring dengan melambatnya inflasi. Namun, mereka mengatakan, akan

membutuhkan satu tahun lagi untuk mencapai target defisit fiskal sebesar 3 persen dari GDP. Pemerintah India meningkatkan penyaluran kredit pertanian dan asuransi. Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) melakukan kebijakan untuk menurunkan suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghindari risiko inflasi. Selama tahun 2015, RBI menurunkan tingkat suku bunga hingga 25 basis poin menjadi 7.25 persen. Penurunan suku bunga ini juga diperlukan untuk mendorong investasi. Perbankan di India juga diminta untuk menurunkan biaya pinjaman pada para konsumen.

Para pelaku bisnis di India telah berkali-kali menyerukan agar dilakukan pengurangan dan penurunan tingkat suku bunga untuk memacu pertumbuhan perekonomian India, yang diharapkan tumbuh sekitar 6.9 persen. Namun, ternyata inflasi India meningkat secara tidak terduga mencapai hampir 7 persen, jauh di atas titik aman bank yaitu 5 persen. Karena itu, Bank Sentral India terpaksa mengurangi jumlah uang tunai di bank komersial menjaga tersedianya cadangan uang untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong aliran pinjaman ke bank agar tetap lancar. Subsidi bunga sampai 4 persen untuk pinjaman pertanian dan ada sistem resi gudang

2.3. Kebijakan Fiskal Negara Berkembang

2.3.1. Mesir

Kebijakan pemerintah Mesir untuk meningkatkan penerimaan melalui pajak belum terlalu berhasil. Pada tahun 2005, penerimaan pajak sebesar 14 persen dari total GDP dan pada tahun 2012 menurun menjadi 13 persen dari total GDP. Nilai ini semakin kecil akibat instabilitas politik dan keamanan di Mesir, sehingga penegakkan aturan pemerintah dalam hal penarikan pajak menjadi terganggu.

Sejak tahun 2000, laju reformasi struktural dapat dilihat dari kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Selain itu, Mesir juga melakukan privatisasi dan peraturan perundang-undangan baru yang mendorong perekonomian Mesir menuju ekonomi yang berorientasi pasar dan mendorong peningkatan investasi.

Penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yakni sekitar 10.7 juta (17 persen dari jumlah populasi) masih menjadi prioritas utamanya. Program kegiatan yang dilakukan antara lain adalah: peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan melalui perbaikan teknik

budidaya pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Secara lebih spesifik, beberapa teknik pertanian yang sudah diintroduksi kepada petani adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi, penerapan manajemen tanah dan air secara lebih baik, praktek-praktek pertanian organik, agroekosistem, kesehatan lingkungan dan upaya-upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati sekaligus memfasilitasi dalam membuka saluran pemasaran yang dapat diakses oleh petani kecil sehingga memiliki peluang yang sama dalam mengakses pasar domestik maupun global.

Permasalahan utama yang masih dihadapi masyarakat petani di Mesir adalah terbatasnya lahan yang subur (3.3 juta Ha) dan ketersediaan air. Kegiatan pertanian menggunakan hampir 80 persen air yang sebagian besar tersedia pada Sungai Nil. Kebanyakan daerah, hanya memperoleh sedikit atau curah hujan yang kurang efektif. Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pertanian dan program-program penelitian yang mengarah pada peningkatan produksi melalui intensifikasi, efisiensi sarana produksi pertanian, menekan pengaruh negatif lingkungan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan manusia. Kebijakan ini diperkuat pula dengan membangun irigasi (termasuk membuat water tank, cystem), infrastruktur di perdesaan juga pemberian kredit pertanian dengan bunga rendah (6-8% per tahun). Sedangkan reformasi pertanian yang sudah dilakukan Pemerintah Mesir antara lain adalah mengurangi kontrol pada harga input dan output pertanian, mengurangi struktur kuota hasil dan sistem distribusi pertanian, mengurangi campur tangan pemerintah dalam penentuan pola tanam, privatisasi baik perdagangan pertanian baik domestik dan ekspor, utamanya untuk beras, kapas, dan gula tebu.

2.3.2. Kenya

Kebijakan pemerintah negara Kenya ketika terjadi kelimpahan ekspor adalah dengan men ekspor komoditas tersebut, sehingga bahan pangan harus diimpor dengan harga mahal dari luar negeri. Selain itu, hasil panen jagung busuk karena penyimpanan yang salah. Di Kenya naiknya harga disebabkan perencanaan yang buruk oleh pemerintah. Di samping itu, petani tidak mendapat dukungan cukup. Petani kecil, yang jumlahnya kira-kira 65 persen dari seluruh penduduk yang bertani, diabaikan sepenuhnya, baik secara politis maupun dari sudut penanaman modal.

2.3.3. Nigeria

Penerapan kebijakan pajak di Nigeria dari tahun 2005-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pajak sebesar 30.5 persen dan naik menjadi 32 persen pada tahun 2013. Penerapan pajak di Nigeria lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura dan Turki. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara ini. Akan tetapi, kebijakan ini berdampak pada penurunan tingkat konsumsi dan mengubah pola masyarakat yang cenderung untuk menabung.

Anggaran pemerintah juga meningkat selama periode 2005-2013 yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum khususnya pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pemerintah Nigeria. Sehingga sektor ini yang menjadi fokus pemerintah Nigeria. Kondisi ini berdampak pada menurunnya anggaran untuk sektor pertanian pada tahun 2010-2013. Hanya pada periode sebelumnya yaitu 2005-2009, anggaran pertanian dari pemerintah Nigeria yang cenderung meningkat.

2.3.4. Ethiopia

Kebijakan fiskal Ethiopia bertujuan untuk mempertahankan sikap fiskal yang saat mengejar kuat investasi di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar. Pada tahun 2013-2014, defisit fiskal (termasuk hibah) mencapai 2.6 persen dari GDP, dan diproyeksikan untuk tetap pada tingkat ini selama dua tahun ke depan meskipun belanja sektor publik berat. Peningkatan pengeluaran sebagian besar telah diimbangi oleh keuntungan yang signifikan dalam mobilisasi sumber daya melalui reformasi pajak kuat, dikombinasikan dengan efisiensi administrasi pajak pengumpulan dan penegakan yang lebih baik. Belanja publik didominasi oleh belanja pro-miskin (yang menyumbang 70% dari pengeluaran publik di 2013-2014).

Pemerintah Ethiopia menyediakan adanya *General Budget Support* (GBS) yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan. Selain itu, untuk mendukung pertanian maka terdapat *The Protection of Basic Services Program* (PBS) yang bertujuan memberikan subsidi untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan air bersih terutama untuk masyarakat pedesaan.

2.3.5. Kamboja

Tujuan dari kebijakan fiskal oleh pemerintah Kamboja adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal yang berkelanjutan dengan peningkatan bertahap dalam alokasi anggaran untuk sektor sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membatasi dan rasionalisasi belanja publik, memperluas basis pajak, mencegah kebocoran dan dengan memperkuat bea cukai dan administrasi pajak untuk mengumpulkan pendapatan tambahan. Kebijakan fiskal yang bijaksana memungkinkan pemerintah Kamboja untuk menjaga stabilitas harga (inflasi).

Kebijakan fiskal Kamboja yang dirancang untuk memastikan tingkat belanja yang konsisten dengan stabilitas makroekonomi. Program pengeluaran sedang direstrukturisasi sebagai bagian dari paket reformasi sistematis yang bertujuan untuk mempromosikan tabungan domestik, investasi produktif, dan alokasi sumberdaya yang efisien. Kinerja fiskal pada tahun 2004 dan 2005 telah membaik dengan meningkatkan pengumpulan pendapatan domestik dan pembatasan belanja publik. Menurut Phalla (2013), kebijakan fiskal yang harus diterapkan antara lain:

- 1) Membuat pembiayaan dan pembangunan sektor pertanian hingga 18 juta US\$
- 2) Membebaskan tarif impor untuk produk input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan alat pertanian
- 3) Membebaskan pajak untuk proyek pembangunan pertanian selama 3 tahun
- 4) Menyediakan insentif untuk investasi dalam pembuatan pemrosesan, penggilingan padi untuk diekspor dan investasi irigasi
- 5) Mempromosikan ekspor beras
- 6) Mempromosikan organisasi petani dengan membuat koperasi.

2.3.6. Nepal

Petani di Nepal memerlukan benih dan pupuk untuk segera menanam di musim panas dan mulai memperbaiki irigasi sebelum musim dingin tiba. Sangat sedikit tanah Nepal yang cocok untuk pertanian. Beras, jagung, dan gandum adalah tanaman pangan utama. Beras juga diekspor. Tanaman komersial utama adalah rami (digunakan untuk membuat karung goni dan benang), tebu, dan tembakau.

2.3.7. Papua New Guinea

Pemerintah Papua New Guinea menerapkan *Medium Term Development Plan* (MDTP) untuk mendorong penerapan *Medium Term Fiscal Strategy* (MTFS) dan *Medium Term Debt Strategy* (MTDS). Pemerintah membantu mempromosikan sektor investasi di sektor non tambang yang mampu meningkatkan GDP PNG sejak tahun 2005. Selain itu, tujuan dari kebijakan fiskal PNG adalah menurunkan pinjaman luar negeri yang dilakukan.

2.3.8. Laos

Laos masih memiliki hambatan besar dalam pembangunan karena infrastruktur yang belum memadai. Padahal, infrastruktur adalah hal yang vital untuk mendukung arus barang, ekspor, hingga pemerataan pembangunan. Tidak ada railways di Laos, kecuali yang melalui Friendship Bridge yang menghubungkan Laos dan Thailand. Bandara internasional di Vientiane dan Luang Prabang, hanya sedikit yang memiliki penerbangan internasional. Tercatat baru lima airlines internasional yang melayani penerbangan hingga ke Laos. Maskapai nasional Laos, Lao Airlines, baru memiliki penerbangan internasional ke Thailand, China, Vietnam, Cambodia, Singapore, dan Seoul. Itu pun hanya ke satu atau dua kota besar di masing-masing negara.

Laos tidak punya pantai, tetapi berbatasan langsung dengan Myanmar, Thailand, China, Vietnam, dan Cambodia. Perbatasan langsung via darat ini merupakan potensi untuk arus ekspor bila didukung infrastruktur yang baik. dari data, sepertinya perdagangan Laos masih didominasi Thailand, Vietnam dan China. Jika serius mendukung pembangunan infrastruktur, misalnya dengan membuat jalur kereta api atau jalan tol yang bagus, maka perdagangan yang sudah ada bisa dioptimalkan. Selain itu, Laos bisa membuka lebih banyak rute perdagangan dengan Cambodia dan Myanmar. Jumlah penduduk Myanmar yang 55 juta dan Cambodia yang 14 juta, tentunya adalah pasar yang menarik, sekaligus dekat dari sisi lokasi dengan Laos.

Untuk mendukung investasi, perbaikan infrastruktur adalah mutlak dan harus disegerakan. Apalagi Laos punya potensi hasil bumi dan dan tambang yang menjanjikan. Namun tanpa infrastruktur yang memadai, investor asing mungkin akan berpikir ulang karena biaya distribusi pasti meningkat tajam.

2.4. Kebijakan Moneter Negara Berkembang

2.4.1. Mesir

Bank Sentral Mesir (CBE) bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Untuk itu, CBE menurunkan suku bunga pinjaman menjadi 8.75 persen pada Maret 2015. Departemen Pertanian Mesir sudah banyak memfasilitasi petani yang sebagian pendanaannya didukung oleh negara-negara pendonor baik dibidang ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dengan cara meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pelaku pertanian.

2.4.2. Papua New Guinea

The Bank of PNG menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang untuk menjaga inflasi PNG tetap terjaga. Kebijakan moneter yang dilakukan yaitu untuk mendorong investasi pembangunan berbagai macam infrastruktur seperti infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan SDM. Melakukan perluasan pemberian kredit untuk sektor privat, terutama sektor produktif seperti konstruksi, pertanian, dan industri manufaktur.

Tugas bank sentral dari PNG adalah untuk mengendalikan suku bunga, inflasi, serta nilai tukar, dan menjaga kondisi kondusif untuk bisnis dan investasi. Selain itu, The Bank of PNG harus mengembangkan sektor keuangan terutama sektor *microfinance* dan meningkatkan efisiensi kinerja sektor perbankan.

2.4.3. Nigeria

Penerapan suku bunga di Nigeria pada periode 2007-2013 mengalami fluktuasi. Tingkat suku bungan yang relatif stabil pada tahun 2012-2013 diduga menyebabkan investasi tetap bahkan cenderung menurun. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan investasi di Nigeria perlu adanya penyesuaian terhadap suku bunga. Tujuan pemerintah Solomon Island adalah untuk membatasi utang ke tingkat yang dapat dikelola dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dalam proses anggaran pemerintah, dan berfokus mencapai tujuan pembangunan. Dengan melakukan ini, pemerintah membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan efek inflasi.

2.4.4. Solomon

Bank Sentral Kepulauan Solomon (CBSI) menyatakan bahwa *stance* kebijakan moneter tahun 2015, tetap akomodatif tetapi dengan bias tertentu terhadap menyikapi kelebihan likuiditas di sistem perbankan. Tekanan inflasi akibat dari banjir bandang mencapai 4.8 persen tahun 2014. Data terbaru menunjukkan inflasi *headline* di Februari 2015 turun lebih lanjut untuk 1.6 persen di belakang bahan bakar rendah dan harga pangan.

2.4.5. Kamboja

CDC (2005) menyebutkan bahwa Bank Nasional Kamboja (National Bank of Cambodia/NBC) terus mengadopsi kebijakan moneter ketat dan mengatur *floating exchange rate*. Inflasi dan kinerja nilai tukar secara umum mendorong kebijakan yang sejauh ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memungkinkan sektor swasta dalam melakukan bisnis dan investasi.

Bahkan, perekonomian Kamboja menikmati tingkat harga yang rendah dan stabil selama lima tahun sejak tahun 1999 dimana inflasi hanya sebesar 1 persen. Pada tahun 2004, ketika terjadi perubahan harga minyak dunia membuat inflasi di Kamboja meningkat tajam. NBC melakukan kebijakan mengontrol ekspansi moneter untuk mengurangi tekanan inflasi.

2.4.6. Ethiopia

Kebijakan moneter dalam 2013-2014 sebagian besar telah diarahkan untuk menjaga inflasi satu digit dengan membatasi jumlah pertumbuhan uang dalam perekonomian. Otoritas fiskal juga membatasi ukuran bank muka langsung pemerintah bisa mencari dari bank sentral dalam upaya untuk menghilangkan dorongan moneter untuk inflasi.

Membatasi inflasi telah menjadi fokus utama Pemerintah untuk beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun baru-baru, uang primer baru-baru nominal menjadi jangkar untuk kebijakan moneter pemerintah. Sejumlah langkah menargetkan inflasi telah diadopsi termasuk: tertahan pencetakan uang, mengaktifkan pasar Treasury Bills, memperkenalkan mekanisme anggaran kas, sterilisasi cadangan devisa dan memperkenalkan subsidi pada makanan utama.

Secara umum, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara maju dan berkembang terkait pertanian adalah:

Tabel 15. Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara Maju dan Berkembang

Negara Maju	
Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses pembayaran pajak yang cepat, mudah dan modern ▪ Anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur, irigasi (termasuk membuat water tank, cystem, dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga yang rendah dan stabil untuk kredit dan pinjaman
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subsidi yang diberikan kepada petani dalam berbagai jenis: <ol style="list-style-type: none"> 1. subsidi harga jual untuk produk tertentu petani lokal. 2. subsidi terhadap produk tertentu yang dianggap vital (gandum, kentang, gula bit,dll) 3. kebijakan sehingga pasar dan supermarket harus menyediakan outlet khusus bagi para petani. 4. pemberian subsidi kepada petani yang disesuaikan dengan UMR setelah dipotong biaya tanam dan upah penggarapan. 5. mempersiapkan dukungan biaya saat harga beras jatuh. 6. Subsidi untuk kredit, pupuk, irigasi, listrik, dan kredit pertanian ditambah dengan investigasi irigasi, dan distribusi makanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selain meminjam kepada bank-bank, para petani juga dipermudah meminjam uang kepada para agribisnis ▪ Adanya sistem pembayaran <i>countercyclical</i> (pengganti pembayaran darurat) sehingga petani boleh mengajukan pinjaman tanpa perlu menunggu pelunasan pada pinjaman sebelumnya. Program ini memperbolehkan petani untuk memperbaharui lahan atau tanah dan produk-produk pertaniannya.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengeluarkan sedikitnya 2% dari anggaran daerah untuk mendukung investasi dan pengembangan pedesaan ▪ Menaikkan upah minimum diatas Upah Minimum UU, rata-rata harian upah tenaga kerja bidang pertanian untuk membajak dan panen meningkat dari 8.7 persen menjadi 9.2 persen. ▪ Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan teknik budidaya pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Contohnya, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi, penerapan manajemen tanah dan air secara lebih baik, praktek-praktek pertanian organik, agroekosistem, kesehatan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi yang juga berperan aktif sebagai bank yang juga menyediakan pelayanan pinjaman modal untuk pengembangan usaha pertanian ▪ Skema kredit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit Super L: jumlah pinjaman sangat besar, diberikan kepada petani-petani besar 2) Kredit/modal agrobisnis. 3) Peningkatan dana pertanian <p>Subsidi bunga sampai 4 persen untuk pinjaman pertanian dan ada sistem resi gudang</p>

Negara Maju	
Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi pembukaan saluran pemasaran yang dapat diakses oleh petani kecil sehingga memiliki peluang yang sama dalam mengakses pasar domestik maupun global. ▪ Membangun dan pemberian kredit pertanian dengan bunga rendah (6-8% per tahun) 	

Negara Berkembang	
Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk petani ▪ Komoditi pertanian yang dipanen lebih banyak diekspor dan bahan pangan diimpor dengan harga yang lebih mahal ▪ Rusaknya hasil panen karena penyimpanan yang salah ▪ Pajak semakin meningkat ▪ Tidak ada anggaran khusus untuk pertanian. Anggaran untuk sektor pertanian kecil karena kontribusinya terhadap GDP masih kecil ▪ Belanja publik didominasi oleh belanja pro-miskin (yang menyumbang 70% dari pengeluaran publik) ▪ Adanya program <i>General Budget Support</i> (GBS) yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan ▪ Adanya program <i>The Protection of Basic Services</i> (PBS) yang bertujuan memberikan subsidi untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan air bersih terutama untuk masyarakat pedesaan ▪ Menjaga keseimbangan fiskal yang berkelanjutan dengan peningkatan bertahap dalam alokasi anggaran untuk sektor sosial dan ekonomi dengan membatasi dan rasionalisasi belanja publik dengan memperluas basis pajak, mencegah kebocoran, memperkuat bea cukai dan administrasi pajak untuk mengumpulkan pendapatan ▪ Membebaskan pajak untuk proyek pembangunan pertanian selama 3 tahun ▪ Menyediakan insentif untuk investasi dalam pembuatan fasilitas pemrosesan, penggilingan padi untuk diekspor dan investigasi irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertujuan untuk mengontrol inflasi ▪ Pengembangan sektor keuangan terutama sektor microfinance dan meningkatkan efisiensi kinerja sektor perbankan. ▪ Akses pinjaman ke Bank Pembangunan pedesaan untuk penggilingan padi ▪ Pemerintah mempersiapkan dana khusus untuk menjamin kredit yang ditawarkan kepada industri beras oleh bank komersil, dan mengambil langkah-langkah lain untuk memfasilitasi akses penggilingan padi untuk kredit komersil ▪ Pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah akan menghabiskan 40 juta US\$ untuk mendukung pengolahan beras, fasilitas perdagangan dan penelitian.

Kebijakan Pertanian Terkait Ketahanan dan Kemandirian Pangan

3.1. Kebijakan Orientasi Input Negara Maju

3.1.1. Australia

Australia sebagai salah satu negara yang terkategori menjadi negara maju merupakan pelaku perdagangan yang signifikan di dunia untuk beberapa komoditi dan membuat sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting bagi perekonomian Australia. Lahan pertanian yang dimiliki Australia merupakan lahan besar. Australia merupakan salah satu negara OECD yang semakin menurun nilai bantuan sektor pertaniannya. Namun, hal tersebut tidak menurunkan kinerja pertanian Australia, dimana produktivitasnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2.8 persen dalam tiga dekade sebelumnya (Dolman et al, 2005).

Beberapa kebijakan dilakukan pemerintah Australia untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, diantaranya adalah :

- a. Penerapan regulasi yang lebih baik.

Sebanyak \$20.4 juta dikeluarkan untuk mengaktifkan persetujuan terhadap penggunaan bahan kimia untuk produk pertaniandan hewan, sehingga petani akan mendapatkan akses ke bahan kimia untuk usaha tani lebih cepat dibanding sebelumnya, sehingga mengurangi biaya dalam menjalankan usaha tani nya.

Selain itu, penerapan pengurangan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertanian, terutama dalam kegiatan pemasaran juga merupakan faktor pendorong peningkatan produktivitasnya. Hal ini dilakukan dengan mengurangi peraturan di semua level pemerintahan yang pada akhirnya akan menekan biaya dan mempermudah petani dan nelayan menjalankan bisnisnya.

- b. Sistem Pajak yang lebih baik bagi Usaha Tani
Pemberlakuan kebijakan ini membantu petani untuk kembali pada penerapan pajak pendapatan rata-rata. Petani yang telah memilih keluar dari pengenaan pajak pendapatan rata-rata sebelumnya akan diperbolehkan untuk memasuki kembali system ini setelah 10 tahun.
- c. Meningkatkan batas deposit Farm Management Deposits (FMDs)
Pemberlakuan kebijakan ini, petani akan mampu berinvestasi hingga mencapai \$800,000 dalam FMDs. Selain itu, dimungkinkan akun FMD dapat digunakan dalam mengkompensasi bantuan modal usaha petani. Penggunaan akun FMD ini akan menjadi pinjaman kompensasi yang meminimalisir biaya bunganya.
- d. Pengembangan prioritas orientasi petani yang lebih jelas untuk target pendanaan riset pedesaan.
Peningkatan prioritas riset dan pengembangan (R&D) berdampak langsung pada aliran dana ke daerah yang akan meningkatkan pertanian sebagai gerbang utamanya. Semua proyek-proyek penelitian harus mempertimbangkan bagaimana informasi disampaikan nantinya ke petani dan bagaimana menterjemahkan hal tersebut ke dalam praktek-praktek nyata, secara on-farm.
- e. Meningkatkan efisiensi R&D dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kebijakan ini akan membuat petani mendapatkan keuntungan dari fokus memperluas hasil pertaniannya, dimana biaya administrasi berkurang akan menyisakan lebih banyak uang untuk kegiatan R&D.
- f. Penyediaan dana sebanyak \$100 juta untuk perpanjangan R&D pedesaan untuk keuntungan program pada tahun 2021-2022.
Petani akan mendapatkan keuntungan dari informasi hasil penelitian laboratorium dan ke pertanian, yang merupakan kunci untuk pertumbuhan produktivitas. Proyek akan memiliki fokus terhadap penyebarluasan informasi ke para petani.

3.1.2. Belanda

Pembahasan selanjutnya terkait dengan Belanda yang menjadi negara utama pengekspor hasil pertanian tingkat tinggi, seperti sayuran, bunga, dan bibit tanaman. Hasil panen utamanya yang diekspor yaitu kentang, gula bit, sayuran, bahan makanan pokok biji-bijian, dan bunga tulip. Para petani di Belanda membuat lahan pertanian semenarik mungkin untuk menawarkan jasa lain di samping hasil panen, yaitu membuatnya sebagai tempat rekreasi, lahan konservasi alam, dan wisata pembelajaran alam. Sinergi antara pertanian *on-farm* dengan *eco-tourism*.

Kebijakan pertaniannya tidak hanya fokus pada pencapaian, melainkan juga berusaha mengatasi dampak-dampak negatif dari mobilitas pertanian yang tinggi. Pemerintah Belanda memberikan fokus tersendiri terhadap dampak pertanian bagi lingkungan hidup dengan sangat memperhatikan keseimbangan alam. Tingginya produktivitas hasil pertanian di Belanda berbanding lurus dengan tingginya penggunaan pupuk mineral, pupuk dari kotoran hewan, pestisida, dan energi. Sektor pertanian di Belanda dikembangkan atas regulasi sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk mengkampanyekan pertanian yang ramah lingkungan.

Kebijakan pertanian di Belanda memiliki tujuan pertanian berkelanjutan, yakni sebuah sistem pertanian yang dapat diterima lingkungan, ekologi, kultural, ekonomis, dan juga berstandar internasional seperti permintaan pasar global. Pemerintah Belanda telah memberlakukan aturan tegas kepada seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertanian untuk bertanggung jawab atas pengelolaan pertanian berkelanjutan dengan CSR yang intinya setiap perusahaan wajib memperhitungkan regulasi sosial dan lingkungan secara transparan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis untuk menjaga kelangsungan hidup alam semesta.

Selain itu sinerginya hubungan antara kebijakan pemerintah, pendidikan, dan penelitian membuat sektor pertanian menjadi maju di Belanda. Pemerintah Belanda memiliki 9 sektor utama yang dijadikan dasar penentuan riset dan inovasi, yakni: *water, agriculture and food, horticulture and source materials, high-tech, life sciences, chemistry, energy, logistics and the creative industry*.

Pemerintah sebagai penggerak utama kemajuan setiap sektor, sangat mendukung terciptanya pendidikan tingkat tinggi, hingga mampu memunculkan berbagai penemuan-penemuan ilmiah. Penemuan-penemuan ilmiah itu ditindaklanjuti dengan mentransfernya ke area

pertanian sesungguhnya dengan cara mengedukasi para petani mengenai teknologi pertanian terbaru. Di samping sebagai pendukung kemajuan pertanian, penemuan-penemuan ilmiah itu juga digunakan untuk mendukung pengembangan kebijakan pemerintah yang selaras dengan tujuan utama, yaitu pertanian berkelanjutan.

Belanda menjadi contoh negeri agraris yang produktif, inovatif, kreatif, berskala dunia namun tetap menomor satukan konsep ramah lingkungan, penggunaan teknologi berkelanjutan, efisiensi energi dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Pemerintah Belanda membentuk Menteri Ekonomi, Pertanian dan Inovasi yang bertugas untuk memadukan inovasi pertanian untuk mencapai ekonomi yang kuat dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pertanian di Belanda sangat terintegrasi dengan teknologi modern. Penggunaan rumah kaca, memanipulasi iklim dalam ruangan serta teknologi robotik dan komputerisasi. Intinya, kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah kebijakan dan teknologi berdasarkan riset yang dilakukan para ahli di pusat riset pertanian, yaitu salah satunya adalah Universitas Wageningen.

3.1.3. Amerika Serikat (AS)

Sebagai salah satu negara adidaya, tidak membuat Amerika Serikat melupakan sektor pertaniannya. Kemajuan pertanian Amerika Serikat (AS) terutama di bidang tanaman biji-bijian seperti jagung, kedelai, wheat, sorghum, dan padi, tidak terlepas dari kebijakan dan dukungan pemerintah yang konsisten terhadap petani. Kebijakan dan dukungan diberikan dan dinikmati langsung oleh petani dengan tujuan utama adalah untuk menjaga agar usaha pertanian tetap menarik, menguntungkan, dan petani terhindar dari risiko kerugian dalam kondisi apapun. Dengan kebijakan dan dukungan tersebut kegiatan pertanian di AS dapat terus berkembang dan bersaing di pasar internasional.

Dalam peningkatan produksi domestik, penekanan urgensi konservasi pada lahan produktif dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Secara bertahap akan dilakukan pengurangan Conservation Reserve Program (CRP) dari 32 juta acre menjadi 24 juta acre pada 2017. Kemudian dilakukan konsolidasi program konservasi yang lama ke dalam program baru atau menggabungkan ke dalam program yang ada, mengurangi jumlah program konservasi USDA dari 23 menjadi 13. Re-link subsidi premi asuransi

tanaman untuk Konservasi (konservasi pada tanah yang sangat mudah tererosi dan lahan basah) untuk pertama kalinya sejak tahun 1996.

Amerika Serikat juga tidak ketinggalan dibanding negara lainnya dalam hal penanaman komoditas organik. Program yang dijalankan terkait dengan pendanaan untuk membantu produsen organik dan penanganan untuk biaya sertifikasi organik. Kemudian, total dana penelitian pertanian organik juga ditingkatkan. Dalam rangka terus meningkatkan pengembangan komoditas organik, maka produsen organik bersertifikat dibebaskan dari kewajiban membayar program promosi.

3.1.4. New Zealand

Secara historis pertanian di New Zealand memiliki dukungan dari pemerintah yang relatif kecil. Relatif kecilnya bantuan yang diberikan oleh pertanian untuk sektor pertanian New Zealand dilakukan sampai pertengahan 1960-an. Kemudian, terjadi krisis neraca pembayaran, sehingga pemerintah mulai melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan berorientasi ekspor (Harris dan Rae, 2006). Hingga saat ini, hampir 62 persen produk primer berhasil diekspor New Zealand. Beberapa dukungan yang dilakukan diantaranya:

- a. Subsidi Kredit yang dimulai pada tahun 1930.
- b. Bantuan untuk pengembangan lahan yang dimulai pada pertengahan 1970-an
- c. Subsidi pupuk, pengendalian gulma dan irigasi yang diperkenalkan antara tahun 1965 dan 1975.
- d. Insentif bagi petani untuk berorientasi ekspor yang telah diperkenalkan pada tahun 1963.
- e. Pada tahun 1984, pemerintah New Zealand mendukung pemberian kredit pertanian dengan suku bunga yang relevan.

Pertanian di New Zealand dimiliki secara pribadi dan beroperasi seperti industri. Dimana keputusan memproduksi bagi petani dan keuntungan pasar sangat ditentukan oleh kondisi pasar serta preferensi petani, bukan berdasarkan intervensi pemerintah. Hal ini menyebabkan, produksi sektor pertanian New Zealand menjadi efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan. Walaupun pemerintah sangat membatasi subsidi keuangan untuk sektor pertanian, namun pemerintah masih memegang peranan penting dalam sektor ini. Namun, tugas pemerintah hanya untuk

menjaga dan membuat framework. Tugas pemerintah New Zealand hanya sebatas membuat regulasi untuk kebijakan yang umum, pengeluaran pemerintah tidak untuk subsidi tapi untuk penelitian dan mengontrol hama penyakit, serta pemberian subsidi hanya akan diberikan apabila sedang mengalami kondisi yang penting seperti dampak iklim yang tidak terduga.

3.1.5. Jepang

Sebagian besar wilayah Jepang merupakan pegunungan, sedangkan porsi lahan pertanian di Jepang hanya sebesar 25%. Namun dengan angka tersebut, pertanian Jepang memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Jepang. Namun, dengan pola pikir bangsa Jepang untuk selalu “berkreasi dan menciptakan” dalam segala bidang termasuk pertanian. Kontribusi sektor pertanian yang tidak mencapai 1.5 persen, bukan menjadi alasan bagi pemerintah Jepang untuk tidak memperhatikan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Jepang merupakan salah satu negara terpadat di dunia dan masyarakatnya perlu untuk dijamin ketersediaan pangannya.

Pemerintah Jepang kemudian memutuskan untuk merumuskan Kebijakan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang. Pemerintah Jepang melakukan kebijakan penyatuan lahan yang berlaku secara nasional dan wajib bagi seluruh petani di Jepang. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Nasional dan Pemerintah Lokal mengutamakan pembangunan infrastruktur sekitar kawasan pertanian seperti jalan usaha tani, saluran air, dll. Dengan adanya kebijakan tersebut, pada saat ini kepemilikan lahan pertanian berkisar antara 10-30 ha/KK dan berada disekitar jalan raya yang notabene merupakan jalan usaha tani. Luasnya lahan yang dimiliki dan terpusat pada satu tempat, membuat produktivitas pertanian Jepang sangat tinggi serta mendapatkan manfaat besar pada saat musim panas menghasilkan prproduktivitas yang tinggi dapat menutupi saat-saat kurang produktif yaitu pada musim dingin dan gugur.

Konsep pembangunan pertanian di Jepang sejak tahun 1980 an sudah mengacu pada tiga hal pokok yaitu pertanian organik, Green Tourism, dan Konservasi Lingkungan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, berkualitas dan sehat bagi konsumsi. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan pertanian tidak hanya untuk penyediaan pangan saja, melainkan sekaligus dapat menjadi

objek wisata. Tidak heran bila sebagian besar kawasan pertanian di Jepang sangat menarik dan indah karena memang mereka sangat memperhatikan penampilan di setiap lahan pertanian yang ada. Konsep pembangunan pertanian lainnya adalah pembangunan pertanian yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pertanian organik. Kombinasi kedua konsep ini menyebabkan pertanian di Jepang lebih berkesinambungan (*Sustainable Agriculture*).

Secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi: (1) pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan; (2) pengembangan budaya dan industri pangan; (3) aliansi strategis berbagai industri; (4) pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas; (5) pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian; (6) konsolidasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan (7) pengembangan infrastruktur lahan pertanian (peningkatan skala usaha).

Pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil dibandingkan dengan Thailand, India, dan Indonesia, dimana pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani pada ketiga negara lebih rendah dibandingkan di Jepang. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang sangat memperhatikan kesejahteraan petani. Bertani di Jepang bukan menjadi sesuatu yang tradisional dan terkesan terbelakang.

Selain kebijakan yang telah disebutkan di atas, berikut adalah beberapa program kebijakan pertanian Jepang yang dilakukan pada tahun 2010:

- Kebijakan 1 : Transformasi kebijakan agraria (target 50% swasembada pangan dan mempertahankan multifungsi lahan)
- Program a : Introduksi subsidi (pendapatan) rumah tangga petani;
- Program b : Pergeseran sistem produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen (kualitas, keamanan, dan stabilitas)
- Program c : Kerjasama industri (primer, sekunder, dan tersier) di perdesaan
- Kebijakan 2 : Penciptaan lingkungan pertanian berkelanjutan melalui motivasi stabilisasi petani (subsidi pendapatan rumah tangga)
- Program a : Pemberian standar subsidi (pendapatan) untuk mengatasi perbedaan biaya diiringi dengan dukungan manajemen
- Program b : Antisipasi dalam mengatasi jatuhnya harga beras
- Kebijakan 3 : Perubahan orientasi kebijakan pertanian dari pola reduksi ke sistem produksi

- Program a : Subsidi (pendapatan) bagi petani padi dan
- Program b : Subsidi (pendapatan) bagi pelaku pertanian secara adil untuk menjamin validasi kesesuaian penawaran dan permintaan serta menghindari segregasi pasar

3.1.6. Thailand

Visi pembangunan pertanian Thailand adalah “petani mendapatkan standar hidup yang lebih baik, masyarakat memiliki ketahanan pangan, dan negara memperoleh penerimaan”. Sementara itu, sasarannya yaitu untuk: (1) peningkatan indeks kemakmuran petani hingga 80 persen pada tahun 2016; (2) peningkatan ekonomi sektor pertanian sebesar tiga persen per tahun; dan (3) pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk peningkatan produksi pertanian.

Strategi kunci kebijakan pertanian Thailand meliputi: (1) pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*); (2) pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan; dan (3) pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Pada tahun 2011, Departemen Beras pada Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand mengeluarkan kebijakan terkait pembiayaan kesejahteraan petani yang sudah tua dan juga memberikan kompensasi bagi petani yang mengalami disabilitas. Dengan perubahan dana yang terjadi pada saat ini, pemerintah Thailand menjadi lebih mudah dalam mengalokasikan dananya untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama untuk asuransi pertanian. Hal ini bertujuan untuk menjamin tanaman yang terkenan bencana alam dan juga asuransi bagi petani yang mengalami gangguan kesehatan akibat keracunan pestisida.

Berikut adalah strategi Kunci dan Sasaran Kebijakan Pertanian Thailand pada saat ini :

- a. Strategi 1 : Pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*)
 - Meningkatkan penerimaan dan stabilitas pertanian
 - Membangun basis pengetahuan bagi petani
 - Meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat untuk mengatasi bencana alam dan kesiapan akses terhadap komunitas ASEAN
 - Membangun ketahanan dan keamanan pangan bagi rumah tangga dan masyarakat petani
 - Mempromosikan dan mendukung para petani muda untuk sektor pertanian

- Mengelola dan menyebarkan pengetahuan masyarakat
 - Mendukung kegiatan koperasi pertanian dan kelompok tani
- b. Strategi 2 : Pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan
- Mengembangkan teknologi produksi dan menciptakan nilai tambah
 - Mempromosikan produksi pertanian hijau (*green agricultural production*);
 - Menyeimbangkan dan menstabilkan tanaman pangan dan tanaman bahan energi (*fuel crops*)
 - Mendukung pengembangan sistem pemasaran pertanian;
 - Membangun konektivitas ekonomi regional dan internasional; dan
 - Mempromosikan dan mengembangkan penelitian pertanian
- c. Strategi 2 : Pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan
- Mempromosikan dan mengembangkan sumber daya dan infrastruktur pertanian yang efisien dan berkelanjutan
 - Mempromosikan dan mendukung petani untuk memanfaatkan sumber daya secara tepat dan berkelanjutan
 - Mendukung dan memperkuat partisipasi petani dalam pengelolaan pertanian
 - Melakukan persiapan untuk dampak perubahan iklim dan membentuk sistem peringatan dan mitigasi bencana alam
 - Mengembangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya pertanian

Kebijakan pertanian lainnya yang dilakukan pemerintah Thailand dengan bantuan lembaga lain, seperti universitas dan industry juga dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pertanian Thailand. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan :

- 1) Melakukan integrasi antara program pemerintah, raja, universitas dan swasta dalam melakukan usaha pertanian dan menghasilkan bibit unggul
- 2) Agrobisnis dan agroindustri telah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan insentif bagi para pelaku produsen bibit unggul.

- 3) Harmonisasi pasar pertanian dan pasar industri. Pasar agrobisnis meliputi mekanisme yang saling menunjang diantara pasar induk, pasar regional, pasar kontrak, pasar lelang yang bekerja sesuai mekanisme pasar.
- 4) Kebijakan budidaya tanaman pertanian pada umumnya fokus hanya pada sedikit jenis bibit unggul (pola monokultur). Pola monokultur memberikan keseragaman output, memudahkan penanganan pasca panen, meningkatkan daya saing ekspor dan mengendalikan hama penyakit.
- 5) Sistem Supply Chain Management (SCM) yang sederhana dan efektif dengan prinsip: setiap pergerakan distribusi produk pertanian hanya membawa produk yang lulus kualitas, keseragaman, dan kebersihan. Contoh: pedagang yang membeli jeruk dari petani dalam kemasan karton, lengkap dengan label dan informasi lainnya. Sehingga jeruk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas akan dikonsumsi sendiri atau dijadikan pupuk organik.

3.1.7. Cina

Pertanian Cina berubah setelah tampilnya salah satu orang berpengaruh di Cina setelah era Mao Runtuh pada tahun 1978, dengan Xiaoping yang langsung melakukan gerakan pembaharuan. Secara bertahap, Cina mengganti sistem totalisasi dan sentralisasi dalam bidang pertanian yang selama ini diterapkan di negara tersebut dengan menawarkan sebuah bentuk pasar bebas sehingga memberi angin segar bagi para wiraswasta.

Kini Bank khusus pertanian pun dibentuk, mengenai keterbatasan lahan dan ketahanan pangan. Cina menjawabnya dengan pengembangan teknologi pertanian, cara bertani konvensional mulai ditinggalkan. Cina juga mengeluarkan padi jenis transgenik. Padi ini diluncurkan untuk meningkatkan produksi hingga dua kali lipat dan memberi tambahan pendapatan bagi petani. Peluncuran padi transgenik itu dilakukan setelah enam tahun melakukan riset. Selain itu, sebuah lembaga riset di Shanghai telah menemukan padi hibrida pertama di dunia yang bisa ditanam di lahan kering. Padi lahan kering ini hanya membutuhkan air 50 persen lebih rendah dibandingkan dengan padi sawah. Padi hibrida ini bisa menghasilkan 7,571 ton padi per hektar. Produktivitas ini cukup tinggi ketimbang produktivitas tanaman padi biasa yang sekitar empat ton per hektar.

Upaya intensif dari pemerintah meningkatkan teknologi, di berbagai bidang termasuk di bidang pertanian, seperti yang disebutkan sebelumnya. Tidak heran inilah yang makin membuat Cina sedemikian digdayanya dalam sektor pertanian, khususnya perberasan. Tidak bisa dipungkiri, Cina dijadikan rujukan banyak negara untuk mengembangkan sektor pertanian. Kendati dikenal sebagai penghasil beras terkemuka, Cina berhasil menerapkan program diversifikasi pangan. Mereka tidak malu menyuguhkan ubi atau talas pada setiap tamu yang berkunjung, bahkan kepada tamu kenegaraan sekalipun. Hasilnya, setiap penduduk Cina hanya mengonsumsi beras 92 kilogram per tahunnya. Bandingkan dengan penduduk Indonesia, yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Beras dengan 135 kilogram per orang tiap tahunnya.

Di samping soal program kerja efektif, penerapan teknologi, maupun diversifikasi pangan, hal lain yang turut menunjang keberhasilan Cina sebagai negara maju adalah etos kerja yang dimiliki penduduknya, terutama di sektor pertanian ini. Salah satu contoh, di kala sedang bekerja, mereka bekerja tanpa lelah. Sebaliknya, kalau istirahat, mereka menggunakan waktu yang ada betul-betul untuk beristirahat

Pembangunan tidak mungkin berhasil tanpa perubahan sistem nilai yang mendukung pembangunan yang kemudian diikuti oleh transformasi sosial untuk menjadi pondasi dalam persiapan penerimaan teknologi baru. Menurut pandangan Soedjatmoko, terdapat tiga pokok fikiran merubah masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan. Pertama, proses pembangunan suatu masyarakat membutuhkan suatu transformasi sosial dalam persiapan penerimaan teknologi baru maupun sistem nilai baru. Fase ini merupakan titik awal dalam pencapaian penerimaan teknologi baru. Kedua, transformasi sosial merupakan proses yang berkesinambungan yang membangun basis kekuatan yang mendukung proses pembangunan. Ketiga, teknologi merupakan alat untuk mempermudah pekerjaan manusia dan oleh karena itu tidak boleh memperlak manusia.

Transformasi akan berjalan dan diterima dengan baik apabila memenuhi tiga aspek yaitu partisipasi masyarakat, berkeadilan sosial, dan ramah terhadap lingkungan. Transformasi sosial sendiri diartikan sebagai perubahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti tata nilai, pranata sosial, wawasan, cara berpikir, atau kebiasaan yang telah lama terjadi di masyarakat dan sebagainya (Dahlan, 1994: 1). Perubahan tersebut ada kalanya sangat mendasar, tetapi bisa juga bersifat umum. Transformasi sosial bukan sekadar perubahan, melainkan juga perubahan

mutu kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Dan rakyat China telah memulai Transformasi sosial yang dipicu oleh sabda Deng Xiaoping pada tahun 1982 yang mengatakan bahwa: kemiskinan bukan sosialisme; sosialisme berarti melenyapkan kemiskinan.

3.1.8. Vietnam

Pengelolaan pertanian di Vietnam sudah menjadi agroindustri. Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap pembangunan pertanian senantiasa terfokus sehingga pertanian bisa menjadi basic atau penyangga perekonomian nasional. Mulai dari pengadaan pupuk, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, proteksi hasil pertanian hingga memperhatikan nasib petani dan lainnya sangat diperhatikan pemerintah atau singkat kata kebijakan dari hulu hingga ke hilir terselenggara secara konsisten.

Tidak ada kebijakan yang bersifat parsial, berkuat di teori namun Pemerintah Vietnam lebih terfokus mengatasi berbagai persoalan pertanian di negerinya. Hasilnya, pertanian tumbuh pesat dan nama Vietnam menjadi salah satu negara penghasil beras yang sangat diperhitungkan dalam dunia perdagangan internasional.

Hal lain yang menonjol adalah tingginya etos kerja petani Vietnam. Jelas, simbiosis yang sangat menguntungkan karena kombinasi antara kebijakan pemerintah yang terfokus dan didukung tingginya etos kerja tersebut kian mempermudah grand design Pemerintah Vietnam untuk menjadikan jualan utama negara itu sebagai industri agraris. Wajar, kalau dalam beberapa tahun terakhir ternyata beras Vietnam selain mampu memenuhi kebutuhan domestik juga telah melakukan ekspor bahkan terkesan merajai atau mendominasi ke banyak negara termasuk Indonesia.

Pada tahun 1976 dimana Vietnam utara dan selatan bersatu, kemudian pemerintah Vietnam meluncurkan kebijakan sistem pertanian kolektif. Dengan menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Vietnam membentuk koperasi pertanian. Koperasi pertanian bertanggungjawab untuk membagi tenaga kerja, tanah, dan input pertanian untuk mengejar produksi yang diminta pemerintah Vietnam. Namun, kebijakan ini tidak berlangsung lama karena mendapat perlawanan dari masyarakat Vietnam. Kemudian, pemerintah mengganti tugas dari koperasi menjadi lembaga yang mengurus sistem kontrak pertanian bagi petani. Koperasi petani mengalokasikan lahan untuk rumah tangga dan memberikan tanggung jawab pada masing-masing rumah tangga untuk mengatur manajemen

dan keputusan produksinya (Leung dan Reidel, 2006). Petani menjadi termotivasi untuk mengejar produksi dalam jumlah yang besar untuk menjual lebih banyak produk pertanian.

Kemajuan sektor pertanian di Vietnam tidak lepas dari peran pemerintah Vietnam. Pemerintah Vietnam memberikan investasi di sektor pertanian yang cukup tinggi untuk *research and development* (R&D). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari bagaimana cara terus meningkatkan produktivitas produk pertanian.

3.1.9. India

Ada tiga kunci sukses keberhasilan pembangunan pertanian India: kebijakan makro yang mendorong kemajuan sektor pertanian, dukungan sumber daya manusia yang terintegrasi, dan semangat petani. Hasilnya, India kini bisa lepas dari ketergantungan pangan impor. Produksi padi naik lima kali lipat dalam 40 tahun terakhir dan produksi kentang juga naik 15 kali lipat.

India juga memberlakukan UU Nasional Ketahanan Pangan (NFSA) yakni mencakup lebih dari 800 juta orang dan menyediakan 60 Kg Gabah per orang setiap tahun dengan harga sekitar 10% dari harga eceran. Pemerintah India meningkatkan penyaluran kredit pertanian dan asuransi. Selain itu, India juga mengeluarkan program seperti subsidi input pupuk, irigasi, listrik, dan kredit pertanian ditambah dengan investigasi irigasi, dirancang untuk mendorong hasil yang lebih tinggi. Subsidi bunga yang diberikan sampai 4 persen untuk pinjaman pertanian dan ada sistem resi gudang.

Keberhasilan India dalam peningkatan produksi komoditas pertanian diawali dari kebijakan makro yang berpihak pada sektor pertanian. Anggaran besar-besaran dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi dan pabrik pupuk, dimana pabrik pupuk India merupakan kedua terbesar setelah Cina.

Kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dalam upaya peningkatan produksi. Pembangunan universitas diwajibkan semenjak tahun 1962 di tiap provinsi. Pada sepuluh tahun pertama dana sepenuhnya dari pemerintah. Sepuluh tahun kedua 50 : 50 persen. Sasaran utama, membangun SDM berkualitas yang mau ke desa untuk melakukan riset dan membangun pertanian. Mereka juga mengajari petani bagaimana membudidayakan tanaman lebih baik. Untuk mengatasi gap teknologi,

pemerintah membangun pusat penelitian petani setiap radius 20 kilometer. Di sana ada traktor, alat pemanen, dan sarana produksi lain.

Kebijakan pemerintah sangat menentukan. Universitas Pertanian di India berada langsung di bawah Departemen Pertanian sehingga antara dunia pendidikan dan sektor pertanian menyatu. Mereka tahu apa yang dibutuhkan pertanian. Di India juga dibangun institut bagi tiap jenis komoditas, seperti institut jagung, beras, gandum, dan pisang. Institut ini bertanggung jawab meningkatkan produktivitas komoditas tanaman. Kebijakan ini tidak bisa instan dirasakan manfaatnya karena hal ini baru bisa dirasakan 30 tahun kemudian.

3.2. Kebijakan Orientasi Input Negara Berkembang

3.2.1. Kenya

Negara berkembang dengan sektor pertanian masih menjadi sektor utama di negaranya. Pengembangan sektor pertanian masih sangat minim teknologi dan masih sangat mengandalkan bantuan pemerintah untuk pengembangannya. Misalnya saja Kenya dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Kebijakan pertanian yang dilakukan misalnya saja dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan peran irigasi untuk mengurangi ketergantungan pada pertanian tadah hujan.
2. Mendorong diversifikasi komoditas pertanian non-tradisional dan meningkatkan nilai tambah.
3. Pemerintah dan swasta berinvestasi dalam fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
4. Peningkatan produktivitas melalui teknologi; teknologi yang rendah karena tingginya biaya produksi dan petani tidak mampu membeli teknologi.
5. Pertanian diubah dari produksi subsisten menjadi komersil sehingga pengusaha tertarik untuk berinvestasi.
6. Pemberian insentif untuk membangun agro industri di daerah pedesaan.
7. Penelitian untuk meningkatkan nilai tambah komoditi, pengolahan, penyimpanan dan kemasan hasil pertanian, promosi kemitraan antara petani dan agribisnis, perbaikan infrastruktur yang mendukung, dan melakukan pelatihan bagi petani dan kelembagaan petani. Media

Kenya menyoroiti nasib petani mangga yang tidak bisa memasarkan produk mereka.

8. Masalah yang dihadapi Kenya adalah rendahnya anggaran untuk penelitian walaupun saat ini penelitian pertanian dikoordinasikan oleh KARI (Kenya Agricultural Research Institute). Selain itu, terbatasnya akses kredit dan pembiayaan untuk petani kecil.

3.2.2. Mesir

Mesir merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulannya. Permasalahan utama yang masih dihadapi masyarakat petani di Mesir adalah terbatasnya lahan yang subur (3,3 juta Ha) dan ketersediaan air. Kegiatan pertanian menggunakan hampir 80 persen air yang sebagian besar tersedia pada Sungai Nil. Kebanyakan daerah, hanya memperoleh sedikit atau curah hujan yang kurang efektif. Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pertanian dan program-program penelitian yang mengarah pada peningkatan produksi melalui intensifikasi, efisiensi sarana produksi pertanian, menekan pengaruh negatif lingkungan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan manusia. Kebijakan ini diperkuat pula dengan membangun irigasi (termasuk membuat *water tank, cystem, dsb*), infrastruktur di perdesaan juga pemberian kredit pertanian dengan bunga rendah (6-8% per tahun).

3.2.3. Ethiopia

Selain itu, misalnya saja Ethiopia, negara yang berada di Afrika dengan kondisi iklim yang sangat minim untuk pengembangan sektor pertanian. Namun, Ethiopia mendapat dukungan dari CIDA yang tidak hanya menyentuh bidang fiskal saja, namun bidang pertanian juga. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pertanian di Ethiopia. Tujuan bantuan CIDA sangat relevan dan konsisten dengan tujuan pemerintah Ethiopia untuk program ketahanan pangan. Diantara program yang dijalankan adalah :

1. *The Productive Safety Net Program (PSNP)*

Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan proyek konstruksi yang mampu meningkatkan proteksi lingkungan, produktivitas lahan, dan pengembangan infrastruktur.

2. *Water Harvesting and Institutional Strengthening in Tigray (WHIST)* Kebijakan ini bertujuan mendukung proyek spesifik pada manajemen air dan pertanian. Dengan pelaksanaan yang baik proyek ini mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari lahan.

Ethiopia masih berfokus pada kebijakan ke dalam untuk terus meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinannya, membuat Ethiopia masih sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk investasi maupun bantuan *capacity building*. Kebutuhan Ethiopia hingga saat ini masih sangat membutuhkan dukungan eksternal yang sangat besar untuk terus meningkatkan ketahanan dalam negerinya pada masa mendatang.

3.2.4. Kamboja

Kamboja yang tergolong negara berkembang mengadopsi beberapa strategi untuk mengembangkan pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, diversifikasi, serta transisi dari pertanian subsisten ke pertanian komersial. Beberapa hal yang dilakukan Kamboja untuk mendukung kegiatan tersebut seperti mendirikan bangunan yang dibutuhkan untuk sektor pertanian dan meng-*upgrade* sistem kelembagaan serta infrastruktur (jalan, irigasi, listrik, ICT); mereformasi lahan; mendukung dan menginisiasi kegiatan organisasi petani; menyediakan layanan penyuluhan pertanian dan bahan baku; serta melakukan modernisasi sektor keuangan.

Langkah-langkah rencana jangka menengah yang dilakukan diantaranya :

- Meningkatkan produktivitas padi sawah dengan menggunakan benih hasil yang tinggi dan dengan teknik pertanian modern.
- Melanjutkan untuk memperluas irigasi.
- Melanjutkan untuk membangun dan merawat jalan pedesaan untuk menghubungkan daerah produksi beras ke pasar beras.
- Mempromosikan pinjaman mikro kepada petani.

Sedangkan, untuk Langkah-langkah rencana jangka panjang yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan pengelolaan air, kunci untuk produktivitas tanaman dan intensifikasi hasil.

- Melaksanakan Kebijakan Nasional untuk Listrik Pedesaan.
- Mempromosikan dan membangun organisasi (*TheRice Miller Association*) untuk memperkuat kedudukan petani dalam melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga mampu meningkatkan kontribusi perberasan terhadap perekonomian.
- Menjamin keamanan kepemilikan lahan dan mempermudah pinjaman untuk modal di sektor pertanian dengan pemerintah sebagai jaminannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Bank Pembangunan Pertanian di Kamboja.
- Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengolahan padi dan ekspor beras giling.
- Menurunkan harga listrik sesuai dengan prinsip keadilan, serta memperluas cakupan listrik untuk daerah pedesaan.

Kebijakan konkret yang telah dilakukan kamboja dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan infrastruktur pertanian diantaranya :

1. Memberlakukan undang-undang tentang Konsesi Lahan Ekonomi untuk meningkatkan produksi pertanian.
2. Membuat pembiayaan dan pembangunan sektor pertanian hingga 18 juta US\$.
3. Membebaskan tarif impor untuk produk input pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian.
4. Membebaskan pajak untuk proyek pembangunan pertanian selama 3 tahun

3.2.5. Papua New Guinea

Papua Nugini dengan kondisi daratan yang sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi perekonomian Papua Nugini. Selain itu, pengembangan sektor pertanian pun menjadi terhambat dengan struktur permukaan yang disebutkan di atas tersebut. Kebijakan pertanian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian pun membutuhkan *effort* yang sangat besar. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Transformasi lahan pertanian pedesaan ke lahan semi komersial dan komersial. Dimana kebijakan ini akan mampu mendorong peningkatan

dan maksimisasi output pertanian, serta akan memudahkan adanya transfer teknologi dan informasi.

2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk perkebunan.
3. Melakukan penelitian terkait dengan hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan.
4. Menyediakan fasilitas karantina untuk menjamin hilangnya hama dan penyakit pada produk pertanian yang dihasilkan.

Untuk memudahkan perumusan kebijakan yang bisa Indonesia pelajari, baik dari negara maju maupun negara berkembang, maka pada tabel 16. ditampilkan rekap kebijakan pertanian yang berorientasi input. Selain itu, Indonesia juga bisa memahami kebutuhan negara berkembang dalam rangka memberikan bantuan untuk meningkatkan peran Indonesia di mata dunia. Berikut adalah rekap kebijakannya :

Tabel 16. Rekap Kebijakan Pertanian Berorientasi Input

Negara Maju	Negara Berkembang
a. Penerapan sistem pajak yang lebih baik.	a. Meningkatkan peran irigasi dan listrik
b. Pengembangan R&D	b. Melakukan R&D
c. Penggunaan bibit organik unggulan	c. Pembebasan tarif impor bagi input sektor pertanian
d. Pemberian subsidi kredit kepada petani	d. Pembebasan pajak untuk proyek pembangunan pertanian
e. Perbaikan sistem irigasi	→ dimana hampir semua kebijakan tersebut masih minimum pendanaan dari dalam negerinya.
f. Pengembangan tehnik pertanian modern. Ex. Pengembangan rumah kaca	
g. Pengembangan SDM berkualitas yang mau untuk turun ke lahan. Ex. Kerjasama antara universitas dengan pemerintah, dimana lulusan universitas akan dipekerjakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian	

3.3. Kebijakan Orientasi Output Negara Maju

3.3.1. Australia

Pertanian Australia sangatlah maju dengan rata-rata ekspor komoditas pertanian Australia lebih dari 65 persen diekspor. Ekspor utama komoditas pertanian Australia adalah daging, gandum, komoditas hortikultura, serta produk dairy. Salah satu kebijakan yang mendukung orientasi Australia adalah dengan meluncurkan kebijakan Agriculture Advancing Australia (AAA) pada tahun 1997. Kebijakan ini merupakan paket program yang

terintergrasi untuk menolong produsen agar menjadi lebih kompetitif, berkesinambungan dan lebih menguntungkan kegiatan pertanian yang dijalankan. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya :

- a. Pembiayaan untuk melakukan training peningkatan sumber daya dan manajemen pemasaran.
- b. Dukungan kepada industri untuk melakukan perubahan.
- c. Penyediaan alat-alat manajemen keuangan.
- d. Penyediaan informasi dan rujukan tentang keuangan.
- e. Penyediaan tenaga profesional untuk meningkatkan ketrampilan dan pelatihan.
- f. Bantuan bagi keluarga petani yang mengalami kesulitan keuangan.
- g. Meningkatkan akses ke pasar.

Pada tahun 2006 Australia menerapkan kebijakan terkait dengan persaingan perdagangan komoditas perdagangan. Persaingan pada masa mendatang diprediksikan tergantung pada efisiensi dari kolaborasi sektor-sektor yang terkait. Pada intinya kebijakan tersebut ingin meningkatkan kinerja *value chain* dari produk pertanian. Selain itu, pemerintah Australia juga melakukan kebijakan regulasi untuk meningkatkan informasi label negara asal produk (*Country of Origin Labelling*). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi label negara asal produk akan memberi kejelasan info kepada konsumen terkait asal muasal produk makanan mereka.

3.3.2. Amerika Serikat (AS)

Salah satu kebijakan AS untuk memajukan pertanian adalah mengadakan Farm Bill. Farm Bill adalah salah satu produk legislasi AS yang disahkan oleh Kongres AS setiap 5 tahun. Undang-undang ini mengalokasikan anggaran untuk membantu petani dan program-program di sektor pertanian AS, mencakup bantuan tunai langsung ke petani (*direct payment*), pembangunan kawasan pertanian dan pemasaran internasional. Pada Farm Bill 2008 program ini mendapatkan alokasi anggaran sebanyak \$42 milyar atau sekitar 15% dari total dana Farm Bill.

Program komoditi ini secara umum terdiri atas 3 bentuk pembayaran ke petani: (1) pembayaran langsung (*direct payments*) tahunan yang penetapannya tidak berkorelasi dengan tingkat produksi dan harga, (2) *counter-cyclical payments* yang dikeluarkan apabila harga jatuh di bawah harga yang sudah ditargetkan sebelumnya, dan (3) *marketing assistance*

loans yang menyediakan pendanaan sementara (interim financing) dan, jika harga komoditi jatuh dibawah harga yang disepakati dalam kontrak pinjaman, menjadi tambahan bantuan pendapatan (additional income support). Program Komoditas ini menjadi semacam jaring penyelamat (safety net) untuk melindungi petani dari kejatuhan harga komoditi pada saat panen dan membantu meningkatkan pendapatan petani.

Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan kebijakan subsidi harga dan bantuan pendapatan yang diberi nama Title I (Program Komoditas), diberikan pemerintah ke petani didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar tidak mampu menyeimbangkan antara besarnya pasokan dan permintaan. Pada saat panen melimpah sementara permintaan tetap, harga komoditi pertanian menjadi sangat rendah dan kondisi ini tidak baik bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Demikian pula yang terjadi di tingkat petani, petani tidak dapat merespon secara cepat dan proporsional apabila terjadi perubahan harga misalnya dengan mengurangi produksinya jika harga panen jatuh. Jatuhnya harga panen akibat kelebihan produksi akan merugikan petani karena biaya sudah terlanjur dikeluarkan sementara petani pun sudah harus menyiapkan tanaman untuk musim tanam berikutnya dimana tingkat harga pada musim panen berikutnya itupun tidak jelas.

Untuk itu, maka penyediaan subsidi harga dan pendapatan ini diberikan untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani dengan mengalihkan sebagian risiko tersebut diatas dari petani ke pemerintah. Risiko tersebut antara lain ketidak stabilan harga komoditas jangka pendek dan perbaikan kapasitas dalam jangka panjang. Tujuannya adalah menjaga daya saing ekonomi sektor pertanian dengan demikian dapat bersaing secara global dalam menghasilkan pangan dan serat.

Subsidi ini awalnya dimulai pada tahun 1930-an ketika terjadi resesi ekonomi berat (great depression) di AS. Tujuan awalnya adalah untuk mengontrol tingkat pasokan komoditas dan pengelolaan stok sehingga tingkat pendapatan petani dapat terjaga pada level yang menguntungkan, namun kemudian telah berubah pendekatannya menjadi semacam bantuan tunai langsung (direct income support payments).

Pada kebijakan *Farm Bill* 2014 dengan target *Crop Commodity Programs* akan memberikan benefit berdasarkan harga atau target pendapatan bagi produsen *covered commodities* seperti jagung, biji-bijian pakan lainnya, gandum, beras, kedelai, minyak sayur lainnya, kacang tanah, dan kacang-

kacangan, serta bantuan transisi bagi produsen kapas di dataran tinggi pada saat program asuransi kapas baru saja diimplementasikan. Selain itu, menyediakan pinjaman bantuan pemasaran untuk *covered commodities*, kapas, wol, mohair, dan produsen madu. Terdapat juga pinjaman *non-recourse*, jatah pemasaran, dan ketentuan lain yang disediakan untuk produsen gula. Beberapa jenis program yang ditawarkan pada *farm bill* 2014 yaitu *Direct Payments*, *Countercyclical Payments*, *Average Crop Revenue Election (ACRE) program*, *Price Loss Coverage (PLC)*, dan *Agriculture Risk Coverage (ARC)*.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga melakukan kebijakan terkait *local food*. Kebijakan ini dilakukan dengan memperluas ruang lingkup, dana, dan *Farmers Market*, serta Program Promosi Pangan Lokal untuk memasukkan perusahaan bisnis makanan lokal dan regional dalam kebijakan yang dikeluarkan. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan kerjasama bersama USDA untuk mengembangkan metode penilaian tanaman yang memiliki tujuan memberikan pinjaman kepada produsen makanan lokal dan regional, serta menerapkan mekanisme penetapan harga. Kemudian, menciptakan program baru untuk memberikan hibah kepada organisasi juga dilakukan untuk mendorong konsumsi buah dan sayuran lokal oleh penerima SNAP yang diperlihatkan dari peningkatan daya beli. Termasuk preferensi untuk proyek-proyek yang melibatkan makanan lokal dan tempat-tempat penjualan langsung ke konsumen. Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk meluncurkan kembali sejumlah program yang mendukung pengembangan makanan lokal dan regional.

3.3.3. New Zealand

Sebelum tahun 1980, dukungan untuk sektor pertanian di New Zealand memberikan hasil yang kurang efisien untuk mengkompensasi pajak yang berasal dari dukungan tarif dan overvaluation nilai tukarnya. Dukungan terbesar untuk sektor pertanian pada saat itu adalah dengan penerapan kebijakan harga minimum pada tahun 1978. Kebijakan ini dilakukan bergantung dari komoditi yang akan diberikan ekspor subsidi dan yang mengalami kekurangan pembayaran. Pada tahun 1980, dukungan pemerintah untuk sektor pertanian hanya sebesar 7 persen untuk output. Namun, pada tahun 1984 meningkat menjadi 39 persen dan hampir 2/3 bagiannya untuk kebijakan dan stabilisasi harga.

3.3.3. Jepang

Jepang melakukan pembentukan lembaga pembantu pemerintah di sektor pertanian yaitu JA Cooperative dalam menjalani fungsinya, telah menjalin jaringan kerjasama yang sangat besar dengan pasar-pasar local khususnya supermarket, pasar Internasional, dan pemerintah. Selain itu JA Cooperative juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti Packaging center, Processing center, Pasar Saprodi, Pasar penjualan langsung (direct sale market), supermarket, Gudang, Penggilingan beras, Fasilitas pembuat pupuk organic, dll. Dengan adanya JA Cooperative beberapa peran penting dan krusial bagi petani telah diatasi terutama untuk pemasaran. JA Cooperative memberikan jaminan semua produk petani terjual dengan harga diatas rata-rata dan tentu saja ini memakmurkan petani.

Selain dibantu oleh JA *Cooperative*, pemerintah Jepang juga melakukan kebijakan terkait dengan output. Salah satu implementasi kebijakan operasional kunci pemerintah Jepang dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (*direct payment for income support for farmers*). Kebijakan tersebut memberikan pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variabel kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran-permintaan Kementerian Pertanian Jepang. Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok/standar komoditas petani, sedangkan besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

3.3.4. Thailand

Thailand adalah produsen utama gula, beras, ubi kayu, jagung, dan karet sekaligus sebagai negara pengekspor gula, ubi kayu, karet, nenas, dan buah segar. Beras juga menjadi salah satu prioritas utama pembangunan pertanian Thailand di samping komoditas lain seperti gula, jagung, sayuran, dan buah yang sudah menjadi produk global. Kebijakan pembangunan pertanian kunci Thailand salah satunya terkait dengan peningkatan harga beras (*rice pledging policy*). Selain itu, kebijakan intervensi harga juga dilakukan untuk ubi kayu, bawang merah, bawang putih, nanas dan karet.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin pendapatan petani Thailand. Skema asuransi harga beras dilakukan dengan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar pada petani lokal untuk *unlimited* output. Kelebihan pembayaran harga beras ini dibayar oleh *taxpayer* dan eksportir beras. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, petani melaporkan peningkatan hingga dua kali lipatnya untuk pendapatan tiap bulannya.

Kebijakan peningkatan harga beras juga diiringi dengan program dan kegiatan peningkatan kualitas dan mutu beras, mulai dari tingkat petani/panen sampai ke tingkat eksportir/pasar dunia. Selain itu juga diimplementasikan kebijakan pendukung lain seperti fasilitas pupuk, benih, pengolahan, distribusi, pengemasan, dan pemasaran. Terkait komoditas sayuran dan buah-buahan, pemerintah Thailand menargetkan produk sayur dan buah baik segar maupun olahan serta kemasan Thailand yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen di seluruh penjuru dunia. Pemerintah Thailand memiliki slogan "*kitchen of the world*" atau "dapur dunia".

3.3.5. Cina

Cina mendorong kebijakan yang mendukung pertanian dengan prinsip "give more, take less, and liberalization" sejak tahun 2003. Dengan prinsip give more, pemerintah Cina meredistribusi pendapatan nasional dan meningkatkan dukungan terhadap sektor pertanian, petani, dan bagian negara yang terbelakang. Semenjak tahun 2004, petani sereal di Cina memperoleh manfaat dari direct payments, fine breed payments dan machinery payments dari pemerintah.

Prinsip take less, dilakukan pemerintah Cina dengan mengurangi hambatan pertanian dan melindungi hak petani. Prinsip ketiga yaitu liberalization yang merupakan prinsip untuk mereformasi daerah pedesaan, memperbaiki distribusi produk pertanian, serta memfasilitasi aliran faktor produksi dari desa ke kota. Kebijakan ini meliberalisasi pasar gandum domestik dan menetapkan harga minimum gandum pada tahun 2004. Semua komoditas pertanian Cina diliberalisasi, kecuali tembakau.

Pada awal tahun 2000, pemerintah Cina secara bertahap menarik diri dari perannya pada penyediaan biji-bijian, penetapan harga, dan cadangan pangan. Namun, pada saat ini pemerintah Cina kembali menerapkan kebijakan harga minimum yang berdampak signifikan terhadap pembeli biji-bijian di Cina. Pada tahun 2004, Cina juga menerapkan kebijakan harga

minimum untuk beras dan diikuti dengan penetapan harga minimum gandum pada tahun 2006. Kebijakan ini merupakan jaminan bagi petani untuk mau memproduksi lebih banyak.

Semenjak tahun 2008, pemerintah Cina menerapkan penundaan pembayaran dan penyediaan cadangan bagi beberapa komoditi. Komoditas tersebut diantaranya beras, jagung, kedelai, gula dan daging babi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi risiko pada pendapatan petani dan stabilitas harga di pasar domestik.

3.3.6. Vietnam

Koperasi pertanian di Vietnam juga berperan dalam pemasaran, pengumpulan, dan menjual kelebihan produk untuk menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas penting Vietnam. Di bawah kebijakan ini, rumah tangga dikontrak untuk menjual sejumlah produk pertanian yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijual pada koperasi pertanian dibawah harga pasar. Dan kelebihan produk pertanian yang dihasilkan boleh dijual diatas harga pasar. Petani Vietnam termotivasi untuk dapat memproduksi lebih banyak, agar dapat menjual lebih banyak produk pertanian untuk meningkatkan pendapatannya.

Kunci prioritas untuk meningkatkan kelayakan ekonomi dari pertanian di India dari sisi output adalah pemberlakuan harga yang stabil dan pendapatan minimum bagi petani. Dua institusi yang memegang peran penting dalam hal ini adalah *Food Corporation of India* dan *Agricultural Prices Commission* yang didirikan semenjak revolusi hijau yang dilakukan India. Kedua lembaga ini berpertan penting dalam penetapan harga yang cukup bagi produsen dengan tetap memperhatikan harga yang layak diterima oleh konsumen. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk menetapkan cadangan yang tepat untuk menghadapi perubahan output dan fluktuasi harga yang terjadi pada periode-periode mendatang. Pendirian kedua lembaga ini, sangatlah penting terutama bagi dua komoditas utama India yaitu gandum dan beras.

Pada masa sekarang, pemerintah India menetapkan Harga Minimum (Minimum Support Prices/MSP) dari berbagai tanaman pertanian yang merupakan rekomendasi dari CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices). Komoditi yang dikenakan harga minimum yakni padi, kapas, gula aren, gandum, dan rami. Jika pasar menawarkan harga lebih tinggi daripada MSP, maka petani bebas untuk menjual komoditinya pada harga

tersebut. MSP merupakan jaminan harga minimum untuk petani supaya harga tidak jatuh.

3.4. Kebijakan Orientasi Output Negara Berkembang

3.4.1. Kamboja

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dan prioritas utama dalam pembangunan. Total area pertanian pada tahun 2006 mencapai kurang lebih 8.47 juta feddans (1 feddans=0.42 Ha) dan proyek-proyek pembangunan secara vertikal sudah ditargetkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga diharapkan sama produktivitasnya dengan 14.6 juta feddans.

Walaupun sudah diterapkan berbagai teknologi pertanian yang relatif modern (mekanisasi pertanian, *cold storage*, mesin penangkap energi surya, dsb), Mesir dikenal pula sebagai salah satu negara agraris yang tetap mempertahankan praktek-praktek dan kegiatan pertanian tradisionalnya, misalnya pengairan dengan cara menampung/mengumpulkan air hujan, aplikasi pupuk organik, rotasi tanaman, dan intensifikasi pertanian.

Departemen Pertanian negara tersebut sudah banyak memfasilitasi petani yang sebagian pendanaannya didukung oleh negara-negara pendonor baik dibidang ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pelaku pertanian. Penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yakni sekitar 10,7 juta (17% dari jumlah populasi) masih menjadi prioritas utamanya. Program kegiatan yang dilakukan antara lain adalah: peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan melalui perbaikan teknik budidaya pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Secara lebih spesifik, beberapa teknik pertanian yang sudah diintroduksikan kepada petani adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi, penerapan manajemen tanah dan air secara lebih baik, praktek-praktek pertanian organik, agroekosistem, kesehatan lingkungan dan upaya-upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati sekaligus memfasilitasi dalam membuka saluran pemasaran yang dapat diakses oleh petani kecil sehingga memiliki peluang yang sama dalam mengakses pasar domestik maupun global.

Beras adalah tanaman yang dominan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kamboja, selain itu beras juga merupakan komoditas strategis dalam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan, pengurangan

kemiskinan dan ketahanan pangan. Hal ini merupakan pilar utama rencana pembangunan di Kamboja yaitu untuk melakukan pembangunan pertanian. Kamboja berambisi untuk kembali menjadi eksportir utama beras ke dunia. Produksi padi di Kamboja telah bangkit kembali selama dekade terakhir sejak krisis keuangan Asia dan bisa mencapai 7,3 juta ton pada tahun 2010-2011. Hal ini didorong dari meningkatnya permintaan pangan global dan regional serta peningkatan harga beras yang cukup baik.

Beras merupakan komoditas politis yang sangat strategis di berbagai negara. Tingginya permintaan impor beras di Asia jenis sedang dan *low quality* disebabkan oleh efek kurang baiknya kondisi cuaca di Filipina sehingga menurunkan pasokan dari Filipina; kegagalan panen dan pengurangan subsidi pupuk di Indonesia; dan persyaratan oleh beberapa negara di kawasan Asia untuk meningkatkan cadangan beras. Hal inilah yang menunjukkan tingginya potensi ekspor dalam jangka menengah dan panjang bagi Kamboja. Rencana bidang pertanian di Kamboja dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan pada produksi beras dan berorientasi ekspor.

Secara umum, perkembangan pasar beras di Asia dan ekspor beras Kamboja memiliki tren yang sama. Meskipun demikian, Kamboja masih menghadapi sejumlah tantangan utama dan hambatan untuk rantai pasokan, khususnya di manajemen lahan pertanian, penggunaan teknik pertanian modern, kurangnya infrastruktur dan pembiayaan, serta kapasitas kelembagaan. Salah satu tantangan utama produksi beras di Kamboja adalah produktivitas yang telah disebutkan sebelumnya.

Harga rendah dianggap sebagai faktor penting daya saing ekspor beras. Namun, masih tingginya biaya informal, biaya transportasi dan biaya pengolahan beras hingga mencapai pelabuhan, menjadi tantangan utama Kamboja untuk melakukan ekspor beras yang masih merugi secara signifikan. Untuk itu, kamboja harus hambatan utama terkait dengan tingginya biaya energi dan transportasi.

Kendala besar lain untuk promosi ekspor beras Kamboja adalah fasilitasi ekspor yang sulit dan tidak konsisten. Kamboja sangat membutuhkan bantuan untuk pengembangan teknik pertanian modern terutama untuk menentukan standar beras yang baik bagi orientasi ekspor padi, serta diperlukan adanya pelatihan sumber daya manusia untuk dapat terus menembus pasar internasional. Sehingga, beberapa kebijakan pertanian yang dilakukan Kamboja diantaranya :

- 1) Menyediakan insentif untuk investasi dalam pembuatan fasilitas pemrosesan, penggilingan padi untuk diekspor dan investigasi irigasi
- 2) Mempromosikan ekspor beras
- 3) Mempromosikan organisasi petani dengan membuat koperasi
- 4) Meminjam ke Bank Pembangunan Pedesaan untuk penggilingan padi
- 5) Pemerintah mempersiapkan dana 25 juta US\$ untuk menjamin 50 persen dari kredit yang ditawarkan kepada industri beras oleh bank komersil, dan mengambil langkah-langkah lain untuk memfasilitasi akses penggilingan padi untuk kredit komersil
- 6) Pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah akan menghabiskan 40 juta US\$ untuk mendukung pengolahan beras, fasilitas perdagangan dan penelitian.

Untuk memudahkan dalam melihat perbedaan kebijakan yang dilakukan di negara maju dan berkembang, maka dibuatlah rekap kebijakan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut adalah rekap kebijakannya :

Tabel 17. Rekap Kebijakan Pertanian Berorientasi Output

Negara Maju	Negara Berkembang
a. Meningkatkan kinerja <i>value chain</i> komoditas pertanian.	a. Pembiayaan untuk investasi bagi pengolahan, penggilingan produk pertanian, dan kegiatan terkait output lainnya.
b. Kebijakan untuk sistem <i>labelling</i> untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar untuk produk pertanian.	b. Promosi komoditas pertanian unggulan untuk di ekspor
c. Pembentukan lembaga yang membantu untuk petani dalam mengontrol harga komoditas pertanian. Dimana pemerintah membeli produk dengan harga minimumnya, apabila masih ada kelebihan produk, maka petani boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi.	c. Fasilitas kredit untuk pengolahan produk pertanian

3.5. Kebijakan terkait Akses Pasar dan Perdagangan serta Kebijakan lainnya di Negara Maju

3.5.1. Australia

Sektor pertanian merupakan salah satu dari 5 sektor utama di Australia yang berperan besar dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga perlu adanya kesempatan untuk mengembangkan sektor ini dalam ke lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan kompetitif.

Pemerintah Australia sebelumnya telah melakukan kebijakan dasar untuk penguatan sector pertaniannya, seperti: penghapusan beberapa kebijakan dan *Carbon Tax*, peningkatan akses pasar untuk kegiatan ekspor, investasi di infrastruktur dan memperbarui peraturan terkait investasi luar negeri. Melalui White Paper ini, akan kondisi atau 'lingkungan' yang dibutuhkan untuk penciptaan 'hasil yang lebih baik bagi petani' menjadi fokus perhatian, seperti: peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan penguatan *regional communities*.

Untuk membantu pembangunan ekonomi Australia yang lebih kuat, dalam hal ini visi Pemerintah Australia dalam sektor pertanian adalah membangun pertanian yang lebih efektif, menguntungkan, punya daya tahan yang tinggi, dan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini berfokus pada kebijakan pertanian yang diharapkan nantinya mampu mencapai 9 prinsip dengan pertanian primer sebagai fokus utama. Berikut 9 prinsip utama kebijakan pertanian tersebut:

1. Peningkatan pendapatan pada level usaha tani primer (*farm-gate*), dengan cara mengurangi biaya dan hambatan lain yang tidak penting bagi produktivitas dan profibilitas hasil pertanian.
2. Mengurangi kebijakan yang tidak terlalu signifikan membantu pada semua level pemerintahan, hal ini dilakukan untuk mengurangi berbagai aturan/larangan pada pengambilan keputusan pengelolaan usaha tani tersebut selain jugamendorong investasi.
3. Membangun infrastruktur abad 21, dalam artian meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi baik secara domestik maupun di pasar internasional.
4. Menciptakan pekerjaan yang bergaji cukup baik dalam sektor pertanian, baik dari hilir, industri pengolahan makanan, ritel, bahkan sampai hotel dan restoran.
5. Menjaga akses agar semua warga Australia bisa tetap mendapatkan makanan segar yang berkualitas bagus dan terjangkau.
6. Melakukan promosi akses pada pasar ekspor utama.
7. Fokus pada keunggulan kompetitif Australia, sehingga kita bisa selalu siap sedia dalam menangani permintaan produk makanan dari masyarakat kelas menengah dalam negeri.
8. Mendukung komunitas regional yang kuat dan aktif.
9. Menjadikan keluarga sebagai titik awal dalam pelaksanaan usaha pertanian, dengan membangun jalur karir berdasarkan pada

kestabilan finansial, pelatihan dan adanya penerus usaha tani keluarga tersebut.

Sektor pertanian Australia tetap berfokus pada orientasi pasar (*market oriented*) meskipun kontribusi sektor pertanian relatif kecil terhadap PDB dikarenakan fenomena kekeringan parah dan apresiasi nilai tukar dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu respon yang diimplementasikan oleh Australia adalah melalui Penguatan Penanganan Kekeringan dan Pengelolaan/Manajemen Risiko, yang diturunkan menjadi action plan seperti yang tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 18. Inisiatif Terkait Penanganan Kekeringan di Australia

Inisiatif yang Diusulkan	Dampaknya ke Petani
Persiapan sebelum Kekeringan	
Sebanyak \$3.3 juta untuk pengembangan peramalan musiman (<i>seasonal forecasting</i>)	Para petani akan memiliki informasi ramalan yang lebih akurat dan bisa terapkan secara lokal, sehingga lebih memudahkan mereka dalam mengambil keputusan
Pengurangan pajak secepatnya pada fasilitas perairan yang baru dan depresiasi pengeluaran modal pada ruang penyimpanan pakan selama 3 tahun (dengan biaya \$86 juta)	Air adalah kunci dari usaha tani. Semenjak tanggal 12 May 2015 para petani bisa secepatnya mengurangi pembiayaan untuk sarana air. Mampu memberi makan kepada ternak di saat kekeringan adalah hal yang penting. Semenjak tanggal 12 May 2015, para petani bisa mendepresiasi aset penyimpanan pakan selama 3 tahun.
Sebanyak \$29.9 juta selama 4 tahun untuk penyediaan bimbingan terhadap asuransi pertanian dan hibah penilaian risiko	Petani akan dapat mengakses hibah tersebut untuk membantu mengevaluasi pilihan asuransi dan untuk mendapatkan bimbingan saran terhadap manajemen risiko. Asuransi dapat memberikan petani kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang lebih menguntungkan
Bantuan selama Kekeringan	
Pemberian pinjaman sampai dengan \$250 juta per tahun untuk kekeringan konsesional	Kami selalu akan berdiri mendukung petani saat kekeringan. Kekeringan dan pinjaman pemulihan pasca kekeringan akan tersedia pada tahun 2015-2016, dengan produk pinjaman konsesional kekeringan baru akan tersedia 10 tahun dari 2016-17.
Sebanyak \$22.8 juta untuk meningkatkan manajemen kasus dan aktivitas tambahan serupa bagi penerima dalam tahun ketiga pembayaran tunjangan keluarga petani	Petani dan mitra mereka akan menerima tunjangan rumah tangga pertanian serta akan dibimbing dalam pengambilan keputusan tentang langkah selanjutnya.
Sebanyak \$1,8 juta sumber daya tambahan untuk penyedia layanan konseling keuangan pedesaan di daerah yang terkena dampak kekeringan (untuk tahun 2015-2016)	Peningkatan layanan konseling finansial akan disediakan untuk membantu petani selama kekeringan.

Inisiatif yang Diusulkan	Dampaknya ke Petani
Sebanyak \$20 juta untuk tambahan layanan kesehatan dan layanan dukungan masyarakat bagi masyarakat pedesaan di daerah yang terkena dampak kekeringan	Peningkatan akses untuk kesehatan mental masyarakat dan dukungan keluarga akan disediakan untuk membantu petani, Keluarga, dan masyarakat setempat selama kekeringan.
Pemberian akses pembekalan kepada Manajemen Skema Deposit Usaha Tani pada saat kekeringan	Petani di kekeringan akan dapat mengakses FMDs mereka ketika mereka membutuhkannya, tanpa kehilangan konsesi perpajakannya
Saran dan bantuan dari <i>Australian Taxation Office</i> (Kantor Perpajakan Australia) untuk pembayar pajak di masyarakat yang terkena dampak kekeringan	Petani di komunitas yang terkena dampak kekeringan akan menerima saran dan membantu dalam memenuhi komitmen pajak mereka.
Sebanyak \$35 juta untuk proyek lokal bantuan jangka pendek untuk masyarakat yang menderita kemerosotan ekonomi akibat kekeringan	Proyek-proyek lokal siap bangun akan menciptakan peluang kerja di masyarakat yang terkena dampak kekeringan.
Sebanyak \$25.8 juta selama empat tahun untuk membantu pemerintah negara bagian dan wilayah yang bagus pengelolaan hama hewan dan gulma nya pada daerah yang terkena kekeringan	Memperbaiki kondisi hewan liar dan gulma di daerah kekeringan akan meningkatkan profitabilitas.

Sumber : DFAT (2014)

Sebesar 93 persen dari produksi pangan yang dihasilkan oleh Australia diutilisasi untuk konsumsi domestik. Berdasarkan kalkulasi *Multi Factor Productivity* (MFP) yang dikalibrasi seara rata-rata pertahun maka diketahui bahwa sektor pertanian di Australia mengalami peningkatan secara signifikan dimana semula minus 1.6% (2003/04-2007/08) menjadi 6.2% (2007/08-2011/12). Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor utama seperti perbaikan manajemen penggunaan input dan membaiknya kondisi cuaca sehingga lebih kondusif bagi usaha tani. WTO (2015) menyatakan bahwa arah kebijakan Australia dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian dapat diraih dengan peningkatan produktivitas komoditas pertanian melalui peningkatan efektivitas penelitian terkait pedesaan; penurunan *regulatory burdens*; pengembangan sistem pelayanan penyuluhan (*extension*), dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan keahlian tenaga kerja dan kuantitas tenaga kerja.

Terkait dengan kondisi akses pasar Australia sebagai salah satu negara mitra dagang utama perdagangan pertanian Indonesia, dapat diketahui bahwa tingkat proteksi perdagangan untuk komoditas pertanian sangat rendah, dimana applied MFN tariff berkisar 1.4 persen. Meskipun demikian, beberapa *sensitive items* yang dikenakan tarif impor tambahan untuk sektor pertanian mencakup Keju, Anggur, Jus Jeruk, Gula, serta *Oil and Fats*. Dalam lingkup kerjasama perdagangan internasional Australia khususnya untuk produk pertanian, perjanjian bilateral dan plurilateral pertanian Australia

mencakup berbagai hal perdagangan pertanian termasuk yang sangat intensif seperti: pertukaran informasi ilmiah; protokol untuk perdagangan hewan hidup; kerjasama pertanian; dialog tentang kebijakan perdagangan; *mutual recognition*; fasilitasi perdagangan; dan pembahasan isu spesifik terkait perdagangan bilateral.

Disamping akses perdagangan umum dan skema kerjasama perdagangan pertanian internasional yang diterapkan Australia terhadap mitra dagang, terdapat pula beberapa strategi khusus terkait pengembangan akses pasar premium yang bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai hal diatas, Pemerintah Australia berkomitmen pada beberapa program prioritas utama yang diusulkan dalam *White Paper* Australia, seperti:

Tabel 19. Inisiatif Terkait Pengembangan Akses Komoditas Pertanian ke Pasar Premium

Inisiatif yang Diusulkan	Dampaknya ke Petani
Sebanyak \$30,8 juta untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan, termasuk melalui penunjukan lima konselor pertanian baru di beberapa pasar utama	Petani dan industri pengolahan makanan akan mencapai peningkatan keuntungan dari peningkatan keamanan terhadap akses pasar yang sudah ada dan akses ke pasar baru.
Sebanyak \$200 juta untuk meningkatkan pengawasan keamanan biosekuriti dan analisis untuk target risiko biosekuriti yang lebih baik, termasuk di Australia Utara	Biosekuriti yang efektif akan melindungi industri pertanian dan masyarakat dari dampak hama dan penyakit, dan mendukung akses petani ke pasar luar negeri
Sebanyak \$12,4 juta untuk memodernisasi sistem keberlacakan Australia, untuk memverifikasi integritas dan akses yang aman ke pasar luar negeri	Penelusuran sistem keberlacakan yang baik untuk memastikan pasar tetap terbuka, sehingga meningkatkan akses dan bagi hasil yang baik ke petani

Sumber : DFAT (2014)

Terkait dengan mendukung *humanitarian principle*, Australia terus memberikan bantuan makanan (*food aid*) dan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka meningkatkan support pada reformasi kebijakan di negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/ LDCs*) dan *Net Food Importers* (NFIDCs). Semua bantuan pangan Australia sepenuhnya disalurkan dalam format hibah. Dalam periode 2012/13 Australia menyalurkan 73.834 metrik ton bantuan pangan senilai lebih dari \$ A113.7 juta (92.352 ton, \$ A 102 juta di 2010/11); selain itu, semua bantuan makanan untuk LDCs / NFIDCs mencapai 60.681 metrik ton, senilai sekitar \$ A30.7 juta (85.881 ton, \$ A 50,1 juta di 2010/11). Pada saat yang sama Australia juga turut menyediakan \$ A 570.700.000 (\$ A 512,0 juta di

2010/11) untuk program bantuan teknis dan keuangan; Selain itu, bantuan selama periode 2010-2011 mencapai \$ A 216.800.000 (\$ A 214.800.000 di 2010/11) dan secara khusus diarahkan untuk LDCs / NFIDCs (WTO, 2015).

3.5.2. Belanda

Pada Februari 2011, pemerintah melansir paket kebijakan baru untuk mendorong daya saing sektor usaha dan mempersiapkan ekonomi belanda untuk menghadapi tantangan dan peluang dari globalisasi. Selain itu, kebijakan baru bermaksud untuk membantu mengatasi tujuan ekonomi dan sosial yang terkait dengan masalah demografi, perubahan iklim dan tekanan pada sumber daya global. Secara khusus, Pemerintah telah menetapkan tiga sasaran: untuk menjadi salah satu dari lima negara dengan level pengetahuan tertinggi di dunia pada tahun 2020; meningkatkan pengeluaran R & D untuk 2,5% dari PDB (saat ini 1,8% dari PDB); meningkatkan kerjasama publik-swasta dalam aktivitas terkait pengetahuan dan inovasi untuk mengalokasikan dana lebih dari ½ miliar EUR pada tahun 2015 (Gerritsen dan Hoj, 2013).

Kebijakan baru memiliki dua pendekatan yaitu: Pertama, “agenda ekonomi” untuk seluruh sektor swasta dengan *Top Down approach* dengan perhatian khusus untuk sembilan sektor ekonomi. Pemerintah Belanda memiliki 9 sektor utama yang dijadikan dasar penentuan riset dan inovasi, yakni: *water, agriculture and food, horticulture and source materials, high-tech, life sciences, chemistry, energy, logistics and the creative industry*. Menurut pemerintah, sektor-sektor ini mempunyai keunggulan komparatif pada pengetahuan intensif. Selain itu, sektor tersebut berorientasi ekspor dan dianggap dapat kontribusi penting untuk memecahkan masalah sosial.

Secara total, dana tahunan untuk 9 sektor tersebut mencapai 1,5 miliar EUR (0,2% dari PDB). Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi permintaan didorong oleh proses “*bottom-up*”. Tim multidisiplin (yang disebut dengan istilah “*top team*”) dibentuk untuk setiap sektor dengan tugas untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi sektor masing-masing dan merumuskan usulan untuk mengatasi masalah sektor tertentu, terutama berkaitan dengan penelitian dan inovasi, kebijakan luar negeri, regulasi sektor yang spesifik, dan pendidikan / sumberdaya manusia. Di level nasional, inisiatif ini juga didukung oleh penetapan *Top Consortia for Knowledge and Innovation* (TKIs) untuk mendukung sinergi kebijakan pemerintah, pendidikan, dan penelitian .

Kerangka umum dan ide-ide yang diuraikan, setelah proses interaktif antara para pemangku kepentingan publik dan swasta, akan semakin menentukan kebijakan baru. Faktor yang penting dalam penetapan kebijakan ini adalah *nature* dari pendekatan *demand driven* karena didasarkan oleh masukan dari sektor swasta. Selain itu, unsur penting adalah ketergantungan kuat pada "*evidence based policy making*", yaitu menempatkan lebih menekankan pada monitoring dan evaluasi untuk memandu kebijakan.

Pengurangan *red tape* terkait waktu yang dibutuhkan dan biaya administrasi untuk peningkatan daya saing sektor di Belanda merupakan salah satu agenda ekonomi yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan bisnis di Belanda untuk seluruh sektor swasta. Selain itu, agenda bermaksud untuk mendorong penerapan pengetahuan baru dalam produk atau proses terkait sektor pertanian, meningkatkan penggunaan ICT dan meningkatkan kondisi ekonomi spasial untuk cluster ekonomi (misalnya lokasi industri pertanian *off farm* ke pelabuhan Rotterdam dan Bandara Schiphol).

Perbaikan logistik terutama pada fasilitas pelabuhan merupakan fokus kebijakan pendukung lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pelabuhan Rotterdam merupakan pelabuhan terbesar di EU dan pintu masuk pasar EU. Biaya logistik saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Belanda, namun jika dibiarkan dibiarkan begitu saja akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian, terutama bagi sektor perdagangan Internasional. Apabila biaya logistik yang tinggi, maka biaya untuk melakukan perdagangan internasional terutama biaya ekspor dan impor akan meningkat. Selain itu, kesepakatan perdagangan bebas antara beberapa negara terutama negara-negara EU dengan negara mitra dagang akan memberikan efek negatif jika masalah biaya logistik yang kurang efisien dibandingkan dengan negara lain, maka akan menyebabkan produk dari Belanda akan kalah bersaing dengan produk negara-negara lainnya.

Pembentukan *Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries* (CBI) agar memberikan bantuan dan *technical assistance* petani *low-income countries* dapat memenuhi standar dalam CAP sehingga dapat menjual komoditas di pasar EU. Sejalan dengan analisis statik mengenai manfaat perdagangan, apabila hambatan dalam bentuk NTM secara bertahap berkurang maka biaya transaksi dalam perdagangan antara negara maju dan negara berkembang akan turun. Kondisi ini akan

memengaruhi variabel-variabel mikro selanjutnya berdampak pada variabel-variabel makro ekonomi. Negara akan spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatif sehingga kinerja ekspor akan meningkat. Proses ini menuju ke efisiensi alokasi sumberdaya dan peningkatan GDP di negara berkembang.

3.5.3. Amerika Serikat (AS)

Salah satu kebijakan yang terlihat dominan terkait pasar domestik pertanian di Amerika Serikat adalah kebijakan mengenai pangan lokal. Di berbagai negara di dunia, dukungan terhadap pangan lokal bergema dalam rangka mendukung gerakan pangan lokal sebagai alternatif sistem pangan berkelanjutan. Sistem pangan lokal sendiri didefinisikan sebagai sistem pertanian yang berbasis pada satu area tertentu, bertujuan untuk mendukung perekonomian dan bisnis lokal serta mendorong terciptanya keharmonisan baik dilingkungan daerah itu sendiri maupun dengan daerah lain seperti meningkatkan keharmonisan antara pedesaan sebagai penghasil pangan dengan daerah perkotaan sebagai consumer pangan lokal. Gerakan pangan lokal terlihat dominan di Negara maju seperti Amerika Serikat, Canada dan negara-negara di Eropa. Pengertian 'lokal' sendiri memiliki pengertian yang sangat luas seperti 1) jarak seberapa jauh produk tersebut dihasilkan dan dijual (misalnya radius 20-50 mil), 2) batas wilayah pemerintahan (*region, county, municipality*) atau 3) lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membawa produk dari produsen ke konsumen (masih terhitung 'lokal' jika diproduksi dan ditransportasikan paling lama satu hari menyetir).

Secara implementatif, beberapa program prioritas kebijakan Farm Bill 2014 terkait Pengembangan Pangan Lokal (USDA, 2014) meliputi:

- Memperluas ruang lingkup, dana, dan Farmers 'Market, serta Program Promosi Pangan Lokal untuk memasukkan perusahaan bisnis makanan lokal dan regional.
- Kerjasama dengan USDA untuk mengembangkan metode penilaian tanaman untuk tujuan pinjaman kepada produsen makanan lokal dan regional dan menerapkan mekanisme penetapan harga.
- Menciptakan program baru untuk memberikan hibah kepada organisasi yang mendorong konsumsi buah dan sayuran oleh penerima *Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP) melalui peningkatan daya beli mereka. Termasuk preferensi untuk proyek-

proyek yang melibatkan makanan lokal dan tempat-tempat penjualan langsung ke konsumen.

- Meluncurkan kembali sejumlah program yang mendukung makanan lokal dan regional.

Sebagai negara maju, persepsi konsumen terhadap keamanan pangan direspon dengan serius oleh Pemerintah Amerika Serikat. Peningkatan penggunaan pestisida, organisme yang dimodifikasi secara genetik (GMO), dan antibiotik dalam produk makanan organik sangat mengkhawatirkan di Amerika Serikat. Pangsa pasar makanan organik di Amerika Serikat justru diperkirakan tumbuh pada CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) pada 2018. Beberapa program strategis yang disertakan dalam Farm Bill 2014 meliputi:

- Secara substansial mengembang pendanaan untuk membantu produsen organik dan skema pendanaan sertifikasi organik.
- Meningkatkan total dana penelitian pertanian organik
- Membebaskan produsen organik bersertifikat dari kewajiban membayar program promosi komoditas konvensional pada produksi organik, dan menetapkan pilihan untuk program promosi organik.
- Perbaiki asuransi tanaman bagi produsen organik dan memperkuat penegakan peraturan organik.

Terkait dengan fasilitas pemerintah Amerika Serikat terkait ekspor, beberapa skema kebijakan yang digalakkan adalah:

- *Export Credit Guarantee Program (GSM-102)*
Program ini dilakukan oleh USDA dan menyediakan US\$5.5 milyar pinjaman setiap tahun fiskal untuk mendorong ekspor komersial komoditas pertanian Amerika Serikat ke negara berkembang.
- *Program Promosi Ekspor*
 - o *Market Access Program (P.L. 113-79, Sec. 3102)* menyediakan dukungan finansial berdasarkan prinsip cost-sharing untuk promosi ekspor (S\$189.8 juta di tahun 2013).
 - o *The Foreign Market Development Program (Sec. 3103)* menyediakan pendanaan untuk generic dan bulk commodities (US\$32.7 juta di tahun 2013).
 - o *The Emerging Markets Program (Sec. 3203)* menyediakan pendanaan dan dukungan teknis untuk promosi ekspor ke negara berkembang (US\$9.2 jta di tahun 2013).

- o *The Technical Assistance for Specialty Crops Program (Sec. 3205)* menyediakan dukungan teknis bagi organisasi di Amerika Serikat terkait hambatan perdagangan SPS dan *technical barriers to trade* (US\$7.3 juta di tahun 2013).

Instrumen perdagangan internasional yang sangat terkait dengan akses pasar yang diterapkan Amerika Serikat menunjukkan bahwa *Tariffs dan tariff rate quotas* tidak masuk dalam ruang lingkup dalam 2014 Farm Bill. Sementara itu, *trend* tarif rata-rata impor komoditas pertanian di tahun 2014 mencapai 9.0%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Hal ini dikarenakan rendahnya harga komoditas. Disamping itu, tarif impor di Amerika Serikat dikenakan dihitung berdasarkan *f.o.b. value* dan bukan *c.i.f. value*.

Tarif impor tertinggi yang diaplikasikan di Amerika Serikat adalah TRQ tembakau, produk susu, kacang-kacangan, dan gula. Selain tarif impor, penerapan Non Tariff Measures (NTMs) sangat intensif di Amerika Serikat, bahan jumlah instrumen NTM yang diimplementasikan sangatlah besar. Istilah "*non-tariff measures*" didefinisikan secara operasional sebagai hambatan dalam ekspor dan subsidi dalam produksi dan ekspor atau pengukuran lain yang memiliki efek yang sama dimana tidak hanya sekedar hambatan impor (WTO, 2013). Istilah ini secara luas digunakan dalam GATT dan UNCTAD, meskipun dalam buku teks merujuk istilah "barriers" atau "distortions". Dalam definisi yang spesifik, Baldwin dalam WTO (2013) menyatakan bahwa "nontariff distortion" menyebabkan perdagangan internasional barang dan jasa atau sumberdaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa menjadi berkurang dari pendapatan riil dunia potensial.

GATT merupakan forum perdagangan internasional yang secara komprehensif membahas hal ini dan mencari solusi dan selanjutnya menyepakati diterapkan "tariffication" dalam putaran Uruguay tahun 1994 yang ditandai sebagai rejim baru dari WTO. WTO sebagai pelaku utama dalam GATT, memegang peranan penting untuk mengurangi tarif sehingga mencapai perdagangan bebas secara global. Beberapa anggota WTO sepakat untuk mematuhi regulasi WTO dan jika melanggar akan terkena penalti atas ketidakpatuhannya. Sebagai hasilnya, NTM tradisional seperti subsidi dan kuota telah semakin berkurang. Tarif juga secara signifikan berkurang, hampir 0% untuk komoditas terpilih di beberapa negara.

Bagaimanapun, penurunan tingkat tariff sebagai hasil putaran ke-8 GATT dalam negosiasi perdagangan multilateral (multilateral trade negotiations/MTNs) menyebabkan peningkatan secara relative NTM baik dalam bentuk proteksi maupun regulasi perdagangan. Penelitian UNCTAD (2010) menunjukkan NTM meningkat terutama berkaitan dengan akses pasar. Beberapa bentuk NTM yang diperbolehkan WTO sangat terbatas, seperti proteksi karena alasan kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Perkembangannya cenderung meningkat, jika merujuk pada kasus perselisihan dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB). Peningkatan jumlah kasus DSB pada akhir-akhir ini merupakan bukti signifikan pergeseran hambatan perdagangan dari hambatan tarif ke NTM.

Berdasarkan klasifikasi UNCTAD, terdapat 4 klasifikasi NTM: *sanitary and phytosanitary measure, technical barrier to trade, pre-shipment procedures and other formalities*, juga termasuk *licenses, quotas, prohibitions* dan *other quantity control measures*. Selain isu kesehatan, isu lingkungan juga menjadi argumentasi utama diterapkannya NTM. Sejumlah kebijakan yang terkait lingkungan menjadi hambatan perdagangan di beberapa negara. Beberapa Negara mengargumentasikan bahwa kebijakan yang memperhatikan lingkungan diformulasikan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumberdaya.

Disamping penerapan NTMs, Amerika Serikat juga memberlakukan *Special Agricultural Safeguard* pada 189 *tariff lines*, yang mayoritas melingkupi produk susu, gula, dan kapas. *Price-based safeguards* secara otomatis diberlakukan pada *shipment-by-shipment basis*. Sedangkan *quantity based safeguards* sangat jarang terjadi.

3.5.4. New Zealand

Selandia Baru telah dikenal sebagai negara agraris sejak abad ke-19. Kesuksesan Selandia Baru sebagai Negara Petani dan Peternak semata-mata karena kesadaran masyarakat untuk mencintai potensi yang dimilikinya, serta didukung oleh kemudahan perizinan usaha yang menempati urutan ke-2 dari 195 negara sedunia. Negara ini merupakan contoh nyata salah satu negara yang berhasil memajukan kehidupan petani dan peternak, serta sukses mengolah berbagai industri yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Deregulasi ekspor komoditas pertanian dilakukan untuk komoditas susu dan produk turunannya sejak tahun 2010. Meskipun demikian, terdapat komoditas yang masih restriktif adalah kiwi dimana hanya perusahaan Zespri yang mempunyai hak untuk mengekspor kiwi ke negara selain Australia. Dalam perspektif sustainability, New Zealand telah melangkah lebih jauh dibandingkan negara agraris lainnya karena memiliki blueprint untuk *Emission Trading Scheme* pada sektor pertanian sejak tahun 2012

3.5.5. Jepang

Secara umum, tarif impor untuk komoditas pertanian menurut definisi WTO mempunyai nilai rata-rata sebesar 14.9 persen, yang mana lebih tinggi dibandingkan tarif impor untuk klasifikasi produk lainnya (3.7 persen). Terlepas dari penetapan tarif impor, penerapan NTM didominasi oleh *special agricultural safeguard* (SSG) yang diterapkan pada 121 tariff lines. Selama periode waktu 2011-2013, Jepang telah menerapkan secara simultan *volume and price-based SSG*.

Beberapa peraturan teknis fundamental yang harus dipenuhi terkait perdagangan internasional meliputi:

- Jepang mensyaratkan bahwa produk yang diimpor haruslah memenuhi syarat peraturan dari Undang-Undang Sanitasi Pangan, yaitu Undang-Undang Standar Pertanian Jepang (Japan Agricultural Standards atau JAS) dan Undang-Undang Pengukuran/Tera (The Measurement Law)
- Saat belum terdapat persyaratan mengenai kegiatan penelusuran bagi para eksportir di Jepang
- Pemerintah Jepang mensyaratkan para negara pemasok untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Tanaman, Undang-Undang Kesehatan Tanaman dan Undang-Undang Sanitasi Pangan. Berbagai peraturan ini berada di bawah pengawasan dari Divisi Perlindungan Tanaman pada Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries atau MAFF).
- Sebelum produk tiba, pihak eksportir wajib memberitahu kepada stasiun karantina di pintu masuk melalui sistem elektronik yang dioperasikan oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan. Guna mengurangi waktu yang dihabiskan di bea cukai, sebuah contoh produk dapat dibawa ke laboratorium resmi di Jepang atau di

negara pengekspor dan hasilnya diserahkan untuk memperoleh pre-clearance. Pajak dan bea konsumsi harus sudah dibayarkan sebelum persetujuan akhir diberikan.

3.5.6. Thailand

Terkait dengan akses perdagangan komoditas pertanian di Thailand, proteksi tarif impor untuk komoditas pertanian rata-rata mencapai 25 persen. Selain itu, proteksi yang diberikan lebih tinggi tiga kali lipat apabila dibandingkan dengan tarif rata-rata bagi komoditas non pertanian. Disamping itu, Thailand telah mengimplementasikan instrumen tariff rate quotas pada 23 komoditas pertanian, mencakup kuota bawang putih dan minyak kelapa sawit diatur oleh *Public Warehouse Organisation (PWO)*; benih bawang oleh *Cooperative League of Onion Growers of Thailand*; tembakau olehi; dan sisa produk TRQ lainnya diimpor oleh Kementerian Perdagangan. Perdagangan komoditas pangan dan pertanian harus memenuhi beberapa persyaratan meliputi: lisensi impor, and phytosanitary (SPS) measures, labelling dan registrasi produk, dan pajak ekspor.

3.5.7 Cina

Seluruh komoditas pertanian menurut definisi WTO di China dikenakan *ad valorem applied rates* dengan tingkat *average applied MFN rate* mencapai 9.4% di tahun 2013. Tariff rate quotas (TRQs) diaplikasikan untuk 47 tariff lines mencakup: HS Chapters 10 (wheat and meslin, maize, rice), 11 (cereal flours other than of wheat or meslin, cereal groats), 17 (cane or beet sugar), 31 (mineral or chemical fertilizers), 51 (wool, carded or combed), dan 52 (cotton). Dimana In-quota rates tidak berubah semenjak 2011 dan out-of-quota rates bernilai sama dengan *Value Added Tax (VAT)*. VAT pada komoditas pertanian domestik dan impor bernilai 13 persen. Meskipun demikian komoditas pertanian yang diproduksi dan dijual oleh petani berskala kecil tidak dikenakan VAT.

Lisensi impor secara otomatis diaplikasikan pada 76 komoditas pertanian menurut definisi WTO dengan klasifikasi komoditas utama mencakup: *daging, dairy products, oil seeds, fats and oils*, dan tembakau. Satu pengecualian khusus mengenai perdagangan di China adalah industri tembakau China dimonopoli oleh pemerintah dengan kontrol yang ketat di bidang produksi, pemasaran, serta penetapan harga pembelian.

3.5.8. Vietnam

Nilai rata-rata tarif impor komoditas pertanian menurut aturan WO mencapai 17 persen, dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tarif produk non pertanian (10 persen) Dengan akses komitmen WTO, Vietnam mengoperasikan tariff quotas untuk komoditas telur, gula, dan tembakau. *State-owned enterprises* memainkan peranan penting dalam produksi, pengolahan, dan perdagangan produk pertanian di Vietnam, seperti:

- Vietnam Northern Food Corporation (Vinafood1) dan Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood2), melakukan pembelian, pengolahan, impor, dan ekspor pangan dan garam. 50 persen dari ekspor beras Viet Nam dilakukan oleh kedua SOEs tersebut. Vinafood2 mempunyai hak eksklusif untuk mengekspor beras ke Filipina dan telah mendapatkan status supplier berdasarkan government-to-government contract, mencapai 200,000 ton pada 2012/13
- Vietnam National Coffee Corporation (Vinacafe) dengan subsidiaries mempunyai fokus pada semua tahapan dalam value chain kopi, terutama pada pengembangan penelitian pada produksi kopi, dan dukungan teknis dalam hal penyediaan benih dan penyuluhan.
- Vietnam Rubber Corporation, merupakan perusahaan karet nasional dengan 40 subsidiaries, 39 perkebunan, serta 30 industri pengolahan. Perusahaan ini menghasilkan 70% dari produksi total di Vietnam pada tahun 2012;
- Vietnam National Tea Corporation (Vinatea), terlibat pada seluruh tahapan *value chain* komoditas teh dan menyediakan pelayanan penyuluhan.

3.5.9. Mesir

Reformasi pertanian yang sudah dilakukan Pemerintah Mesir privatisasi baik perdagangan pertanian baik domestik dan ekspor, utamanya untuk beras, kapas, dan gula tebu. Intervensi yang dilakukan melalui Departemen Pertanian negara tersebut sudah banyak memfasilitasi petani yang sebagian pendanaannya didukung oleh negara-negara pendonor baik dibidang ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dengan cara meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pelaku pertanian.

Permasalahan utama yang masih dihadapi masyarakat petani di Mesir adalah terbatasnya lahan yang subur (3,3 juta Ha) dan ketersediaan air.

Kegiatan pertanian menggunakan hampir 80 persen air yang sebagian besar tersedia pada Sungai Nil. Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pertanian dan program-program penelitian yang mengarah pada peningkatan produksi melalui intensifikasi, efisiensi sarana produksi pertanian, menekan pengaruh negatif lingkungan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan manusia. Kebijakan ini diperkuat pula dengan membangun irigasi dan *water tank* serta infrastruktur di perdesaan

Penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yakni sekitar masih menjadi prioritas utamanya. Program kegiatan yang dilakukan antara lain adalah: peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan melalui perbaikan teknik budidaya pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Terkait pemasaran pertanian, Pemerintah Mesir memfasilitasi dalam membuka saluran pemasaran yang dapat diakses oleh petani kecil sehingga memiliki peluang yang sama dalam mengakses pasar domestik maupun global.

3.5.10. India

Penerapan kebijakan perdagangan difokuskan untuk mendukung kebijakan pertanian domestik India. Tarif impor komoditas pertanian di India sangat tinggi dengan rata-rata 36.4 persen. Sebagai ilustrasi, otoritas perdagangan di India dapat menerapkan restriksi ekspor dan impor untuk alasan keamanan, kemandirian pangan, neraca pembayaran, kesehatan dan pertimbangan moral.

India menghubungkan antara penggunaan restriksi impor dan impor kepada lisensi perdagangan dan NTM lainnya dengan kebijakan domestik. India menjaga sistem state trading requirements untuk impor komoditas *wheat, rye, oats, rice, grain sorghum, buckwheat, millet, canary seed, jawar, bajra, ragi, other cereals, milk or cream, sunflower seed or safflower oil, copra, coconut oil, and maize, and on exports of onions, gum karaya, dan sugar*

3.6. Kebijakan Orientasi Output Negara Berkembang

3.6.1. Vanuatu

Sekitar 25% dari perubahan biaya perdagangan non-tarif dijelaskan oleh '*line shipping index*'. Mengingat lokasi geografis Vanuatu dan kurangnya konektivitas yang baik, maka biaya transportasi dan

logistik perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, bantuan negara Donor berperan sangat penting. Program NZAID dengan pemerintah Vanuatu melakukan program yang mendukung konektivitas perdagangan dengan membangun jetty, merehabilitasi dermaga, dan membangun terminal antar pulau di Port Vila.

3.6.2. Kenya

Komoditas pertanian Kenya terfokus pada komoditas berbasis *primary products* dengan nilai tambah rendah seperti teh, kopi, hortikultura dan produk perikanan. Komoditas tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Belum adanya blueprint pengembangan akses pasar. Disamping itu, restriksi perdagangan yang dikenakan adalah *Value Added Tax (VAT)*. VAT dibebankan dengan standar rate 16 persen untuk komoditas yang diproduksi secara domestik dan impor

3.6.3. Nigeria

Nigeria adalah net importir komoditas pertanian, meskipun demikian beberapa komoditas ekspor unggulan meliputi: *kakao, sesame seeds, gum arabic, cigarettes, cut flowers, dan cotton*.

Restriksi perdagangan dalam bentuk tarif impor cenderung lebih tinggi untuk melindungi produk dalam negeri. Penerapan mengenai kebijakan *Non Technical Barrier* salah satunya adalah penyertaan sertifikat meliputi produk makanan, obat, kosmetik, dan impor pestisida. Selain itu, dilakukan penerapan mengenai kebijakan *Sanitary Phytosanitary* untuk komoditas daging. Secara rata-rata, tarif impor untuk komoditas pertanian 15.6 persen dan lebih tinggi dibandingkan komoditas pertanian Nigeria tidak menerapkan *tariff quotas*, subsidi ekspor, dan kredit ekspor.

Nigeria juga mengimplementasikan larangan impor untuk komoditas *poultry, eggs, pork, beef, cassava, some refined vegetable oils, cocoa butter, powder and cakes, spaghetti and noodles, packed fruit juice, dan drinking waters*. Secara spesifik, kebijakan pertanian terkait komoditas pertanian adalah mengenai produksi cassava didukung oleh persyaratan produksi tepung terigu untuk mencampur 5 persen cassava dalam produk tepung tersebut.

3.6.4. Solomon Island

Nilai MFN applied tariff rata-rata untuk komoditas pertanian di Solomon Islands menurut *International Standard Industrial Classification* (ISIC), mencapai 9.3% .

Terkait kelembagaan, The Commodities Export Marketing Authority (CEMA) merupakan badan yang mempromosikan komoditi ekspor terutama untuk komoditas *coconut and coconut products, copra, cocoa pods, cocoa beans and products, palm oil, palm kernel, palm-based products, coffee*, dan *spices*. CEMA menerapkan standar kualitas untuk kakao dan kopra, dan membebaskan biaya inspeksi SI\$40 per ton untuk ekspor kakao (US\$5.20) dan SI\$30 per ton untuk ekspor kopra. Investasi asing dilarang untuk aktivitas *plant crop cultivation* dan *livestock farming* untuk penjualan domestik .

Satu insentif pemerintah terkait komoditas pertanian adalah terkait *tax exemptions*. Menurut *Income Tax Act*, perusahaan pertanian yang baru dapat menerima *income tax exemptions* pada 5 sampai dengan 10 tahun pengoperasian. Kelemahan lainnya yang perlu ditangani adalah kapasitas dari *Ministry of Agriculture and Livestock* terkait dengan *extension services* terbatas, dan banyak inisiatif sangat tergantung dengan pendanaan donor.

3.6.3. Sierra Leone

Sierra Leone, yang sebelumnya mengalami status swasembada pangan sebelum tahun 1990, saat ini sangat dependen terhadap impor pangan dan food aid. Mayoritas komoditas yang diimpor adalah beras dan animal and vegetable oils.

Nilai applied MFN tariff untuk komoditas pertanian mencapai 15.1% (effective applied MFN tariff, termasuk *excise tax* dan *ECOWAS levy* mencapai 15.6%). Impor komoditas pertanian dan input pertanian utama Sierra Leone meliputi *plants, seeds, soil other than sterilized peat and special rooting compost, and any material mixed with any type of soil* disyaratkan peraturan lisensi impor untuk konsiderasi kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Terkait aturan ekspor, Sierra Leone mengimplementasikan 2.5% pajak ekspor untuk komoditas kakao dan kopi. Sierra Leone meregulasi

ekspor untuk komoditas *plants and charcoal* terkait *phytosanitary/fumigation certificates*.

3.6.4. Nepal

Mayoritas pos tarif yang dikenakan tarif *ad valorem*, tetapi beberapa produk pertanian (yaitu minuman keras, tembakau dan produk tembakau) dikenakan tarif tertentu. Penerapan tarif impor MFN komoditas adalah 9,7 persen, dan 2,6 persen lebih rendah dari manufaktur (12,3 persen).

Intervensi pemerintah yang diberikan melalui kombinasi tindakan proteksi (pada dasarnya tarif impor); dukungan domestik (terutama pinjaman, termasuk melalui ADB); dan kebijakan struktural, termasuk kredit dan dukungan untuk penelitian dan penyuluhan oleh SFDB. Nepal tidak memiliki TRQs pada produk pertanian, atau sistem harga dijamin.

Restriksi lainnya yang dapat diimplementasikan adalah terkait alasan religi. Nepal melarang impor, produksi dalam negeri, dan penjualan daging sapi dan daging sapi produk, serta minuman keras yang mengandung lebih dari kandungan alkohol 60 persen.

3.6.5. Papua New Guinea (PNG)

Meskipun PNG telah melakukan *tariff reforms*, MFN tariff untuk komoditas pertanian masih sangatlah tinggi di level 40 persen sehingga masih menunjukkan *effective rates of protection* yang kuat. Beberapa komoditas pertanian yang diregulasi secara ketat adalah *cigarettes* dan *beer* diproduksi oleh *domestic multinational monopolies* dan didukung oleh tarif spesifik yang sangat tinggi.

Komoditas unggulan ekspor Papua Nugini adalah komoditas kopi. Oleh karena itu, impor *green coffee* untuk pengolahan dilarang di PNG. Produk kopi yang telah diolah dapat diimpor dengan MFN tariff sebesar 25 persen. Institusi yang dapat mengeskpor biji kopi diatas 10 kg adalah CIC yang juga bertugas untuk mengurus lisensi ekspor dan penerapan standar. Aktivitas CIC dibayai oleh pajak ekspor kopi K 100 per ton yang mampu menghasilkan 6 sampai 7 Juta per tahun. CIC juga memberikan bantuan sertifikasi internasional seperti Fairtrade sehingga *registered exporters* dapat menjual kepada Starbucks melalui *CAFE practices*.

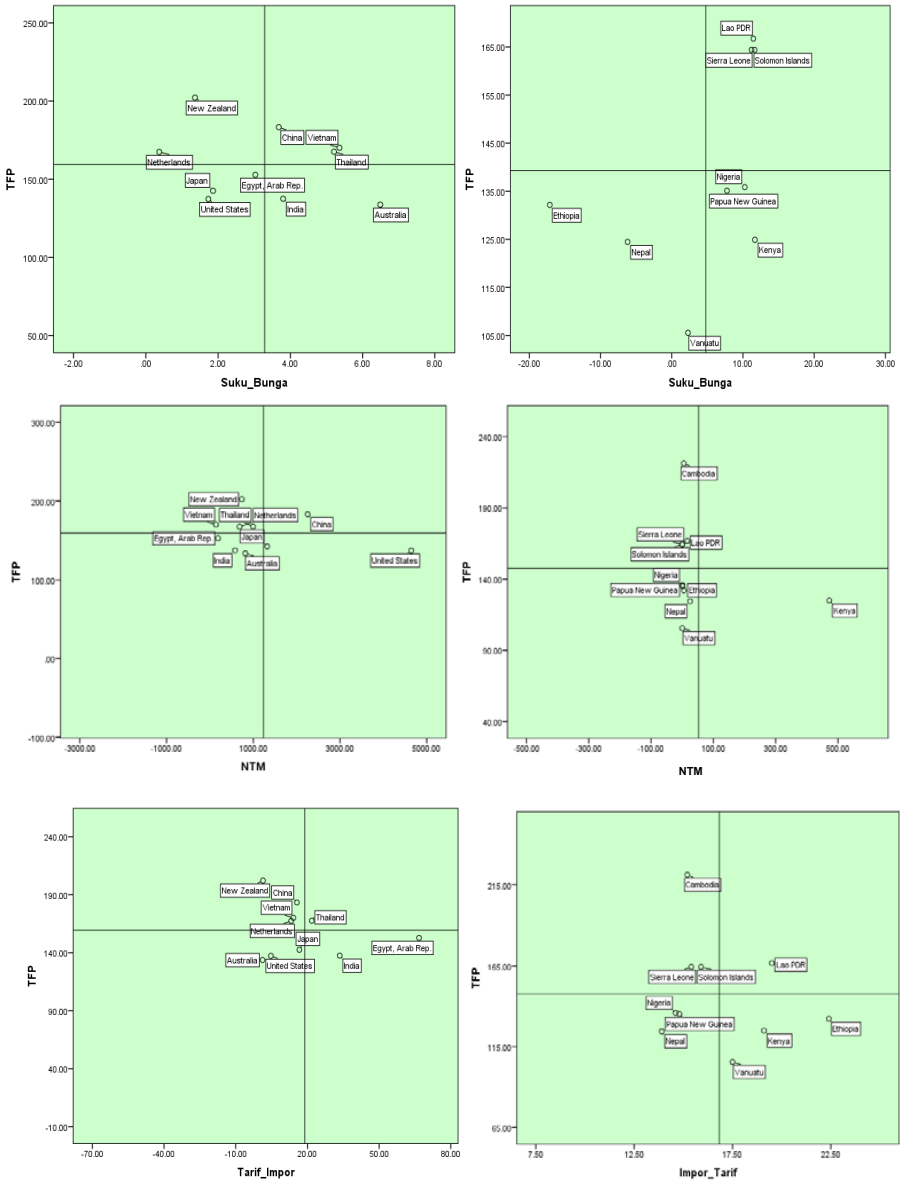
3.6.7. Laos

Tingkat proteksi yang diberikan kepadaindustri dalam negeri melalui pengenaan bea, hambatan non-tarif dan pajak dalam negeri diproduk dapat diukur dengan perkiraan tingkat perlindungan efektif (*Effective Rate of Protection*). ADB (2012) menunjukkan bahwa nilai ERP menunjukkan perlindungan yang sangat signifikan untuk industri seperti makanan dan minuman, serta tembakau. Selanjutnya, kebijakan perdagangan dan insentif perdagangan di Laos tampaknya menjadi biasterhadap sektor yang memiliki potensi untuk menjadi komoditas orientasi ekspor seperti yang tercermin dalam sektor pertanian.

3.7. Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, Pertanian, dan Akses Pasar terhadap Indikator Pertanian Negara Maju dan Berkembang

Pada Gambar 6. dapat dilihat keterkaitan antara tingkat suku bunga, tarif impor, dan hambatan *non tariff* dengan produktivitas baik pada negara berkembang maupun negara maju. Produktivitas di negara maju sudah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Tingginya produktivitas ini tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Dapat terlihat bahwa pada negara maju, tingkat suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini merupakan salah satu insentif bagi pelaku ekonomi, terutama di negara maju untuk meningkatkan investasinya. Sedangkan untuk negara berkembang, investasi masih sangat minim, apalagi untuk sektor pertanian. Hal inilah yang membuat pengembangan produktivitas di negara berkembang masih sangat sulit dilakukan.

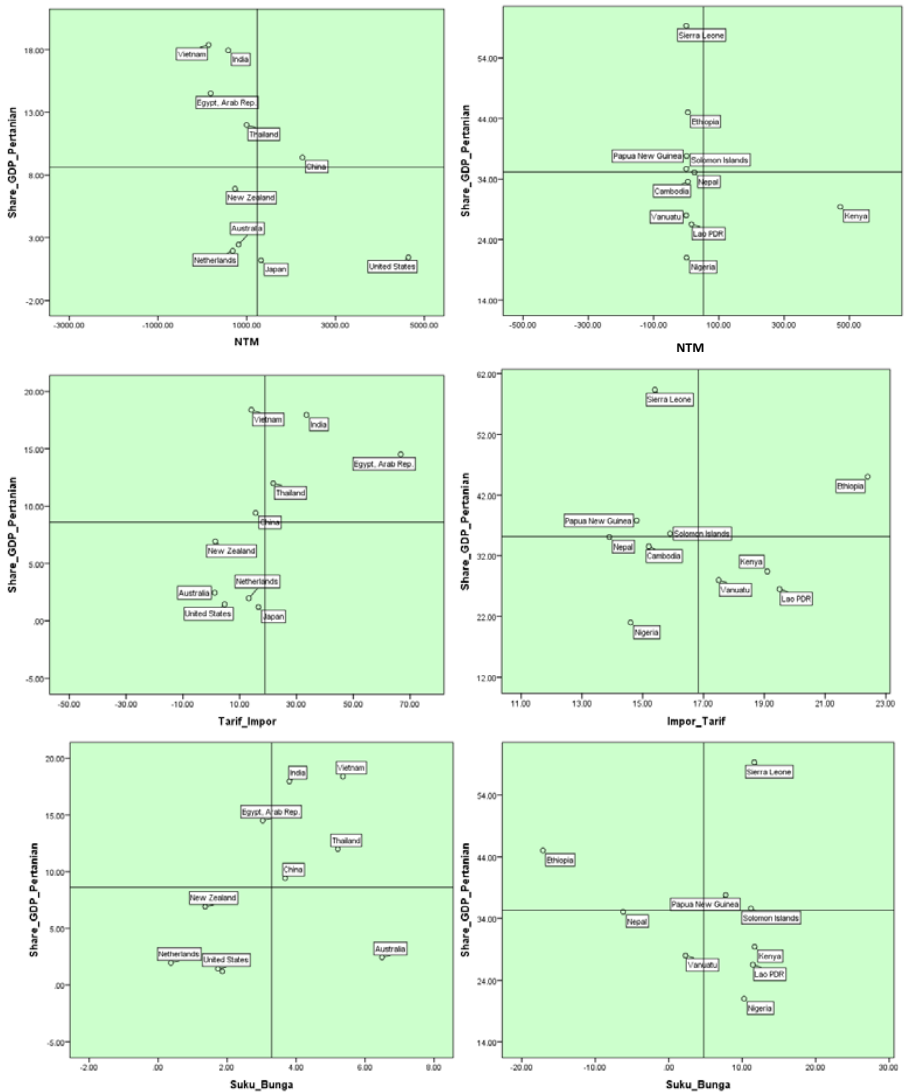
Regulasi perdagangan juga dilakukan baik oleh negara maju dan berkembang. Tingginya produktivitas di negara maju didorong oleh proteksi yang baik terhadap produk lokal negaranya. Rata-rata besarnya *non tariff measure* (NTM) di negara maju cukup tinggi. Sedangkan pada negara berkembang NTM masih relatif rendah, karena negara berkembang kebanyakan masih berorientasi pada kecukupan pangan dalam negeri dan ini dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan impor. Begitu juga dengan tariff impor yang diberlakukan negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding negara maju. Hal ini terkait dengan pendapatan dari perdagangan yang bisa diperoleh.



Gambar 6. Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap Produktivitas

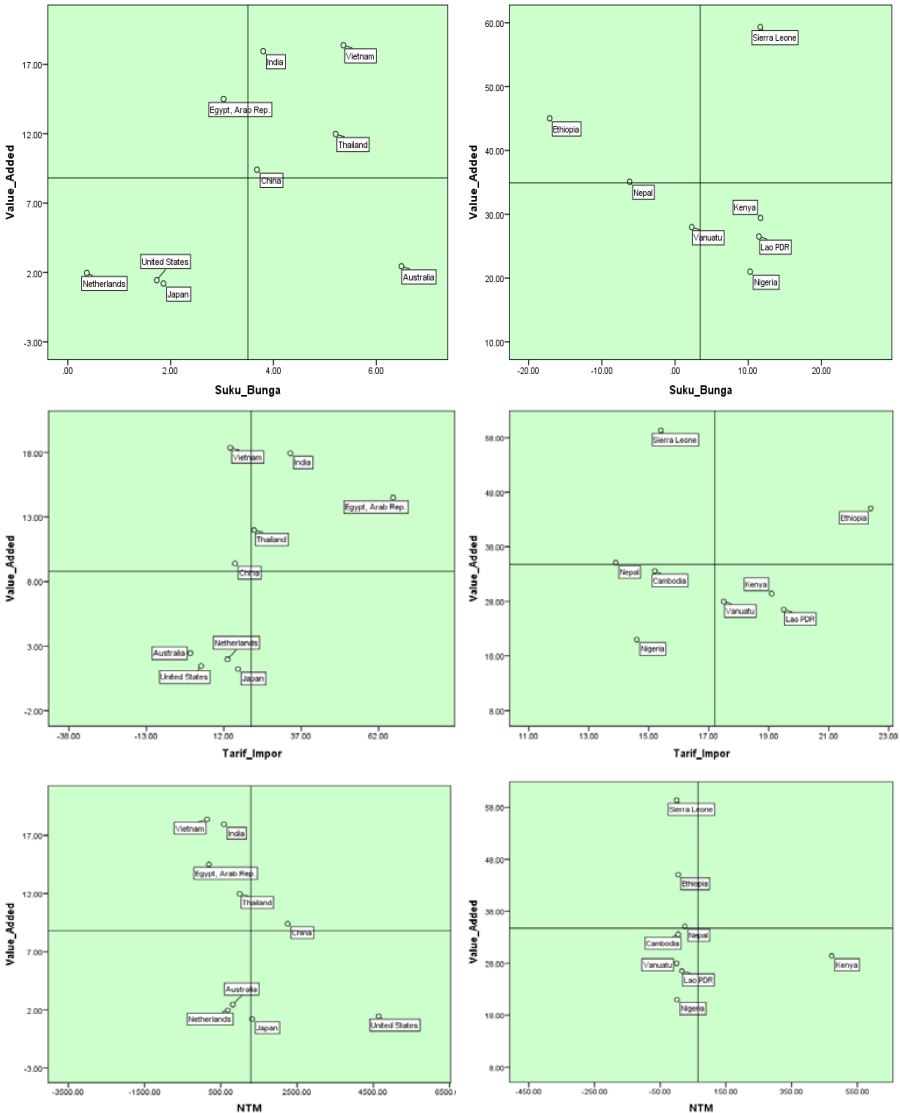
Seperti yang kita tahu, *share* GDP sektor pertanian pada negara maju relatif rendah, sedangkan pada negara berkembang masih menjadi sektor andalan perekonomiannya. Rendahnya tingkat suku bunga di negara maju merupakan salah satu insentif bagi investor untuk menginvestasikan

dananya di negara tersebut. Namun, sektor yang menjadi favorit bukanlah sektor pertanian. Hal inilah yang membuat rendahnya *share* GDP sektor pertanian. Kebijakan tarif impor dan NTM kebanyakan digunakan untuk memproteksi produk pertanian. Kedua indikator ini masih belum bisa mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian



Gambar 7. Petaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap *Share* GDP Pertanian

Tidak jauh berbeda dengan *share* GDP pertanian, nilai tambah sektor pertanian di negara maju yang memang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. Negara maju tidak berfokus lagi pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian, namun lebih pada sektor industri. Kebijakan suku bunga, NTM dan tariff impor akan lebih berdampak pada nilai tambah sektor industri terutama yang terkait dengan teknologi dan jasa.



Gambar 8. Pemetaan Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Perdagangan terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian

Sinkronitas Arah Pembangunan Pertanian melalui Kerjasama Pertanian Indonesia dan global

4.1. Sinkronisasi Kerjasama Pertanian Indonesia dengan Negara Mitra

Dalam satu generasi dari sekarang, yaitu pada tahun 2037, ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada peringkat tujuh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. Hal ini diprediksi dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya (Husodo, 2012) : PDB Indonesia meningkat signifikan menjadi Rp 7.031 triliun pada tahun 2011, populasi kelas menengah meningkat tajam dari 25 persen pada tahun 1999 menjadi 56,5 persen pada tahun 2010. Selain alasan tersebut, dalam sepuluh tahun terakhir ekonomi Indonesia meningkat 4,5 – 6,6 persen per tahun.

Terkait dengan prediksi di atas, maka tantangan tidak bisa dihindari oleh Indonesia pada masa mendatang (Takii and Ramstetter, 2007; Rusastra, 2010; Husodo, 2012) seperti (1) peningkatan ketimpangan pendapatan, sehingga dibutuhkan kepastian tentang implementasi pembangunan dan pertumbuhan inklusif, (2) peningkatan kapasitas ekonomi nasional dengan menciptakan dan membesarkan industry nasional serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang mendekati angka 7 persen per tahun, (3) untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan inklusif, maka industrialisasi dan modernisasi pertanian dalam arti luas (termasuk

perikanan dan kehutanan) perlu untuk mendapatkan prioritas dengan tetap berjalan beriringan dengan sektor lainnya.

Di negara berkembang termasuk Indonesia, kontribusi sektor pertanian masih menjadi sektor yang memegang peranan utama dalam perekonomian nasional. Hal ini juga masih akan terjadi pada masa mendatang. Sektor pertanian akan semakin penting mengingat bahwa pertanian sebagai sumber pertumbuhan, kesempatan kerja, pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Krisis finansial yang pernah terjadi memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan krisis pangan dan krisis energi. Krisis pangan diawali oleh krisis energy yang memicu kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan. Krisis finansial yang diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global telah memunculkan fenomena baru yaitu krisis harga pangan (Rusastra *et al*, 2010). Krisis pangan dan finansial secara simultan berdampak pada ketahanan pangan, ketahanan politik, dan stabilitas ekonomi kawasan serta global (von Braunn, 2008).

Tantangan global yang dihadapi banyak negara pada saat ini adalah kemiskinan yang kian meluas, perubahan iklim dan bencana alam, konflik yang berkepanjangan dan kesenjangan ekonomi. Berbagai negara telah berkomitmen dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) pada KTT millennium PBB. Menjelang berakhirnya MDGs tahun 2015, negara-negara di bawah PBB mulai merumuskan agenda pembangunan global pasca 2015. Terkait dengan upaya memformulasi *Post-2015 Development Agenda*, Indonesia mendukung tersusunnya roadmap bagi *intergovernmental process* guna penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 dan Indonesia berpandangan bahwa agenda dimaksud harus dibangun berdasarkan *lessons learned and best practices* dari pelaksanaan MDGs. Indonesia mendukung pandangan yang menetapkan *poverty eradication* sebagai visi *Post 2015 Development Agenda* melalui *economic growth*, terutama mewujudkan *sustainable growth with equity*, perhatian terhadap aspek sosial, dan perlindungan lingkungan.

Kunci sukses pencapaian MDGs dan SDGs terletak pada kinerja sektor pertanian. Hal ini dikarenakan oleh beberap sebab meliputi:

- Mayoritas penduduk miskin berada di negara-negara berkembang yang nafkah utamanya bergantung pada sektor pertanian.
- Adanya keterkaitan yang sangat erat antara kemiskinan dan kerawanan pangan, sedangkan penghasil pangan adalah sektor pertanian.

- Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga masa depan ketahanan pangan akan diwarnai oleh pertumbuhan pasokan pangan yang tidak stabil dan harga pangan makin volatil.

Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 sebagai tindak lanjut dari program sebelumnya merumuskan bahwa pertanian merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pertanian global yang akan mampu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta intensifikasi pertanian yang berkelanjutan. Koherensi dan sinkronitas target SDGs juga terlihat dengan dilansirnya produk legitimasi turuan yang implementatif oleh Indonesia, seperti:

- UU No 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- PP No 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
- PP No 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
- PP No 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
- PP No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- UU No 18 tahun 2012 tentang pangan

Secara umum, beberapa strategi yang dilakukan kedepannya untuk ketahanan pangan dan nutrisi diantaranya adalah : Pertama, Mengembangkan sektor pangan yang secara ekonomis efisien dan menguntungkan, secara sosial di terima masyarakat, dan sesuai secara lingkungan. Kedua, meningkatkan produksi dan perdagangan pangan dan menyempurnakan pengelolaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Ketiga, Mengupayakan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, serta meningkatkan daya saing dalam memproduksi pangan

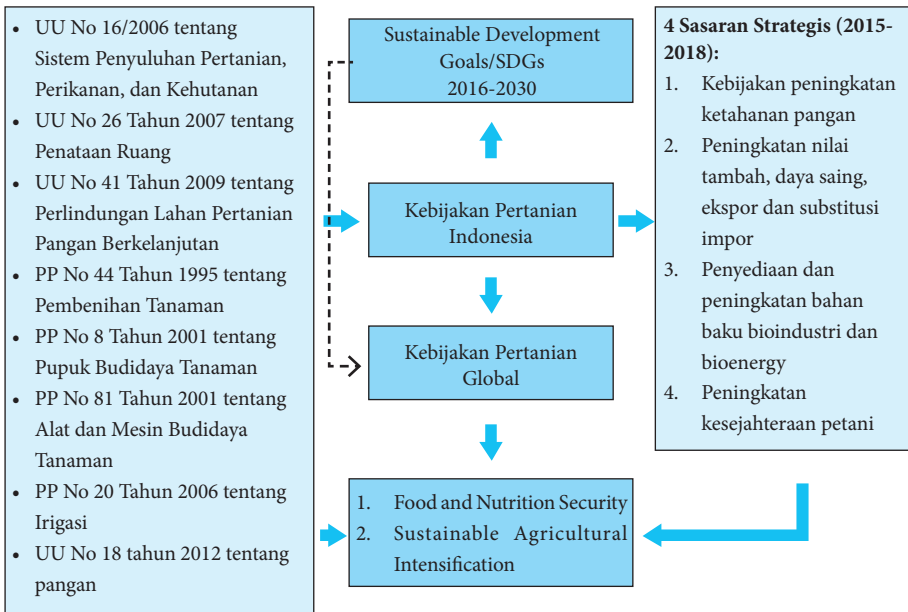
Sedangkan strategi yang bisa diterapkan untuk intensifikasi pertanian yang berkelanjutan yaitu : Pertama, Memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kinerja lingkungan pertanian. Kedua, Mengembangkan sistem pertanian intensif ekologis. Ketiga, sinkronisasi antara SDGs 2016-2030, kebijakan pertanian Indonesia, serta kebijakan pertanian global.

Berdasarkan pendeskripsian poin-poin kebijakan dan strategi yang telah dikemukakan, maka pencapaian simultan target kebijakan

pertanian Indonesia dalam lingkup luas sekaligus pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia meliputi 4 sasaran strategis pertanian tahun 2015 – 2018, yaitu :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan
2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor
3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi
4. Peningkatan kesejahteraan petani

Secara grafis, Sinkronitas Kebijakan Pertanian Global dan Indonesia dirpresentasikan oleh Gambar 9.



Sumber: Hermanto, 2015¹

Gambar 9. Sinkronitas Kebijakan Pertanian Global

4.2. Rekomendasi Kebijakan

Kunci sukses pencapaian agenda 2030 terletak pada kinerja sektor pertanian. Namun, tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin kompleks dan multidimensi, tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi sangat terkait dengan masalah-masalah di tingkat global. Karena

¹ Paparan pada Seminar Nasional “Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Negara Mitra” Tanggal 6 Oktober 2015

itu, kemitraan global (antar negara, organisasi internasional/regional dan perusahaan multinasional) .

Sinkronitas dan *Policy Partnership* diperlukan untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh negara mitra dalam rangka mendorong pengembangan kerjasama secara sinergitas dan saling melengkapi dalam implementasi pelaksanaan agenda 2030. Saat ini, posisi Indonesia di dunia internasional mulai dipertimbangkan. Hal tersebut diperlihatkan dengan status Indonesia menjadi *Middle Income Country* dan sebagai anggota G-20, yang dipertegas dengan *Jakarta Commitment 2009* dan *Busan Outcome Document 2011* membawa konsekuensi peningkatan peran Indonesia di dunia internasional. Selain peran aktif Indonesia di dunia internasional, kontribusi Indonesia untuk negara-negara berkembang lainnya juga menjadi fokus dalam kerja sama pembangunan maupun dalam menjalin kemitraan global.

Dalam tataran kerjasama dengan negara berkembang, Indonesia dapat menjadi donor atau pioner dalam pengembangan sektor pertanian Negara berkembang melalui *capacity building* dan *knowledge transfer*. Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan oleh Bappenas (2015), mayoritas klasifikasi program yang dilakukan berupa program *capacity building* yang secara umum terdiri atas aktivitas pendidikan dan pelatihan, *workshop*, program beasiswa, dan *expert dialogue*. Disamping itu, porsi bantuan teknis yang dilakukan dalam skema KSSST juga dilakukan meskipun dengan jumlah kegiatan yang sedikit, seperti bantuan alsintan (traktor tangan) yang merupakan komitmen untuk Vanuatu dan Fiji yang akan dilaksanakan di tahun 2015.

Sementara itu, *policy partnership* dengan Negara maju sebaiknya diarahkan untuk kerjasama terkait pengaplikasian teknologi dalam pertanian, inovasi pertanian, manajemen resiko, sistem insentif bagi pertanian berkelanjutan, peningkatan *compliance* dalam sertifikasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.

Secara umum, kebijakan kerja sama luar negeri pertanian Indonesia sudah selaras atau mengikuti agenda pembangunan dan kebijakan pertanian dunia. Namun, penajaman kebijakan dan program pembangunan pertanian Indonesia masih tetap diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi lebih terfokus, ringkas, jelas, tegas dan konsisten terhadap agenda 2030.



Daftar Pustaka

- Bank of Thailand. 2015. <https://www.bot.or.th/English/Statistics/>. Akses Tanggal 27 September 2015.
- [FADN] Farm Accounting Data Network. 2015. http://ec.europa.eu/agriculture/rca/database/database_en.cfm. Akses Tanggal 27 September 2015.
- CDC. 2005. Monetary and Fiscal Performance. http://www.cdc-cdrb.gov.kh/cdc/8cg_meeting/position_paper_eng2006/ii_3_monetary.htm. Diakses Tanggal 27 September 2015.
- European Commissions. 2015. Country Report Netherlands 2015 Including An In-Depth Review On The Prevention And Correction Of Macroeconomic Imbalances. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_netherlands_en.pdf. Akses Tanggal 28 September 2015.
- Gwartney et. al. 2012. "Government Spending and Taxation", dalam *Macroeconomics: Private and Public Choice*. Cengage Learning, ed 14th
- Husodo, S.Y. 2012. Indonesia, Maju, dan Sejahtera. Harian Kompas, Edisi Kamis, 8 Maret 2012. Jakarta.
- Phalla, K. 2013. Fiscal Policy for Development and its Budgetary Implications in Cambodia. http://www.unescap.org/sites/default/files/Phalla-Session3-4_12.pdf. Akses Tanggal 27 September 2015.

- Rusastra, I.W. 2010. Rerorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Rusastra, I.W. Saliem, H.P. dan Ashari. 2010. Krisis Global Pangan-Energi-Finansial : Dampak dan Respon Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 1, Maret 2010. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Stiglitz, Joseph. 2012. "The Battle of The Budget", dalam *The Price of Inequality: How Today Divided Society*. Norton Company Ltd.
- Takii, S and Ramstetter, E.D. 2007. *Survey of Recent Developmen. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 45, No. 4. ANU. Canberra.
- World Trade Organization. 2015. *Trade Policy Review Body Report by New Zealand*. WT/TPR/G/316, May 2015. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g316_e.pdf. Akses Tanggal 1 Oktober 2015.

**PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI-KEMENTERIAN PERTANIAN RI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN (FEM) IPB
2015**